

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NASIONALISME MOHAMMAD HATTA ANTARA 1945-1956

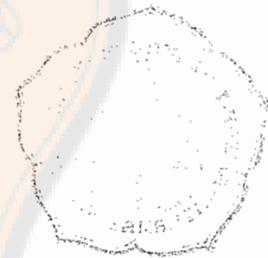
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh:

Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro
NIM: 991314019



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2004

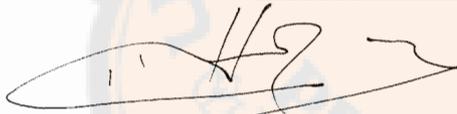
NASIONALISME MOHAMMAD HATTA ANTARA 1945-1956

Oleh:

Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro
NIM: 991314019

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal 31 Agustus 2004

Pembimbing II



Drs Sutarjo Adi Susilo J. R.

Tanggal 31 Agustus 2004

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

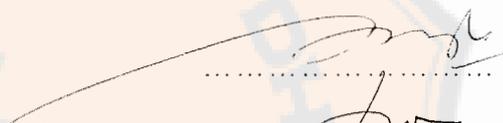
NASIONALISME MOHAMMAD HATTA ANTARA 1945-1956

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

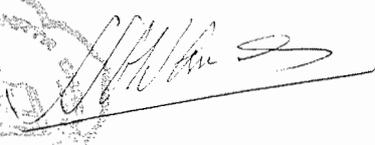
Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro
NIM: 991314019

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 1 Oktober 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.	
Anggota	: Drs. A. A. Padi	

Yogyakarta, 1 Oktober 2004
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,


Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

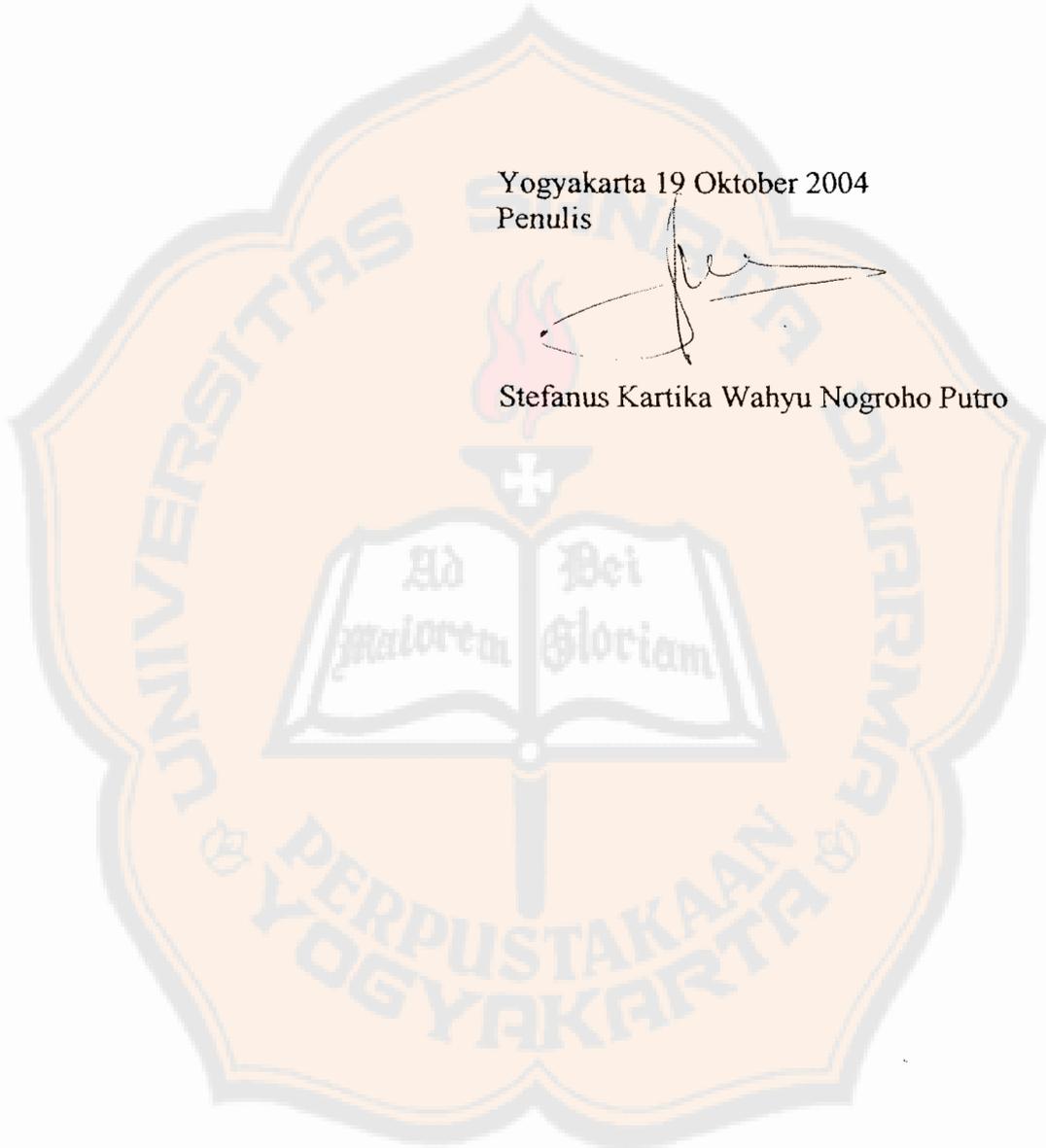
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta 19 Oktober 2004
Penulis



Stefanus Kartika Wahyu Nogroho Putro



Persembahan

Yesus Kristus yang telah memberikan segala berkat & karunianya, selama pergumulan dalam kuliah.

Kedua orang tuaku, adikku Tian yang telah memberikan dukungan bagi penulis baik materi maupun spiritual.

Keluarga Bapak Suparman

Christina Endang Prasetyaningsih, SE. yang memberikan motivasi untuk pengerjaan skripsi & kesetiaannya dalam mendukung kebersamaan

Teman-teman P3W UPT Perpustakaan Sanata Dharma, Kolobendono 6, Trembuku 6 B, Gathotkaca 17 B, Fared. Agustinus & Yuyud, yang memberikan dukungan dalam mengembangkan hubungan bersahabat dalam perantauan.

MOTO

Suatu Jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan "KUDUS" dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar.
(Amsal 20. Ayat 25)

Setiap Gunung mempunyai puncak, setiap lembah memiliki tempat yang paling rendah. Kehidupan ini mempunyai pasang surut, mempunyai puncak dan lembahnya. Tidak seorangpun akan mengalami surut. Inilah keadilan dan keseimbangan hidup. (Camar Indonesia)

Hendaklah bersyukur atas berkat Tuhan,
Walaupun tidak sepadan dengan apa yang kita inginkan,
Akan tetapi ucapkanlah syukur s'lalu

ABSTRAK

Nasionalisme Mohammad Hatta Antara 1945-1956

Oleh Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro

Penulisan skripsi yang berjudul Nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956 ingin menjawab tiga permasalahan, pertama peran Mohammad Hatta periode 1945-1956, kedua hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956, ketiga pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik, ekonomi dan sosiologi, dengan metode penulisan deskriptif analitis.

Mohammad Hatta berperan dalam membentuk pemerintahan demokratis dengan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui perubahan kedudukan KNIP, dan membuka kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik dalam pemilihan umum. Pemerintahan yang demokratis harus menerapkan landasan perekonomian yang mengedepankan kebebasan untuk mengembangkan perekonomian rakyat melalui koperasi dan penghematan keuangan negara. Dasar-dasar tersebut perlu didukung dengan penciptaan landasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, demi terciptanya perdamaian dunia dan kesejahteraan rakyat.

Dengan penerapan demokrasi di Indonesia setiap gerakan oposisi harus berdasarkan pada konstitusi, Kestabilan dalam negeri dapat mendukung perjuangan diplomasi dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintahan di Indonesia. Langkah tersebut terbukti pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam persetujuan KMB di Den Haag.

Mohammad Hatta pada awal kemerdekaan menjalin hubungan dengan Sukarno dan Sutan Syahrir, namun dalam perkembangannya mengalami perbedaan prinsip, tetapi mereka mampu menghargai perbedaan di alam demokrasi. Karena dasar-dasar politik dalam dan luar negeri yang telah dibangun tidak diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dalam pegawai pemerintahan dan ketentaraan, maka pelaksanaan pendidikan politik dan pencapaian keadilan sosial dalam ekonomi tidak terlaksana.

Mohammad Hatta mengudurkan diri dari pemerintahan karena ia memandang bahwa perjuangan menegakkan demokrasi haruslah berlandaskan pada konstitusi. Dengan dasar inilah berbagai langkah strategis yang diambil Mohammad Hatta merupakan perwujudan nasionalismenya sebagai pelopor terciptanya demokrasi berdasarkan konstitusi.

ABSTRACT

Mohammad Hatta Nationalism During 1945-1956

By Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro

The aim of the thesis entitled Mohammad Hatta nationalism in 1945-1956, was to answer three problems. First, Mohammad Hatta contributions during 1945-1956, second the relationship between Mohammad Hatta and Sukarno as well as Sutan Syahrir in 1945-1956, and third was the influence of Mohammad Hatta nationalism during 1945-1956.

The research used historical method which covered heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The approach used in this research is political, economical, and sociological with analytical descriptive writing.

Mohammad Hatta had contribution in building the democratic government by giving supervision on the running of government through the positioning reform of KNIP, and giving civilians the opportunity to participate through political parties in general election. The democratic government must apply economic-based that proposing freedom, for developing public's economics through cooperation and national economizing finance. The basics mentioned above needed to be supported by creating the foundation of Indonesian active and independence foreign politics for the citizen's welfare and world peace.

By applying democracy in Indonesia, every opposition's movement must be based on constitution. Therefore, nationality stability will be achieved to support diplomatic struggle and to increase international's trust towards Indonesian government. The step was proved when Holland confessed the Indonesia's independence in KMB conference in Den Haag.

At the first time of Indonesian independence, Mohammad Hatta had good relationship with Sukarno and Sutan Syahrir but later they had different principals. However, they still appreciate the differences in democracy realm. Because the national and foreign political-base that had been built was imbalance with professionalism improvement of state officials and military, the application of political education and achievement of and social fairness faced its failure.

Mohammad Hatta resigned from the governmental with a consideration that the struggle for holding up the democracy should propose constitution. Hence, Mohammad Hatta took some strategic steps that reflect his nationalism as the upholder of constitutionally based democracy.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang telah dilimpahkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Nasionalisme Mohammad Hatta 1945-1956.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis meyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma
3. Bapak Prof. Dr. P.J Suwarno. SH selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adi Susilo J. R selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan berbagai masukan bagi penulis hingga selesai.
5. Bapak Drs A. A Padi selaku pembimbing akademik yang memberikan dukungan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan dukungan dalam pendewasaan keilmuan bagi penulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Segenap teman-teman Pendidikan Sejarah yang senantiasa mendukung terutama Pindah S.pd, Margaretha S.pd, Tutix's (Iteng), Nana, Dewi S.pd, Suprihati S.pd dan beberapa teman yang lainnya.
8. P3W Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang selalu memberikan dukungan dan merelakan waktunya, untuk menggantikan pekerjaan di perpustakaan apabila penulis sedang mengerjakan skripsi.
9. Segenap karyawan perpustakaan Sanata Dharma dan Kolese St Ignatius Kotabaru yang telah memberikan bantuan dalam pencarian buku-buku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk menyempurnakan isi skripsi ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab dari penulis.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan bagi kemajuan pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

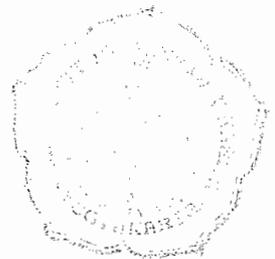
Yogyakarta 8 September 2004

Penulis

Stefanus Kartika Wahyu Nugroho Putro

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.....	18
F. Hipotesis.....	27
G. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II Peran Mohammad Hatta Periode 1945-1956	34
A. Peran Bidang politik	34
1. Politik Dalam Negeri	34
2. Politik Luar Negeri	51



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Peran Bidang Ekonomi.....	64
1. RE-RA	64
2. Koperasi.....	74
BAB III Hubungan Mohammad Hatta Dengan Sukarno	
Dan Sutan Syahrir Antara 1945-1956	84
A. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno.....	84
B. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sutan Syahrir.....	101
BAB IV Pengaruh Nasionalisme Mohammad Hatta Antara	
1945-1956	110
A. Dalam Bidang Politik	110
B. Dalam Bidang Ekonomi.....	117
BAB V Kesimpulan	126
Daftar Pustaka	131
Lampiran	137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Silabus.....	137
Lampiran 2. Penilaian dan Evaluasi.....	148
Lampiran 3. Uraian Materi.....	150
Lampiran 4. Teks Proklamasi.....	152
Lampiran 5. Maklumat Wakil Presiden No. X.....	153
Lampiran 6. Penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X.....	154
Lampiran 7. Maklumat 1 November 1945.....	155
Lampiran 8. Maklumat 3 November 1945.....	161
Lampiran 9. Maklumat 14 November 1945.....	162
Lampiran 10. Foto pada saat pergantian kabinet setelah dikeluarkannya maklumat 14 November 1945.....	164
Lampiran 11. Foto Mohammad Hatta dengan Sukarno Dan Sutan Syahrir.....	165
Lampiran 12. Foto Mohammad Hatta saat sidang pleno KNIP di Malang setelah perjanjian Linggajati.....	166
Lampiran 13. Foto saat Mohammad Hatta dalam penawanan setelah agresi militer Belanda kedua.....	167
Lampiran 14. Foto Mohammad Hatta, Sukarno dan Kabinet RIS.....	168
Lampiran 15. Foto Mohammad Hatta saat upacara penyerahan kedaulatan oleh Belanda di Den Haag.....	169

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Huszer dan Stevenson, nasionalisme menentukan bahwa suatu bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah airnya¹. Definisi nasionalisme Huszer dan Stevenson mengandung pengertian, bahwa setiap bangsa memiliki perasaan cinta terhadap tanah air, dalam kerangka kesatuan untuk membentuk negara kebangsaan. Menurut Boyd C. Shafer, nasionalisme dimengerti sebagai berikut: (1) nasionalisme adalah *rasa cinta* pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama; (2) nasionalisme adalah suatu *keinginan* akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa; (3) nasionalisme adalah *dogma* yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri; (4) nasionalisme adalah *doktrin* yang menyatakan bahwa bangsa sendirilah yang harus dominan diantara bangsa-bangsa lain harus bertindak agresif².

Dari gagasan Boyd C. Shafer dapat dirangkum sebagai aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif nasionalisme dapat muncul dari rasa cinta tanah air dan keinginan untuk merdeka, serta dogma dan doktrin yang diajarkan seseorang atau lembaga tertentu. Namun nasionalisme juga mengandung aspek objektif, yaitu aspek yang ikut berperan dalam

¹ Dicuplik dari tulisan Badri Yatim, *Sukarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta, Inti Sarana Aksara, 1985, hal. 62-63.

² Dicuplik dari tulisan Sutarjo Adi Susilo J. R., *Nasionalisme Italia Pada Abad XIX*, dalam *Nasionalisme di Berbagai Negara*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Sanata Dharma, 1996, hal. 41.

menimbulkan nasionalisme, yang dirasakan sama oleh seluruh bangsa seperti kondisi politik (penjajahan), kondisi kultur (bahasa dan sejarah budaya), kondisi fisis (tanah air dan ras). Baik unsur subjektif maupun unsur objektif tersebut akan memberi wacana khusus terhadap nasionalisme suatu bangsa³.

Nasionalisme pada dasarnya merupakan perasaan cinta terhadap tanah air yang disatukan oleh rasa senasib sepenanggungan, adanya kesamaan sejarah masa lalu, seperti masa kerajaan dan penindasan masa penjajahan yang menyengsarakan rakyat. Kondisi ini menyebabkan tiap individu harus melakukan harmonisasi perbedaan budaya dan agama, untuk mencapai tujuan bersama. Proses harmonisasi memberi pengertian terhadap pentingnya melakukan konsolidasi untuk mencapai persamaan hak, sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perasaan nasionalisme pada dasarnya tidak akan terlepas dengan sebuah bangsa. Bangsa adalah sejumlah penduduk yang tergabung menjadi satu komunitas, yang mendiami satu teritorial serta diikat oleh satu bahasa, kebudayaan dan lembaga-lembaga politik tertentu, mereka mempunyai keyakinan diri, patriotisme dan loyalitas pada kelompok sendiri. Dalam pertumbuhan lebih lanjut, kelompok ini menjadi kesatuan politik, yang bertekad membangun satu *nation state* (negara kebangsaan)⁴.

Bangsa adalah hasil dari integrasi nasional yang merupakan proses menyatunya kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang politico-historis, sosio-kultural, interaksi (transportasi-komunikasi), dan sosio ekonomis,

³ *loc. cit*

⁴ Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya, Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1996, hal. 102.

sehingga menjadi kelompok yang lebih besar daripada kelompok daerah (regional), tetapi bukan kelompok internasional, yang mempunyai identitas berbeda dengan kelompok lain sesamanya⁵. Dari definisi tersebut terkandung pengertian bahwa bangsa merupakan sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu, memiliki kesatuan sosial budaya untuk membangun kesatuan sosial politik secara nasional yang dilandasi oleh rasa nasionalisme, tujuan utamanya untuk pembentukan negara bangsa agar dapat mengatur tujuan dan kepentingan seluruh warga negaranya seturut karakter bangsa.

Pada masa penjajahan, rakyat menjadi bagian dari satu kesatuan dalam lingkungan Hindia Belanda. Pada taraf yang lebih besar satu kesatuan tersebut dapat menciptakan kesatuan pandangan untuk melepaskan kesatuan terdahulu. Langkah tersebut lebih mengarahkan pada pencapaian pembaharuan kesadaran kebangsaan. Apabila taraf ini sudah tercapai, dapat dipastikan akan muncul identitas bertaraf nasional dengan batas teritorial yang ditentukan bersama.

Menurut James G. Kellas, bangsa adalah kelompok orang yang merasa sebagai sebuah komunitas yang dibatasi oleh ikatan sejarah, kebudayaan, dan leluhur yang sama. Bangsa memiliki karakteristik yang “objektif” yang meliputi sebuah daerah kekuasaan bahasa, agama atau keturunan yang sama (walupun tidaklah semua selalu ada) dan karakteristik “subjektif” yaitu pentingnya sebuah kesadaran seseorang akan kebangsaannya dan rasa cinta untuk hal tersebut. Sebagai usaha terakhir adalah kesetiaan tertinggi bagi

⁵ P. J. Suwarno, *Integrasi Negara dan Otonomi Bangsa; Sebuah Tinjauan Historis*, disampaikan pada peringatan Dies Natalis ke XXXIX, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 1994, hlm. 3.

orang yang bersedia mati rela berkorban untuk bangsanya⁶. Karakteristik obyektif bangsa Indonesia terimplementasi pada sumpah pemuda 1928, sedangkan karakteristik subyektif terletak saat perjuangan menolak segala bentuk penjajahan. Perjuangan ini merupakan wujud pertumbuhan nasionalisme Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Pada masa penjajahan nasionalisme merupakan sesuatu yang menonjol selama berlangsungnya perjuangan meraih kemerdekaan, khususnya di kalangan golongan-golongan penduduk yang mempunyai pendidikan ala barat Eropa⁷. Pengertian nasionalisme sebagai ideologi dapat diperjelas dengan mendefinisikan ideologi sebagai pengertian dan ideologi sebagai fungsi. Pengertian ideologi merupakan suatu sistem kepercayaan-kepercayaan, yang dianut bersama oleh anggota-anggota sebuah kelompok, yang berorientasi pada integrasi evaluatif dari kelompok itu. Dengan “interpretasi atas ciri empiris kelompok itu dan atas situasi tempat kelompok itu berada”, proses-proses untuk mengembangkannya sampai keadaannya yang tertentu, tujuan-tujuan yang mengorientasikan secara bersama para anggotanya dan hubungan mereka dengan arus peristiwa-peristiwa di masa depan⁸.

Ideologi sebagai fungsi merupakan alat mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi, sebaliknya ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Dengan demikian ideologi berfungsi sebagai “*solidarity making*” dengan

⁶ James G. Kellas, *The Politics of Nationalism and Ethnicity*, Houndmills, Mac Millan Press Ltd, 1998, hal. 8.

⁷ Lihat dalam. W. Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, terj: Taufik Ibnu Syam, Jakarta, Beunebi Cipta, 1987, hal. 142.

⁸ Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal. 71.

mengikat perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi⁹. Nasionalisme merupakan ideologi yang pada umumnya digunakan oleh bangsa yang sedang dijajah. Upaya memakai nasionalisme sebagai ideologi, berkaitan erat dengan kesadaran tiap individu untuk membangun tatanan yang otonom. Bagi bangsa Indonesia nasionalisme merupakan keharusan, karena dengan adanya nasionalisme kita dapat menyelaraskan segala persepsi dalam wawasan integratif.

Nasionalisme Indonesia dipengaruhi faktor dari luar, salah satunya kemenangan Jepang terhadap Rusia, kemenangan ini memberi bukti bahwa orang Asia dapat mengalahkan orang Eropa, sedangkan faktor dari dalam, muncul setelah pemuda Indonesia mengenal sistem pendidikan yang diterapkan pada masa politik etis. Program politik etis tentang pendidikan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendah pemerintahan kolonial. Perekrutan ini memiliki dua keuntungan, keuntungan pertama para pegawai dari kalangan pribumi dapat mendukung eksistensi pemerintah kolonial Belanda, keuntungan kedua pemerintah kolonial Belanda mendapatkan pegawai pribumi yang dapat digaji murah ketimbang menggaji pegawai Belanda. Konsep ini tidak berjalan semestinya, sebab dengan pendidikan dapat menjadi alat untuk memupuk semangat kebangsaan, sehingga para pemuda mulai mengenal paham baru tentang penentuan nasib bangsa secara mandiri.

⁹ M. Sastrapratedja. SJ, *Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2001, hal. 48.

Dalam menuntut ilmu pada masa penjajahan para pelajar Indonesia tersebar baik di dalam negeri dan luar negeri, seperti di negeri Belanda. Jarak bukanlah menjadi kendala karena mereka selalu mengadakan kontak dengan kawan seperjuangan, kontak yang dilakukan salah satunya melalui penulisan artikel dalam surat kabar. Penulisan artikel dapat menyatukan arah perjuangan kebangsaan untuk melepaskan ikatan eksploitatif bangsa lain. Salah satu pemuda Indonesia yang tinggal di Belanda dengan mengedepankan persatuan dalam mencapai kemerdekaan adalah Mohammad Hatta. Mohammad Hatta lahir di Batuampar Bukit Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama pertama adalah Mohammad Athar, Athar artinya harum, dengan nama panggilan Atta, yang kemudian berkembang menjadi nama baru "Hatta"¹⁰.

Mohammad Hatta memulai jenjang pendidikan di Bukit Tinggi dengan masuk *Europese Lagere School* (ELS) atau sekolah rendah Eropa yang setara dengan sekolah dasar tahun 1913. Pada tahun 1916 Mohammad Hatta melanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang setara dengan sekolah menengah pertama di Padang. Sewaktu tinggal di Padang sempat menjadi sekertaris dan bendahara *Jong Sumatranen Bond* cabang Padang 1918-1919. Tahun 1919 Mohammad Hatta pergi ke Batavia (Jakarta) untuk melanjutkan sekolah di *Prins Hendriks School* (PHS) yang setara dengan sekolah menengah pada penekanan mata pelajaran dagang. Selama menempuh pendidikan di Batavia, Mohammad Hatta aktif dalam organisasi

¹⁰ Ny. Lembang Tuah, Hatta: *Adik dan Kenangan*, dalam, Meutia Farida Swasono (Peny), Bung Hatta, *Pribadinya Dalam Kenangan*, Jakarta, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia, 1980, hal. 5.

Jong Sumatranen Bond dan diangkat menjadi bendahara 1920-1921. Selama menjabat, Mohammad Hatta berhasil mengembangkan penerbitan majalah *Jong Sumatra*.

Pada 5 September 1921 Mohammad Hatta melanjutkan studi ke *Nederlandsche Handels Hogeschool* di Rotterdam. Selama di Belanda Mohammad Hatta mengisi kegiatan senggang dengan aktif dalam organisasi politik *Indische Vereniging* (Perhimpunan India), yang beranggotakan pelajar Indonesia di negeri Belanda. Pada tahun 1925 nama organisasi ini diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya Mohammad Hatta menjabat sebagai bendahara 1922-1925, dan tahun 1926-1929 Mohammad Hatta menjabat sebagai ketua organisasi Perhimpunan Indonesia.

Pada pertengahan tahun 1929 Syahrir masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi politik bercorak nasionalis dengan mendasarkan pada prinsip perjuangan *non-cooperation*, yang dianggap dapat mendukung kemajuan gerakan kebangsaan di Indonesia. Perhimpunan Indonesia menggunakan majalah *Indonesia Merdeka* sebagai alat mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, Mohammad Hatta menjadi editornya dan selalu aktif menulis artikel di luar majalah Perhimpunan Indonesia. *Indonesia Merdeka* merupakan majalah yang memiliki daerah persebaran bukan hanya di kalangan anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Persebarannya telah mencapai Indonesia melalui wakil resmi Perhimpunan Indonesia Sudjaji,

Sudjaji juga berperan dalam mengorganisasi informasi pergerakan kebangsaan di Indonesia.

Perhimpunan Indonesia berperan dalam pembentukan warna nasional Indonesia, dengan penggunaan istilah Indonesia untuk menunjuk suatu daerah yang berada dalam Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia mewujudkan nasionalisme politik bangsa Indonesia dengan mengeluarkan manifesto politik. Manifesto politik mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia dapat semakin maju dalam berbagai bidang, apabila tercapai kesadaran untuk berjuang secara swadaya dan bertanggung jawab.

Mohammad Hatta dan Syahrir aktif dalam menghadiri serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan propaganda kemerdekaan Indonesia. Kegiatan politik Mohammad Hatta dan kawan-kawan dalam Perhimpunan Indonesia, menjadi pusat perhatian pemerintah Belanda terutama tentang pencapaian kemerdekaan Indonesia, sebab jika dibiarkan begitu saja akan membahayakan kedudukan Belanda di tanah jajahan. Untuk menghalangi perkembangan Perhimpunan Indonesia pemerintah Belanda melakukan penahanan enam bulan terhadap Mohammad Hatta dan kawan-kawan dalam Perhimpunan Indonesia (23 September 1927 s/d 18 Maret 1928), dalam putusan pengadilan yang dilakukan 18 Maret 1928 Mohammad Hatta dan kawan-kawan membacakan pembelaan dalam sidang di pengadilan negeri Belanda, upaya ini menghasilkan putusan bebas.

Pada bulan November 1931, Mohammad Hatta dan Syahrir dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia. Dengan alasan melakukan usaha

memecah-belah gerakan kebangsaan, karena memberikan dukungan terhadap sekelompok kecil anggota PNI yang tidak sepakat dengan ide pembubaran PNI¹¹. Setelah Hatta dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia, ia memilih berkonsentrasi dalam studi. Pada tanggal 5 Juli 1932 Mohammad Hatta dapat menyelesaikan ujian doctoral, Syahrir pulang ke Indonesia pada akhir bulan Desember 1931, sedangkan 20 Juli 1932 Hatta kembali ke Indonesia.

Setelah kembali ke Indonesia, Hatta dan Syahrir memperkokoh berdirinya PNI baru (Pendidikan Nasional Indonesia). PNI baru mengedepankan asas persatuan kebangsaan dengan memberikan penanaman nilai untuk menciptakan calon pemimpin yang memegang paham kedaulatan rakyat dan persatuan, asas tersebut dapat mempercepat tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, PNI baru menyelenggarakan ujian bagi para anggota¹². PNI baru merupakan organisasi yang dibentuk karena belajar dari pengalaman pecahnya Partai Nasional Indonesia pimpinan Sukarno, setelah pemimpinnya ditangkap pemerintah kolonial Belanda.

Selama Mohammad Hatta dan Syahrir melakukan serangkaian kegiatan dalam PNI baru, pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawasan terhadap gerakan Hatta dan Syahrir dalam organisasi. Pengawasan ini

¹¹ Jhon Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Terj: Nin Bakdi Soemanto, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1993, hal. 100. Lihat juga, Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 168. Lihat juga, Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta, Tinta Mas, 1979, hal. 243.

¹² Dengan materi: 1. Sejarah umum Indonesia terutama sejarah pergerakan; 2. Masalah imperialisme, kapitalisme kolonialisme dan 3. kedaulatan rakyat. Para instruktur kursus diwajibkan membaca dan memahami isi daulat rakyat, tulisan Mohammad Hatta *Indonesie Vrij*; tujuan dan politik pergerakan nasional Indonesia dan pidato pembelaan Sukarno pada pengadilan di Bandung *Indonesia Menggugat*. Deliar Noer, *op. cit*; hal. 122. Lihat juga, Mohammad Hatta, *op.cit*, hal. 264.

menyebabkan pemerintah kolonial memenjarakan Hatta di penjara Glodok tahun 1934–1935, sedangkan Syahrir di penjara Cipinang. Tahun 1935–1936 Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Boven Digul, Irian Jaya (Papua), tahun 1936-1942 dipindahkan ke Banda Neira, dan bulan Februari 1942 dipindahkan ke Sukabumi. Selama menjalani masa tahanan Mohammad Hatta selalu mengirim artikel untuk surat kabar, serta memberikan dukungan terhadap pengajaran bagi para pemuda setempat.

Pada 8 Maret 1942 Jepang menduduki Indonesia. Selama masa pendudukan, banyak organisasi bentukan Jepang seperti PUTERA, PETA dan Djawa Hokokai. Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat basis pertahanan Jepang di Indonesia. Para pelopor pergerakan kebangsaan seperti Mohammad Hatta dan Sukarno, memanfaatkan momentum ini sebagai sarana melakukan konsolidasi kekuatan nasional, dengan membentuk jiwa nasionalisme Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang berkedok mendukung fasisme Jepang.

Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) didirikan oleh Jepang. Sidang BPUPKI yang dilaksanakan dua kali tersebut menghasilkan rumusan UUD dan falsafah negara. Tanggal 6 Juli 1945 BPUPKI dibubarkan. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan dibubarkan tanggal 29 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan, serta menyelesaikan rancangan UUD dan falsafah negara Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945 Sukarno,

Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat memenuhi panggilan Terauchi sebagai wakil pemerintah pusat Tokyo yang berkedudukan di Dalat, pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk segera memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia¹³. Sekembalinya dari Dalat terjadi peristiwa Rengasdengklok, peristiwa ini memiliki motif untuk mengamankan Sukarno dan Mohammad Hatta dari pengaruh Jepang.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Maeda dirumuskan teks proklamasi, tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sidang PPKI yang diadakan tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan pengangkatan presiden dan wakil presiden Soekarno-Hatta dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini merupakan syarat terpenting dalam pembentukan lembaga pemerintahan untuk negara merdeka¹⁴.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Sukarno dan Mohammad Hatta membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), BKR (Badan Keamanan Rakyat). KNI berada dalam pemerintahan pusat dan daerah yang memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan membantu pelaksanaan pemerintahan. PNI disyahkan sebagai partai tunggal untuk menyatukan berbagai elemen bangsa, namun pada 31 Agustus 1945 pengesahan ini dibatalkan karena dapat dituduh sebagai pemerintahan otoriter, sedangkan BKR pada awal pembentukan berfungsi sebagai polisi.

¹³ Mohammad Hatta merasa bangga karena pernyataan ini bersamaan dengan ulang tahun yang ke 43. Dalam hati kecilku aku menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai hadiah jasaku sekian tahun lamanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mohammad Hatta, *op.cit*, hal. 437. Tentang Teks Proklamasi Indonesia terdapat dalam lampiran 4 halaman 152.

¹⁴ Lihat juga, G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke 20, Jilid I*, Yogyakarta, Kanisius, hal. 89.

Dalam perkembangannya, BKR makin disempurnakan sehingga setelah Hatta berunding dengan Urip Sumohardjo, seorang pensiunan Mayor KNIL pangkat tertinggi orang Indonesia yang pernah diraih dalam KNIL, Hatta mengangkat Urip Sumohardjo sebagai kepala staf tentara keamanan rakyat, pada 5 Oktober 1945. tanggal ini nantinya dijadikan hari TNI¹⁵. Kabinet pertama dilantik oleh Sukarno dan Hatta pada 31 Agustus 1945, yang merupakan kabinet presidensial. Kabinet ini mendapat respon negatif dalam masyarakat, karena dituduh mendapat pengaruh dari Jepang.

Pada 7 Oktober 1945 sebuah petisi yang ditandatangani 40 anggota KNIP dikirimkan pada Sukarno, petisi itu menuntut perubahan status KNIP, bukan hanya sebagai pembantu presiden tetapi menjadi badan legislatif dan para menteri bertanggung jawab kepada KNIP tidak kepada presiden¹⁶. Tindak lanjut dari petisi ini tercermin dalam Maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh Hatta, maklumat ini memberikan dasar tentang perubahan fungsi KNIP menjadi badan legislatif yang dapat menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Tugas harian KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja, yang diketuai oleh Syahrir dan Amir Sjarifuddin sebagai sekretaris¹⁷. Maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 dianggap sebagai langkah awal perubahan ketatanegaraan Indonesia, karena sistem ini dapat menghidupkan fungsi kontrol jalannya pemerintahan, Perubahan ini dapat mempengaruhi

¹⁵ Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangsaaku Pertentangan Sukarno VS Hatta*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 120-121.

¹⁶ P.J. Suwarno, *Tata Negara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hal. 142-143.

¹⁷ *ib.id*, hal, 143. Lihat juga. George McT Kahin, terj: Nin Bakdi Soemanto, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, UNS dan Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 192. Tentang isi dari maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 terdapat dalam lampiran 5 dan 6 halaman 153-154.

sudut pandang dunia internasional terhadap Indonesia, yang memang berniat mewujudkan pemerintahan demokratis.

Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat politik pemerintah 1 November 1945, maklumat ini merupakan Garis Haluan Negara Republik Indonesia yang memberikan penekanan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan perlindungan dan kebebasan terhadap tiap warganegara asing, yang ingin tinggal dan melakukan penanaman modal di Indonesia. Langkah tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan pada dunia internasional, bahwa Indonesia mampu mandiri tanpa campur tangan Belanda.

Hatta mengeluarkan maklumat 3 November 1945 tentang kebebasan pendirian partai politik, dengan maklumat ini diharapkan seluruh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat semakin tersalurkan lewat partai politik. Pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat 14 November 1945 yang memberikan wewenang Syahrir untuk memegang posisi perdana menteri dan membentuk kabinet parlementer, serta memberikan penegasan terhadap pentingnya pelaksanaan pemilihan umum dengan didukung oleh partai politik yang menghormati asas demokrasi. Dengan pengesahan Kabinet Syahrir melalui maklumat 14 November 1945, posisi kabinet presidensiil tidak berfungsi, karena secara substansial telah terjadi perubahan yang terletak pada sistem pertanggung jawaban, dimana kabinet presidensiil bertanggung jawab pada presiden sedangkan kabinet parlementer bertanggung jawab pada parlemen.

Semasa Kabinet Hatta I yang dibentuk tanggal 29 Januari 1948, Hatta menerapkan politik bebas aktif, yang tertuang dalam keterangan pemerintah tertanggal 2 September 1948 dalam sidang BP-KNIP di Yogyakarta. Dalam sidang tersebut Indonesia tidak memihak dalam pertentangan politik internasional, langkah tersebut bertujuan untuk mempertajam tujuan politik luar negeri bangsa Indonesia. Mohammad Hatta menerapkan program reorganisasi dan rasionalisasi dalam kepegawaian dan ketentaraan agar semakin profesional, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Program tersebut mendapat tentangan dari kelompok tentara yang akan didemisionerkan, sehingga menimbulkan reaksi negatif dari beberapa golongan oposisi yang memuncak pada pemberontakan komunis Muso di Madiun dengan didukung oleh FDR (Front Demokrasi Rakyat) pimpinan Amir Sjarifudin. Divisi IV dari Surakarta yang kebanyakan menolak program tersebut. Pemberontakan tanggal 18 September 1948 dapat dipadamkan dengan bantuan tentara dan rakyat. Dampak positif pemberantasan pemberontakan komunis Madiun, berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan dunia internasional, bahwa Indonesia bukanlah basis komunis seperti yang digambarkan oleh Belanda.

Setelah enam bulan berada dalam masa penahanan di Bangka, Hatta kembali ke Yogyakarta dan menerima kembali mandat kepala pemerintahan darurat Mr Syarifudin Prawiranegara. Setelah penyerahan ini terbentuklah Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949. Kabinet Hatta II tidak bertahan lama, sebab berdasarkan konfrensi Antar-Indonesia yang diadakan di Yogyakarta,

terbentuklah Kabinet Hatta RIS dengan Sukarno menjadi presiden RIS dan Hatta menjadi perdana menterinya¹⁸. Pada masa ini Hatta berperan dalam mewujudkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang diratifikasi 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan merupakan wujud pembentukan kesejajaran kedaulatan Indonesia dengan Belanda, sebagai negara yang merdeka secara penuh.

RIS hanya mampu bertahan kurang lebih tujuh bulan, karena dengan bentuk federal banyak terjadi pergolakan di daerah seperti peristiwa Westerling, peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan), peristiwa Andi Aziz. Berdasarkan serangkaian pergolakan yang terjadi, pemerintah pada 17 Agustus 1950 memutuskan kembali pada bentuk negara kesatuan dan Hatta ditetapkan sebagai wakil presiden konstitusional.

Selama menjabat sebagai wakil presiden konstitusional pada pemerintahan parlementer, Mohammad Hatta hanya sebagai pemberi kritik dan saran pada kabinet-kabinet yang pernah dibentuk. Langkah ini merupakan wujud kepedulian Hatta dalam menyumbangkan pokok pemikirannya demi kemakmuran rakyat. Usaha yang dilakukan Hatta ternyata kurang berhasil, karena tidak ada kabinet yang bertahan lama (krisis kabinet) sehingga program kabinet pada masa itu tidak ada yang tuntas secara keseluruhan. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tanggal 1 Desember 1956. Mundurnya Hatta karena alasan posisi wakil presiden dalam sistem parlementer kurang memiliki arti yang besar dan tidak begitu diperlukan.

¹⁸ Tentang daerah-daerah yang menjadi bagian RIS (Republik Indonesia Serikat). Lihat. P.J. Suwarno, *op.cit*, hal.150.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Nasionalisme Mohammad Hatta 1945-1956. Ketertarikan ini didasarkan pada semangat perjuangan Hatta, dalam mewujudkan persatuan nasional Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu, dengan mengedepankan pelaksanaan konstitusi kenegaraan secara konsisten, untuk menuju pada pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam mengungkapkan Nasionalisme Mohammad Hatta penulis mengambil rentang waktu 1945-1956, rentang waktu ini didasarkan pada kemampuan Hatta dalam memadukan dan mengaktualisasikan pokok pemikirannya, demi tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis untuk mendukung perekonomian kerakyatan, serta memantapkan politik dalam dan luar negeri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas untuk mendukung Nasionalisme Mohammad Hatta Antara 1945-1956. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Mohammad Hatta dalam bidang politik dan ekonomi periode 1945-1956 ?
2. Bagaimana hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956 ?
3. Bagaimana pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta dalam bidang politik dan ekonomi antara 1945-1956 ?

C. Tujuan penelitian

1. Menjelaskan peran Mohammad Hatta dalam bidang politik dalam dan luar negeri, bidang ekonomi yang mengacu pada pelaksanaan RE-RA dan penerapan koperasi periode 1945-1956.
2. Menjelaskan hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956.
3. Menjelaskan pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta dalam bidang politik yang berorientasi pada pendidikan politik, bidang ekonomi berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dalam ekonomi antara 1945-1956.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran Mohammad Hatta dalam mewujudkan nasionalismenya terhadap Indonesia, dengan rentang waktu 1945-1956.
2. Bagi mahasiswa sejarah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan tentang nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian lainnya, terutama yang berkaitan dengan Mohammad Hatta.

E. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber untuk menjawab perumusan masalah. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari pada seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diaktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya¹⁹.

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah, buku berjudul *Memoir* terbitan Tintamas, karangan Mohammad Hatta. Buku ini menguraikan tentang lika-liku perjuangan Mohammad Hatta, sebagai bagian dari usaha untuk menegakkan cita-cita seorang nasionalis demi kemajuan bangsa Indonesia. Buku ini memberikan gambaran yang kongkret antara perpaduan pola berpikir dan aktualisasi, sehingga dapat menjadi landasan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kumpulan Karangan Mohammad Hatta jilid 1 – IV, diterbitkan oleh Penerbitan dan Balai Buku Indonesia. Kumpulan karangan Mohammad Hatta memuat berbagai karya tulis yang dimuat dalam berbagai surat kabar dan majalah, selama aktif di organisasi pergerakan kebangsaan dan saat menjabat sebagai wakil presiden. Dalam kumpulan karangan tersebut dapat ditemukan

¹⁹ Louis Gottschlak, *Mengerti Sejarah*, Terj: Nugroho Notosusanto, Jakarta, UI Press, 1975, hal. 32.

berbagai uraian yang menjadi pokok pemikirannya, sehingga dapat menjadi landasan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia.

Buku *Beberapa Pokok Pemikiran Mohammad Hatta*, disunting oleh Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, terbitan Universitas Indonesia. Buku ini memuat berbagai pokok pemikiran Hatta yang dikemukakan dalam forum oleh Hatta dan ditulis dalam surat kabar. Buku tersebut memberikan gambaran akan pokok pemikiran Hatta secara mendasar, untuk mendukung kemandirian Indonesia dalam politik dan ekonomi.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Biografi Politik Mohammad Hatta* karangan Deliar Noer terbitan LP3ES. Buku ini memberikan uraian komprehensif tentang pokok pemikiran Mohammad Hatta yang berpadu dengan idialisme nasional. Sebagai bagian dari penegakkan demokrasi nasional, buku ini juga menggambarkan Hatta sebagai seorang pengkritik ketidaksesuaian dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai Mohammad Hatta meninggal 14 Maret 1980.

Buku terjemahan Hermawan Sulistyio karangan Mavis Rose dengan judul, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, terbitan Gramedia. Dalam buku tersebut memberikan uraian tentang pribadi Mohammad Hatta yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam menuangkan pokok pemikirannya, penulis menganggap Hatta sebagai pemimpin yang kompleks, kekomplekannya ini merupakan karakteristik pribadi Hatta yang menyukai kaidah umum dalam kehidupan bernegara.

Buku karangan George Mc Turnan Kahin, terjemahan Nin Bakdi Soemanto dengan judul *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terbitan Sebelas Maret University Press, memberikan uraian tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemandirian kedaulatan, untuk menghindari campur tangan pemerintah Belanda yang ingin mengontrol kekuasaan di Indonesia. Buku ini merupakan hasil penelitian komprehensif karena pengarang secara langsung meninjau berbagai daerah dan menyaksikan perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan pengakuan kedaulatan.

Buku karangan Adnan Buyung Nasution yang berjudul *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituan 1956-1959*, terjemahan Sylvia Tiwon, terbitan Pustaka Utama Grafiti. Dalam buku ini diuraikan secara komprehensif tentang dinamika politik bangsa Indonesia terutama halaman 1-296. Dinamika yang terjadi merupakan gambaran kehidupan perpolitikan Indonesia, yang selalu mengalami perkembangan dan memiliki kesan tersendiri pada tataran ruang dan waktu. Dinamika politik pada dasarnya saling bertalian satu sama lain, untuk menentukan kelanjutan kehidupan negara Indonesia dalam perpolitikan.

Buku karangan Wawan Tunggul Alam dengan judul *Demi Bangsa Pertentangan Sukarno VS Hatta*, terbitan Gramedia. Menguraikan berbagai perbedaan persepsi antara kedua tokoh nasional Sukarno dan Mohammad Hatta yang dapat berpadu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Dalam perpaduan ini terkadang muncul pertentangan, yang merupakan proses pendewasaan kerangka berpikir kebangsaan walaupun harus dwi tanggal.

Buku karangan G. Moedjanto yang berjudul *Indonesia abad ke-20 jilid I dan II*, terbitan Kanisius. Menguraikan berbagai peristiwa sejarah secara mendalam dan kronologis, sehingga dapat menjadi bahan untuk mendalami peristiwa sejarah secara kronologis antar peristiwa satu sama lain dalam ruang dan waktu.

Buku karangan P.J Suwarno yang berjudul *Tata Negara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern*. Menguraikan pembabakan secara kronologis dan analisis tentang perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Dalam pembabakan ini dapatlah terlihat, dinamika ketatanegaraan Indonesia yang selalu berkembang. Dinamika dalam ketatanegaraan merupakan wujud perkembangan yang menjadi pelajaran bagi generasi mendatang untuk membangun tatanan ketatanegaraan Indonesia kedepan.

Dalam arti sempit nasionalisme adalah perasaan cinta pada tanah air, sehingga nasionalisme merupakan dasar yang menjadi keharusan bagi setiap generasi untuk mempertahankan eksistensi suatu negara. Negara akan semakin berkembang dalam kerangka kesatuan, apabila setiap warga mampu mengembangkan nasionalismenya seturut kemampuannya masing-masing berdasarkan konstitusi negara. Nasionalisme pada dasarnya mengandung berbagai prinsip yang selalu relevan dalam setiap perkembangan zaman, prinsip itu antara lain: 1. Kesatuan (*unity*); 2. kebebasan (*Liberty*); 3. Kesamaan (*Equality*); 4. Kepribadian (*Personality*); 5. Prestasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(*performance*)²⁰. Prinsip-prinsip nasionalisme bila diterapkan secara konsisten akan membawa keseimbangan dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Mohammad Hatta merupakan seorang yang memegang teguh prinsip-prinsip nasionalisme, prinsip tersebut merupakan suatu keharusan sebagai landasan menciptakan kesejahteraan bersama dalam kehidupan negara yang berbhinneka. Mohammad Hatta memandang bahwa untuk mencapai kesejahteraan perlu tercipta konsep pemikiran tentang demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam politik dan ekonomi, untuk menuju keadilan sosial bidang ekonomi.

Kiprah Hatta dalam pergerakan kebangsaan telah terbangun kokoh dan dapat ditemukan melalui Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia, yang mengandung dasar pemikiran tentang pembentukan pemerintahan bertanggung jawab, untuk menuju kemandirian bangsa dengan mengedepankan persatuan. Manifesto politik mengandung dasar pemikiran demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat, oleh sebab itu segala kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada kemauan rakyat²¹. Dengan kedaulatan rakyat, kekuasaan ada ditangan rakyat yang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri melalui lembaga perwakilan, yang dibentuk setelah pelaksanaan pemilihan umum.

Sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat, dengan demikian rakyat diasumsikan paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa: Tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Yogyakarta, Aditya Media, 1994, hal. 16.

²¹ Tim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 8, Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 277.

dari pemerintah²². Menurut Rousseau, dengan perjanjian masyarakat orang menyerahkan kebebasan hak serta wewenangnya (*natural liberty*) kepada rakyat seluruhnya (kesatuan: masyarakat), sehingga suasana kehidupan bernegara dan *natural liberty* berubah menjadi *civil liberty*²³. Kedaulatan rakyat pada dasarnya memberikan kebebasan pada rakyat untuk memberikan pilihan terhadap apa yang menjadi kepentingan dan keinginan rakyat. Kedaulatan rakyat mengandung pemahaman bahwa rakyat bersatu dalam membentuk lembaga perwakilan untuk menuju pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kedaulatan rakyat pada dasarnya memiliki pokok pemikiran bahwa rakyat memiliki wewenang dalam pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to heard to be listened*)²⁴.

Konsep kedaulatan rakyat yang dikehendaki Hatta berorientasi pada

- (1). Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat untuk mencapai mufakat;
- (2). Cita-cita masa protes apabila ada ketidakadilan sehingga rakyat bebas dalam bergerak dan merdeka berkumpul; (3). Cita-cita tolong menolong dalam

²² Arief Budiman, *Teori Negara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 39.

²³ Max Boli Sabon dkk, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 120. Bandingkan pula dengan, Deliar Noer, *Pemikiran Politik Negeri Barat*, Bandung, Mizan, 1997, hal. 164-165.

²⁴ H. S Sulistyanto dan Rika Lidyah, *Good Governance antara Idealisme dan Kenyataan*, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modus, Volume 14 (1), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002, hal. 53. Bandingkan juga dengan Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Terj: Sylvia Tiwon, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 122. Lihat juga Lyman Tower Sargent, *Idiologi-Idiologi Politik Kontemporer*, terj: A.R Henry Sitanggang, Jakarta, Erlangga, 1984. hal. 33

rasa kebersamaan²⁵. Dasar utama kedaulatan rakyat terbangun dari budaya Indonesia yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, konsep daulat tuanku haruslah dihilangkan untuk menuju daulat rakyat yang berjalan di atas semua kepentingan. Dengan berjalannya kedaulatan rakyat dapat dipastikan masyarakat semakin memiliki kesadaran akan posisinya dalam suatu negara. Kesadaran ini tidak serta merta muncul begitu saja, untuk mencapai tahap itu perlu kesadaran dari berbagai pihak untuk menciptakan pendidikan politik bagi bangsa ini secara profesional.

Konsep demokrasi ekonomi Indonesia merupakan pemikiran Hatta yang berorientasi pada peningkatan pendapatan rakyat, konsep ini mengacu pada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang diusahakan pada dasarnya untuk kepentingan rakyat terutama peningkatan kesejahteraan bersama. Ekonomi kerakyatan yang menjadi pokok pemikiran Hatta berlandaskan pada sistem ekonomi koperasi.

Koperasi bukan persekutuan yang didirikan untuk mencari keuntungan melainkan membela keperluan bersama, oleh karena itu koperasi sifatnya persekutuan cita-cita yang sama. Orang mendirikan koperasi kalau tidak ada cita-cita tinggi untuk menjadi pedoman berusaha koperasi tidak bagus jalannya, koperasi yang sebenarnya berdasar pada cita-cita tolong menolong serta keinginannya bantu-membantu dalam kesukaran hidup²⁶. Koperasi

²⁵ Mohammad Hatta, *Kearah Indonesia Merdeka*, dalam *Kumpulan Karangan I*, Jakarta, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, 1953, hal. 75-76.

²⁶ Mohammad Hatta, *Koperasi Yang Sebenarnya dan Yang Bukan*, dalam. Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan III*, *op.cit*, hal. 190.

merupakan sistem ekonomi yang berpadu dengan budaya Indonesia, perpaduan ini menjadi dasar utama dalam rasa kebersamaan yang berasas kekeluargaan. Koperasi merupakan dasar perekonomian Indonesia dalam sistem ekonomi yang memiliki landasan kokoh untuk membangun ekonomi kerakyatan tanpa harus tercipta persaingan. Ekonomi kerakyatan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi rakyat, asalkan rakyat mau berusaha secara mandiri dalam kerangka kerjasama.

Ide pokok pemikiran Hatta dalam kedaulatan rakyat dan ekonomi koperasi merupakan dasar untuk menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial bertujuan memberikan kesejahteraan bersama dalam berbagai aspek, keadilan sosial menjadi aspek yang penting untuk menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat. Keadilan sosial akan tercapai apabila tercipta sinergi yang berlandaskan pada musyawarah mufakat dalam mencapai satu keputusan yang diterima bersama secara *voting*.

Ada lima dimensi dasar yang harus dimengerti untuk mencapai konsensus keadilan: (1). Dimensi kebutuhan dan hak-hak dasar, ini adalah dimensi kesetaraan, dasar persamaan dalam jaminan sosial: memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, hak-hak asasi manusia dalam politik; (2). Dimensi kebebasan yang sama, dimensi ini mengkombinasikan persyaratan dari persamaan dan ketidaksamaan: persamaan kesempatan untuk semua, tetapi harus diperhatikan secara mendalam ketidaksamaan dalam menggunakan kesempatan-kesempatan itu di lingkungan yang lebih luas; (3). Dimensi partisipasi, hal ini juga merupakan kombinasi dari ketidaksamaan dan



kesamaan: persamaan kesempatan untuk bergabung dan berpartisipasi, dimana penggunaannya harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan individu; (4). Dimensi produksi, ini adalah dimensi keadilan dalam ketidaksamaan. Ketidaksamaan ini merupakan hal yang kondusif bagi keseluruhan sistem produksi yang sehat dan merupakan hal yang bisa dianggap syah, karena menguntungkan seluruh masyarakat termasuk mereka yang paling tidak diuntungkan sekalipun (seperti kriteria yang dibuat Jhon Rawls); (5). Dimensi keadilan dalam kewajiban dimana setiap orang bertanggung jawab untuk memberikan sumbangan dan berpartisipasi dalam usaha kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan dan sesama warganya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing²⁷. Lima konsensus yang ada dalam keadilan merupakan landasan ideal untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan sistem kedaulatan rakyat dalam politik dan ekonomi.

Menurut Hatta demokrasi sosial Indonesia didasarkan pada (1) Paham sosialis Barat, yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya; (2) Ajaran Islam, yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang pengasih dan penyayang; (3) Pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme²⁸. Konsep yang ada dalam pemikiran Hatta tentang demokrasi politik dan ekonomi merupakan perwujudan nasionalisme,

²⁷ Thomas Meyer, *Sosialisme-Demokrasi Modern: Kesamaan Landasan dan Issue Yang Di Pertikaikan*, terj: Yurita Metariana, Yogyakarta, CSDS, 2002, hal. 26-27.

²⁸ Wawan Tunggal Alam, *op.cit*, hal. 360.

nasionalisme yang dimiliki Hatta merupakan nasionalisme yang prinsipial sebab berlandaskan pada prinsip dasar nasionalisme Indonesia, jika dipadankan dengan prinsip dasar nasionalisme Indonesia. Definisi nasionalisme Mohammad Hatta mengandung pokok pemikiran (1). Kesatuan (*Unity*): Kemanunggalan rakyat dengan pemerintah; (2). Kebebasan (*Liberty*): Terciptanya tatanan penyampaian aspirasi yang berdasarkan kebutuhan rakyat; (3). Kesamaan (*Equality*): Hidupnya rasa kebersamaan dalam persamaan hak dan kewajiban setiap warganegara; (4). Kepribadian (*Personality*): Berlandaskan Pancasila; (5). Prestasi (*Performance*): Musyawarah untuk mufakat lewat lembaga perwakilan dengan suara terbanyak.

F. Hipotesis

1. Peran Mohammad Hatta dalam politik dan ekonomi periode 1945-1956.

Mohammad Hatta berperan bagi perkembangan politik Indonesia dalam dan luar negeri, terlihat dari berbagai maklumat yang dikeluarkan Hatta. Maklumat itu antara lain: maklumat No X Tanggal 16 Oktober 1945, maklumat pemerintah 1 November 1945, maklumat 3 November 1945 dan didukung dengan maklumat 14 November 1945 dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, kesemua langkah tersebut bertujuan untuk menuju pemerintahan yang demokratis.

Dalam bidang ekonomi, Hatta mencanangkan program reorganisasi dan rasionalisasi, yang bertujuan menghemat keuangan negara dan

memenuhi kebutuhan tentara professional, dengan menawarkan pekerjaan pengganti dalam program rehabilitasi yang dilaksanakan pemerintah. Mohammad Hatta merupakan bapak koperasi Indonesia. Julukan ini sepadan dengan peran Mohammad Hatta karena mencanangkan sistem ekonomi koperasi yang didukung penerapan pasal 33 UUD 1945, untuk mewujudkan kesinambungan antara pemerintah sebagai pelindung perekonomian rakyat dengan rakyat yang secara mandiri mengusahakan kemakmuran bersama melalui koperasi.

2. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956.

Hatta merupakan sosok nasionalis yang mampu melakukan kerjasama dengan tokoh nasional lainnya, seperti hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir. Mereka bertiga memiliki perbedaan karakter pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan, dengan dasar ini persatuan bukanlah barang yang langsung jadi, melainkan harus dirintis atas kesadaran bersama untuk menghargai perbedaan.

Kerjasama Mohammad Hatta, Sukarno dan Syahrir makin nampak bersinergi semasa Kabinet Syahrir, masa Kabinet Mohammad Hatta I. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno mulai memiliki perbedaan prinsip dalam pemerintahan karena Sukarno dianggap kurang menghormati konstitusi negara dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Begitu juga hubungan dengan Sutan Syahrir mulai terjadi perselisihan pandangan karena Syahrir menjadi oposisi, yang disebabkan

dengan berkembangnya pandangan bahwa bukan Syahrir yang melaksanakan KMB dengan sukses²⁹. Perbedaan pandangan dalam perpolitikan merupakan sesuatu yang wajar, namun dalam menyikapinya terkadang muncul ketidakwajaran, sikap itu tidak ada dalam pribadi Mohammad Hatta sebagai seorang nasionalis.

3. Pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta dalam politik dan ekonomi antara 1945-1956.

Dalam perkembangan perpolitikan di Indonesia Hatta memiliki pengaruh yang besar untuk mewujudkan kedewasaan politik, pengaruh ini terlihat dalam kebebasan pendirian partai politik yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik. Penerapan demokrasi di Indonesia telah membuka jalan bagi penerapan pemerintahan yang bertanggung jawab, asalkan tidak terjadi penyimpangan dalam tataran pelaksanaan untuk kepentingan rakyat. Mohammad Hatta memandang bahwa Pancasila dapat menjadi dasar menuju keadilan sosial bidang ekonomi dengan mendasarkan pada UUD 1945 pasal 27, yang memberikan penekanan bahwa keadilan sosial dalam ekonomi diukur atas kepantasan dan kecakapan, sehingga posisi pemerintah menjadi pelindung perekonomian rakyat yang berlandaskan pada ekonomi koperasi untuk menuju masyarakat yang berkeadilan sosial dalam ekonomi.

²⁹ Mohammad Hatta, *Memoir, op.cit*, hal. 559.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah, dengan melalui empat tahapan yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan³⁰. Keempat tahapan ini dapat membantu dalam pengungkapan peristiwa masa lalu secara kritis, analitis dan kronologis dengan dukungan berbagai sumber sejarah baik primer maupun sekunder melalui proses historiografi.

a. Pengumpulan sumber

Pengumpulan sumber yang dilakukan dengan memilah sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah buku karangan Mohammad Hatta, yang telah diterbitkan semasa masih hidup, seperti *Memoir* karangan Mohammad Hatta, terbitan Tintamas, tahun terbit 1978. Sumber sekunder yang digunakan adalah sumber buku yang berhubungan, dengan Mohammad Hatta akan tetapi perlu juga melihat kredibilitas pengarang. Seperti *Biografi politik Mohammad Hatta*, karangan Deliar Noer terbitan LP3ES, tahun terbit 1990.

b. Verifikasi

Setelah sumber terkumpul, penulis melakukan kritik sumber dalam mencari kebenaran menggunakan metode perbandingan dari data primer dan sekunder. Kritik sumber yang dilakukan

³⁰ Louis Gottschlak, *op.cit*, hal. 33-40.

mendasarkan pada kritik intern dan ekstern. Kritik intern mengacu pada usaha mengetahui tingkat kepercayaan isi sumber, sedangkan kritik ekstern mengacu pada usaha mengetahui keaslian sumber dengan melihat dari bahan yang ditemukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kritik intern berdasarkan pada buku sumber karangan Mohammad Hatta yang diterbitkan semasa hidupnya. Kritik ekstern tidak digunakan karena karya Mohammad Hatta yang diterbitkan dalam bentuk buku atas persetujuannya, hal ini didasarkan dari tahun penerbitannya.

c. Interpretasi

Dalam interpretasi perlu dilakukan analisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam pemberian sudut pandang. Unsur subyektifitas dalam penulisan sejarah selalu ada dengan dipengaruhi unsur-unsur lingkungan fisik, biologis, ekonomis, sosial politik, religius dan pandangan hidup, sedikit banyak dapat mempengaruhi sesuai dengan "kacamata atau "selera subjek" yang melingkupinya³¹. Sudut pandang yang digunakan mengacu pada penerapan sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi, dengan memfokuskan pada pokok pemikiran Mohammad Hatta, sebagai wujud nasionalismenya untuk mencapai pendidikan politik dan keadilan sosial bidang ekonomi.

³¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 62-63

d. Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mengacu pada penerapan rekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan fakta, sehingga menciptakan penulisan peristiwa sejarah dengan totalitas secara kronologis, analisis dan sistematis. Skripsi ini berjudul nasionalisme Mohammad Hatta dengan periode tahun 1945-1956.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang menitikberatkan pada pendekatan politik, ekonomi dan sosiologi.

Pendekatan politik yang digunakan mengacu pada pentingnya keserasian pola berpikir untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Mohammad Hatta memandang bahwa penerapan demokrasi yang menjadi dasar pendirian negara haruslah bersandar pada kedaulatan rakyat, dengan memperbesar partisipasi melalui kebebasan pelaksanaan pendidikan politik untuk rakyat.

Pendekatan ekonomi yang digunakan mengacu pada pokok pemikiran Mohammad Hatta tentang pentingnya pelaksanaan ekonomi kerakyatan, yang memiliki makna bahwa rakyat secara mandiri, mengusahakan kesejahteraan dengan mengacu pada penerapan sistem ekonomi koperasi Indonesia, yang berpadu dengan kepentingan bersama untuk mencapai keadilan sosial dalam ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pendekatan sosiologi yang digunakan mengacu pada pengungkapan kebhinekaan rakyat Indonesia. Berdasarkan landasan tersebut para pemimpin nasional diantaranya Mohammad Hatta memanfaatkan keanekaragaman, sebagai kerangka mewujudkan harmonisasi dalam sistem ekonomi dan politik yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Nasionalisme Mohammad Hatta 1945-1956 disusun sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan landasan teori, hipotesis, metode dan pendekatan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang peran Mohammad Hatta dalam bidang politik dan ekonomi periode 1945-1956.

Bab III: berisi tentang hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956.

Bab IV: berisi tentang pengaruh nasionalisme Hatta dalam bidang politik dan ekonomi antara 1945-1956.

Bab V: kesimpulan, berisi jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

BAB II

PERAN MOHAMMAD HATTA PERIODE 1945 - 1956

A. Peran Bidang Politik

1. Politik Dalam Negeri

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1948 telah menjadi bukti pentingnya menciptakan tatanan kemandirian Indonesia, sekaligus sebagai titik awal perjuangan untuk menentukan arah dan tujuan bangsa yang berdaulat. Sehari setelah kemerdekaan PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang - Undang Dasar, mengangkat Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden serta memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan propinsi di seluruh bekas koloni India Belanda¹. Pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan dan diganti dengan KNIP² yang berfungsi sebagai badan pembantu presiden dan membentuk Kabinet Buncho³ yang dilantik tanggal 4

¹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid I*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hal. 89, Tentang Pembagian daerah lihat, P. J. Suwarno. *Tata Negara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hal. 136-137.

² Komite nasional harus berupaya menunaikan empat tugas (1). Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka; (2). Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat; (3). Membantu menentramkan rakyat dan menjaga keselamatan umum; (4). Membantu pemimpin-pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Wawan Tuggul Alam, *Demi Bangsa Pertentangan Bung Karno VS Hatta*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 229.

³ Istilah Kabinet Buncho berdasar pada komposisi kabinet yang terdiri atas kepala-kepala departemen (dalam bahasa Jepang disebut Kabinet Buncho) atau penasehat (sanyo) dalam pemerintahan Jepang, dan karena itu oleh para penentangannya dianggap sebagai kabinet Buncho. Diambil dari Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Terj: Sylvia Tiwon, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 15.

September 1945, dengan tugas memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan baru.

Pada awal-awal kemerdekaan telah terjadi transisi perpindahan kekuasaan, sehingga rakyat memanfaatkan keadaan dengan melakukan serangkaian perebutan persenjataan tentara Jepang. Untuk membentuk organisasi ketentaraan yang memiliki legalitas dari pemerintah, Mohammad Hatta melakukan pertemuan dengan Urip Sumohardjo. Dilain sisi muncul pandangan negatif dari para pejuang yang tidak pernah bekerja sama dengan Jepang terhadap kinerja kabinet pertama, karena dianggap kurang potensial untuk menciptakan kestabilan. Kecaman terhadap pembentukan kabinet pertama paling gencar dikeluarkan oleh Sutan Syahrir, yang terkenal dengan manifesto politik (Perdjoangan Kita), dengan kerangka pemikiran bahwa dalam melakukan perjuangan haruslah melakukan perjuangan yang realistis, tanpa kekerasan terhadap orang asing, berdasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap setiap tindakan. Tujuan Sutan Syahrir mengarah pada penciptaan suasana penuh kepercayaan dari negara lain, agar membantu Indonesia dalam perjuangan meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Pada tanggal 15 September 1945 tentara Inggris mendarat di Tanjung Priok dan di berbagai daerah, dengan tugas melakukan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang, melepaskan tawanan perang Sekutu serta mengamankan keadaan. Dua hari setelah pendaratan tentara sekutu, rakyat Indonesia mengadakan rapat Ikada yang menuntut penciptaan tatanan

pemerintahan yang demokratis. Keberhasilan dalam mengamankan rapat Ikada merupakan kemenangan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta memiliki kepercayaan dari rakyat.

Tentara sekutu ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherland Indies Civil Administration*), dengan melakukan serangkaian teror terhadap rakyat Indonesia. Berawal dari keadaan ini Mohammad Hatta menyampaikan protesnya terhadap Christison agar menghormati pernyataan yang dikeluarkannya pada 1 Oktober 1945 tentang pemberian pengakuan *defacto* bagi pemerintah Republik Indonesia. Dilain sisi pemerintah Belanda memberikan kritikan terhadap komposisi kabinet Indonesia, karena dianggap masih mendapat pengaruh dari Jepang. Untuk menghindari kemungkinan terburuk muncullah berbagai masukan yang tertuang dalam petisi tertanggal 7 Oktober 1945, dengan pokok permasalahan tentang perlunya melakukan perubahan terhadap status KNIP sebagai badan legeslatif. Berbagai masukan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperluas tersalurnya aspirasi rakyat agar memberikan kesan bahwa pemerintahan yang dibentuk berusaha menciptakan tatanan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Petisi 7 Oktober 1945 merupakan kemajuan bagi perkembangan pemerintahan di Indonesia, dimana petisi ini bertujuan untuk memperkecil intervensi pihak sekutu, yang diboncengi NICA dengan alasan pemerintahan otoriter semakin tidak terbukti. Dalam menanggapi petisi

tersebut, Mohammad Hatta sebagai wakil dari pihak pemerintah mengadakan sidang pleno, dengan pokok bahasan perubahan tatanan ketatanegaraan Indonesia menuju pemerintahan yang bertanggung jawab dan diakui keberadaannya oleh dunia internasional.

Sidang pleno sebagai tanggapan petisi 7 Oktober 1945 yang dilakukan Mohammad Hatta menghasilkan maklumat No X 16 Oktober 1945 dengan isi sebagai berikut: 1. Bahwa untuk kepentingan lancarnya pekerjaan maka ditunjuk oleh pemerintah dari anggota KNIP sebuah badan pekerja yang ditugaskan menjalankan pekerjaan sehari-hari; 2. Bahwa kepada KNIP dilimpahkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yakni melaksanakan kedaulatan dan menetapkan garis-garis besar haluan negara selama MPR dan Dewan perwakilan rakyat (DPR) belum terbentuk dengan pemilihan umum⁴. Pada saat yang bersamaan dibentuklah Badan Pekerja untuk urusan harian dalam KNIP⁵, dengan Sutan Syahrir sebagai ketua dan Amir Sjarifuddin sebagai wakil ketuanya, yang memiliki kebebasan untuk mengangkat anggotanya.

Maklumat No X 16 Oktober 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan tindak lanjut dari pasal IV aturan peralihan, yang memberikan landasan bagi jalannya pelaksanaan pemerintahan. Sebelum keluarnya maklumat

⁴ Soejono Martosewojo, *Mahasiswa 45 Prapatan-10: Pengabdian I*, Bandung, Patma, 1989, hal.175.

⁵ Pada tanggal 17 Oktober 1945 keluarlah surat keputusan presiden tentang tugas dan kewajiban badan pekerja yang ditafsirkan sebagai berikut: 1). Ikut ambil bagian dalam menyusun garis-garis besar haluan negara yang luas. Namun badan pekerja tidak berhak ikut campur dalam perincian usaha pencarian kebijakan tersebut karena ini adalah hak tunggal presiden; 2). Bersama-sama dengan presiden menyusun hukum-hukum yang bertalian dengan semua pemerintahan, hukum-hukum tersebut harus dijalankan oleh pemerintah yaitu presiden dibantu para menteri dan para pejabat pembantu masing-masing menteri. George Mc T. Kahin, *op.cit*, hal. 192-193.

No X 16 Oktober 1945, presiden dibantu sebuah komite nasional sebelum terbentuk MPR, DPR dan DPA, sehingga maklumat No X 16 Oktober 1945 merupakan landasan konstitusional untuk merubah susunan dan kedudukan KNIP sebagai badan legeslatif. Maklumat No X 16 Oktober 1945 merupakan jalan bagi perluasan partisipasi rakyat dengan memberikan perimbangan pembagian kekuasaan antara legeslatif dan eksekutif. Berbagai unsur tersebut perlu didukung dengan pembentukan tatanan pemerintahan yang bersumber pada hukum.

Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat politik 1 November 1945⁶ yang mengacu pada prinsip menghargai dan melindungi, berbagai perbedaan yang ada di Indonesia terutama aset orang asing. Dengan dasar tersebut maka orang asing diperbolehkan untuk tinggal dan melakukan investasi di Indonesia, asalkan memberikan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Penciptaan kebebasan dalam melakukan kerjasama dengan negara asing, memberikan bukti bahwa pemerintah Indonesia berusaha menciptakan iklim politik dan ekonomi yang demokratis.

Penciptaan tatanan pemerintahan yang demokratis perlu didukung oleh pembentukan kebebasan pendirian partai politik, sebagai sarana peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran politik. Dengan dasar inilah Mohammad Hatta menerbitkan Maklumat 3 November 1945 yang berisi tentang: 1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena

⁶ Secara keseluruhan isi Maklumat Politik 1 November 1945 dapat dilihat dalam Adnan Buyung Nasution, *op.cit*, hal. 463-468. Terdapat dalam lampiran 7 halaman 155-160.

dengan adanya partai politik itulah segala aliran faham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur; 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946⁷. Bagi bangsa Indonesia, maklumat 3 November 1945 merupakan sarana pendidikan politik sebagai bagian dari fungsi partai politik. Sebelumnya pemerintah pernah menetapkan PNI sebagai partai tunggal namun pembentukan itu dibatalkan. Sistem multi partai yang dituangkan dalam maklumat 3 November 1945 merupakan langkah nyata untuk menciptakan tatanan kebebasan dalam masyarakat, sehingga ditanggapi dengan mendirikan berbagai partai politik yang mewakili semua unsur kelompok dan golongan dalam masyarakat.

Pada tanggal 11 November 1945 BP-KNIP mengusulkan perubahan kabinet yang disesuaikan dengan perwakilan kepartaian dalam KNIP, agar meredam kritikan terhadap komposisi dan kinerja kabinet presidensiil pertama Indonesia. Kabinet tersebut memiliki sifat ganda yaitu masih menjadi bagian dari pemerintahan militer Jepang di Jawa, dan pada saat yang sama menjadi pemerintahan Republik Indonesia merdeka⁸. Berdasar usulan BP-KNIP tanggal 11 November 1945 terjadi perubahan sistem kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, melalui maklumat 14 November 1945. Maklumat 14 November 1945 memberikan janji bahwa

⁷ Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta, Tintamas, 1979, hal. 473. Terdapat dalam lampiran 8 halaman 161.

⁸ Adnan Buyung Nasution, *op.cit.* hal. 15. Berdasarkan kondisi yang berkembang terjadi perubahan kabinet baik secara yuridis sampai tahapan pelaksanaannya secara damai dengan dihadiri Sukarno - Hatta, yang dapat dilihat dalam lampiran 9 dan 10 halaman 162-164

pemerintah Indonesia memiliki kemauan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang menghidupkan lembaga kontrol, melalui lembaga KNIP dan bukan lagi kepada presiden, menegaskan pentingnya kebebasan pendirian partai politik yang akan menjadi syarat terwujudnya pesta demokrasi.

Berdasarkan maklumat 14 November 1945 sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensiil menjadi parlemen, dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir yang memiliki wewenang membentuk Kabinet Syahrir⁹. Pada tanggal 28 Februari 1946 Syahrir mengundurkan diri karena berbagai permasalahan antara lain gerakan oposisi yang dipelopori pendukung Tan Malaka dengan melancarkan program merdeka 100%, munculnya faktor ketidakstabilan dalam masyarakat terutama bentrokan antara Belanda dan rakyat Indonesia, serta komposisi kabinet yang tidak dipercaya.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut Mohammad Hatta melakukan sidang KNIP tanggal 2 Maret 1946 dengan hasil memberikan penunjukan kembali kepada Sutan Syahrir sebagai formatur kabinet.

⁹ Perdana menteri: Sutan Syahrir (Sosial); Menteri Luar negeri: Sutan Syahrir (Sosialis); Menteri Dalam Negeri: Sutan Syahrir (Sosialis); Wakil Menteri Dalam Negeri: Mr Hermani; Menteri Keamanan Rakyat: Mr Amir Sjarifuddin (Sosialis); Wakil Menteri Keamanan Rakyat: AB Murad (Sosialis); Menteri Kehakiman: Mr Suwandi; Menteri Penerangan: Mr Amir Sjarifuddin (Sosialis); Menteri Keuangan: Mr Sunarjo Kolopaking; Menteri Kemakmuran: Ir Darmawan Mangunkusumo; Menteri Perhubungan: Ir Abdul Karim; Menteri Pekerjaan Umum: Ir Putuhena (Parkindo); Menteri Sosial: Dr Adji Darmo Tjokronegoro (Sosialis); Menteri Pengajaran: Dr. Mr TSG Mulia (Parkindo); Menteri Kesehatan: Dr Darmasetiawan; Menteri Negara: H Rasjidi (Masjumi). Program Kabinet Syahrir adalah: 1). Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat; 2). Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan; 3). Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian makanan; 4). Berusaha Mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia. Diambil dari Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 tahun: 1945-1970*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1970, hal. 4.

Dalam sidang tersebut Mohammad Hatta menerangkan dasar tujuan pembentukan kabinet baru yang memiliki 5 pasal: 1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia merdeka; 2. Mempersiapkan rakyat negara di segala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia; 3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis; 4. Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian; 5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya sehingga memenuhi maksud sebagaimana termasuk dalam UUD 1945 pasal 33¹⁰.

Dalam Kabinet Syahrir II telah terjadi peristiwa 3 Juli 1946, yang memiliki keterkaitan dengan menurunnya dukungan terhadap kinerja kabinet karena melakukan penangkapan terhadap pendukung Tan Malaka. Program Kabinet Sutan Syahrir terutama dalam pendirian staf pendidikan politik untuk pengadaan kaderisasi politik, telah dituduh sebagai pemecah ketentaraan Indonesia. Selain itu munculnya perbedaan pandangan antara menteri keamanan rakyat Amir Sjarifuddin dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam pengangkatan komandan divisi, karena kurang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Berbagai peristiwa tersebut menyebabkan sakit hati dari kalangan tentara terhadap Kabinet Syahrir dan menteri Amir Sjarifuddin terutama Mayor Jenderal Sudarsono komandan divisi III dan Sutarto komandan divisi IV. Selain itu adanya faktor

¹⁰ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid I, op.cit*, hal. 160.

kegagalan dalam melakukan diplomasi antara Indonesia dan Belanda, untuk memperjuangkan pengakuan *defacto* Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura. Kegagalan diplomasi telah memunculkan ketidakpercayaan terhadap Kabinet Syahrir, untuk meredam permasalahan tersebut Mohammad Hatta menyampaikan pidato tentang tindakan tegas bagi mereka yang tidak mendukung keputusan pemerintah.

Gejolak yang terjadi dapat ditangani pada saat Soedarsono menemui Sukarno dan Hatta untuk menyampaikan surat dari Jenderal Sudirman dengan tujuan menuntut pembubaran Kabinet Syahrir. Mohammad Hatta menelpon Jenderal Sudirman namun yang menerima Urip Sumohardjo. Dalam percakapan tersebut terbukti bahwa Soedarsono membuat surat palsu dengan mengatasnamakan Jenderal Sudirman. Berdasarkan keterangan palsu dalam surat tersebut maka Soedarsono didakwa sebagai pelaksana *coup* tanggal 3 Juli 1946 yang sebelumnya telah membebaskan para tahanan pemerintah khususnya pengikut Tan Malaka¹¹.

Perjanjian Linggajati dilaksanakan pada 15 November 1946 dengan menghasilkan keputusan, tentang penambahan wilayah Republik Indonesia sampai Sumatera. Pemerintah Indonesia menerima keputusan tersebut dengan tujuan bahwa kemenangan bukanlah diukur atas kepandaian berperang, tetapi kepandaian berdiplomasi dan menghormati hasil persetujuan. Setelah perjanjian Linggajati, Mohammad Hatta berperan bersama Sukarno dalam mengeluarkan peraturan Presiden No. 6 tertanggal

¹¹ Untuk keterangan lebih lanjut lihat. G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid 2, op.cit*, hal. 164-178. Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 296-298. Mohammad Hatta, *op.cit*, hal. 488-490.

29 Desember 1946 tentang penambahan keanggotaan KNIP, untuk memperbesar kepentingan rakyat dalam penyampaian aspirasinya. Penambahan keanggotaan dalam parlemen merupakan wujud perluasan dasar-dasar pemerintahan yang bertanggungjawab, untuk lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Agresi militer Belanda I 21 Juli 1947 telah memberikan bukti bahwa Belanda mengingkari perjanjian Linggajati. Pada saat itu Mohammad Hatta sedang melakukan perjalanannya ke Sumatera untuk memperkokoh persatuan, setelah kembali dari perjalanannya ke Sumatera kondisi Kabinet Amir Sjarifuddin mengalami guncangan dari berbagai pihak. Untuk menghindari krisis kabinet yang berkepanjangan, Sukarno menunjuk Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet sehingga pada tanggal 29 Januari 1948 dibentuklah Kabinet Mohammad Hatta pertama¹².

Pembentukan kabinet presidensiil nampaknya satu-satunya cara menciptakan dengan cepat *leadership* yang kuat karena sangat diperlukan pada waktu itu¹³. Program Kabinet Hatta disusun singkat dan sederhana: 1. Berunding atas dasar (Persejutuan Renville); 2. Melekkaskan terbentuknya

¹² Susunan Kabinet Hatta I adalah: Wakil Presiden dan pemimpin pemerintahan sehari-hari: Drs Moh. Hatta; Menteri Luar negeri: H Agus Salim; Menteri Dalam Negeri: Dr Sukiman (Masjumi); Menteri Pertahanan: Drs Moh Hatta; Menteri Kehakiman: Mr Susanto Tirtoprodjo (PNI); Menteri Penerangan: Moh Natsir (Masjumi); Menteri Keuangan: Mr AA Maramis (PNI); Menteri Persediaan Makanan Rakyat: I. J Kasimo (PKRI); Menteri Perhubungan: Ir Djuanda; Menteri Pekerjaan Umum: Ir Djuanda; Menteri Perburuhan/Sosial: Kusnan (PGRI); Menteri Pembangunan Pemuda: Supeno (PSI); Menteri P.P & K: Mr Ali Sastroamidjojo (PNI); Menteri Agama: KH Masjkur (Masjumi); Menteri Kesehatan: Dr J Leimena (Parkindo); Menteri Negara: Sultan Hamengkubuwono ke IX. Lihat Departemen Penerangan, *op.cit*, hal. 8.

¹³ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1986, hal. 65.

Negara Indonesia Serikat; 3. Rasionalisasi; 4. Pembangunan¹⁴. Program Kabinet Mohammad Hatta, mengacu pada pembangunan Indonesia sektor dalam negeri sehingga perlu melakukan kerjasama dengan KNIP, yang notabenehnya sebagai lembaga legislatif.

Pada masa Kabinet Hatta I, terjadi gejolak politik karena faktor ketidakpuasan terhadap program rasionalisasi yang merugikan kelompok tertentu. Gejolak ini merupakan suatu pukulan hebat bagi kestabilan bangsa Indonesia yang sedang menggalang persatuan, untuk mempercepat kestabilan dalam negeri. Selama bulan Agustus satuan-satuan pro komunis berusaha mengacau keadaan Solo dan sekitarnya, orang-orang yang menantang komunis dibunuh antara lain Dr Muwardi seorang pendiri dan panglima barisan banteng¹⁵.

Gerakan ini merupakan gerakan komunis yang berafiliasi dengan FDR pimpinan Amir Sjarifuddin. Panglima divisi IV/senopati Sumarsono, yang didukung oleh Pesindo dan satuan Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) keluar dari kota Solo dan bergerak ke Madiun¹⁶. Pemberontakan komunis meletus tanggal 18 September 1948, dengan menguasai kota Madiun dan mengklaim sebagai negara Soviet, terlepas dari Republik Indonesia dibawah komando Muso. Sukarno dan Hatta memanfaatkan pemberontakan ini sebagai sarana memobilisasi rakyat

¹⁴ Deilar Noer, *op.cit*, hal. 313. Tentang hasil persejutuan Renville lihat, KML Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hal 36-43.

¹⁵ KML Tobing; *op.cit*, hal. 113.

¹⁶ *ib.id*, hal. 115. Bandingkan juga dengan Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*, Terj: Hasan Basari, Jakarta, LP3ES, 1986, hal. 71.

untuk bersatu dengan tentara, sehingga terbukti dengan kekalahan pemberontakan komunis Madiun tanggal 30 September 1948.

Pemberontakan komunis Madiun merupakan tragedi nasional bangsa Indonesia, selama masa transisi yang penuh ketidakstabilan akibat intervensi Belanda. Kerugian dari gerakan komunis Madiun sangat dirasakan, karena tentara Indonesia yang seharusnya menghadapi berbagai serangan Belanda mengalami kelemahan. Di lain sisi, pemberontakan ini memiliki dampak positif bagi pemerintah Indonesia, karena meningkatkan kepercayaan dunia internasional terutama Inggris dan Amerika Serikat, dalam hubungannya dengan kondisi masa depan Indonesia terlepas dari pengaruh Belanda dapat menjadi negara yang bebas dari komunis.

Agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 telah memberikan bukti terhadap kegagalan pelaksanaan perjanjian Renville, yang ditengahi perantara dari KTN (Komisi Tiga Negara)¹⁷. Setelah agresi militer Belanda yang kedua Sukarno diasingkan ke Berastagi dan dipindahkan ke Prapat pada 1 Januari 1949, sedangkan Mohammad Hatta diasingkan ke Muntok. Sebelum dibawa kepengasingan, Mohammad Hatta telah mengirim pesan pada Sjarifudin Prawiranegara di Bukit Tinggi Sumatera Barat untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

¹⁷ KTN pada dasarnya dibentuk atas usulan dari Amerika Serikat oleh dewan keamanan untuk mengawasi penghentian tembak-menembak, pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota komisi, Belanda memilih Belgia dan keduanya memilih Amerika Serikat, Australia diwakili Richard Kirby, Belgia Paul Van Zeeland dan Amerika Serikat Dr Frank Graham. Komisi Tiga Negara (KTN) dalam masalah militer mengambil inisiatif tetapi dalam masalah politik hanya memberikan saran dan usul, sehingga tidak mempunyai hak untuk memutuskan persoalan politik. Lihat Sartono Kartodirjo, *Sejarah Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, 1977, hal. 49-50. lihat juga KML Tobing, *op.cit*, hal. 158.

Tanggal 6 Januari 1949 Hatta telah diperbolehkan keluar, sehingga memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintah, sehingga dapat mempercepat tercapainya pengakuan kedaulatan Indonesia, Hatta juga mengunjungi Aceh dan bertemu dengan Daud Beureuh.

Mohammad Hatta, Sukarno dan beberapa tawanan lainnya kembali tanggal 6 Juli 1949 ke Yogyakarta, setelah Sultan Hamengkubuwono IX mengamankan Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949 Syarifuddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada Sukarno dan Mohammad Hatta. Pasca penyerahan mandat tanggal 4 Agustus 1949 Hatta menyusun Kabinet Hatta kedua, namun kabinet ini tidak bertahan lama sebab tanggal 19 Desember 1949 Hatta menjadi perdana menteri dalam kabinet RIS (Republik Indonesia Serikat)¹⁸.

Dalam Kabinet RIS, Mohammad Hatta mampu menegakkan kedaulatan Indonesia melalui penerimaan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kestabilan diberbagai bidang. Kemenangan Indonesia dalam pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dipandang sebagai kemajuan yang berarti, sebab dengan pengakuan kedaulatan memberikan tanda bahwa

¹⁸ RIS merupakan hasil kompromi dengan Belanda dalam perundingan-perundingan yang dilakukan selama revolusi, oleh sebab itu RIS dilihat sebagai fase yang tercapai secara maksimal saat itu, tetapi dilain pihak ia merupakan modal untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Deliar Noer, *op.cit*, hal. 374. Tentang Komposisi kabinet RIS Hatta yang pertama dan terakhir Lihat Departemen Penerangan, *op.cit*, hal. 10-11.

bangsa Indonesia dituntut kebersamaannya dalam kerja keras secara mandiri menuju kemakmuran berdasarkan kebijakan politik dalam dan luar negeri.

Republik Indonesia Serikat pada kenyataannya hanya bertahan sekitar tujuh bulan (Januari-Agustus 1950). Selama pemerintahan RIS telah terjadi berbagai pergolakan di daerah, seperti peristiwa Westerling yang ingin membunuh beberapa tokoh penting dimana setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut ternyata Sultan Hamid II berada dibalik peristiwa tersebut. Pemberontakan Andi Aziz dari Makasar, namun dapat digagalkan setelah Andi aziz menyerahkan diri pada 14 April 1950 terhadap pemerintahan RIS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin Soumokil. Selain itu, munculnya perlawanan Tentara Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo terhadap Tentara Indonesia, pemberontakan ini dapat ditumpas dalam waktu yang lama. Usaha tersebut memakan waktu yang lama karena banyak faktor-faktor penghambatnya, diantaranya adalah kerjasama dengan golongan subversif dari pihak Belanda yang juga bertujuan menggulingkan pemerintah Republik Indonesia. Mereka mendapat bantuan perlengkapan dan senjata dari kaum subversif itu¹⁹.

Berawal dari adanya desakan dari rakyat untuk kembali pada negara kesatuan semakin kuat, Mohammad Hatta memandang perlu melakukan perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan. Untuk mempersiapkan langkah menuju negara kesatuan, diadakan

¹⁹ Sartono Karthodirjo, *op.cit*, hal. 83.

pertemuan tanggal 19 Mei 1950 dengan keputusan membentuk satu sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki landasan konstitusional baru. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat telah berubah menjadi negara kesatuan dengan Sukarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Posisinya sebagai wakil presiden dalam pemerintahan parlementer merupakan posisi yang dilematis, namun Mohammad Hatta memberikan sumbangan besar dalam pemikirannya menuju profesionalitas kerja bagi ketentaraan dan pegawai pemerintahan.

Pada masa Kabinet Natsir pernah disahkan P.P No 39 Tahun 1950 mengenai pemilihan dewan perwakilan daerah dan kotapraja, P.P No 39 tahun 1950 merupakan pokok pemikiran perdana menteri Mohammad Hatta²⁰. Konsep pemilihan perwakilan daerah dan kotapraja merupakan wujud perluasan demokrasi Indonesia. Berdasarkan konsep ini, diharapkan rakyat memiliki kedewasaan dalam mencapai pemerintahan yang terwakili dalam parlemen sehingga mengerti kebutuhan tiap daerah. Dalam kenyataannya P.P No 39 tahun 1950 dicabut karena mosi Hadikusumo (PNI) dan menjadi salah satu penyebab jatuhnya kabinet Natsir²¹.

Pada periode 1950-1956, di Indonesia telah lima kali mengalami pergantian kabinet karena seringnya pergolakan kepentingan antar partai, yang didahului dengan penarikan wakil partai politik dalam kabinet dan berakhir pada pergantian kabinet. Pada periode ini, arti dan kedudukan Mohammad Hatta telah mengalami perubahan, ditambah dengan seringnya

²⁰ Lihat catatan kaki dalam Marvis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. Terj: Hermawan Sulistyono, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 315.

²¹ Sartono Karthodirdjo, *op.cit*, hal 85-86. Lihat juga Marvis Rose, *op.cit*. hal. 299.

krisis kabinet yang menyebabkan menurunnya wibawa pemerintah. Keadaan ini memunculkan dilema bagi posisi Mohammad Hatta karena kedudukannya kurang memiliki pengaruh, dalam membentuk tatanan yang berdasarkan profesionalitas.

Pandangan Mohammad Hatta tentang profesionalitas dapat terwujud apabila terdapat tiga macam langkah yang harus dicapai melalui: (1). Mengadakan suatu pemerintahan yang cakap dan mempunyai kewibawaan, terdiri daripada orang-orang yang disegani yang sanggup mengembalikan moralitet politik yang sudah hilang; (2). Melaksanakan suatu pemerintahan yang efisien, dipusat maupun didaerah; (3). Pembagian yang tepat antara pusat dan daerah didasarkan atas sistem otonomi yang demokratis, bebas dari pertimbangan hierarki dan pembagian keuangan yang adil²². Pemikiran ini sangat relevan untuk menciptakan kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, sehingga gejolak yang terjadi didaerah dapat diredam. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat merupakan kunci utama dalam pembentukan *good governace*, sehingga perlu didukung dengan pembentukan pegawai pemerintahan yang memiliki profesionalitas dan integritas.

Kewibawaan pemerintah pada 17 Oktober 1952 mengalami guncangan karena dipicu luapan kekesalan tentara Indonesia, khususnya angkatan darat atas campur tangan sipil terutama parlemen dalam masalah

²² Deliar Noer, *op.cit*, hal. 499.

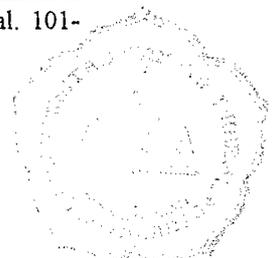
intern. Tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh presiden sehingga berdampak pada pencopotan A.H. Nasution dalam posisinya sebagai kepala staf angkatan darat dan digantikan oleh Bambang Sugeng²³. Dari peristiwa ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa, ketentaraan Indonesia seharusnya memfokuskan pada konsep pemikiran Mohammad Hatta, yang berorientasi pada pentingnya penerapan profesionalitas ketentaraan. Militer seharusnya berada diantara dua pilar pembentuk tentara, yaitu rakyat dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia mengalami krisis kepercayaan karena pemberontakan yang dipimpin T.M Daud Beureuh. Menanggapi peristiwa ini Hatta mengirim dua utusan untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan melakukan pembicaraan damai dengan pihak Daud Beureuh²⁴, walaupun mengalami kegagalan.

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap, proses pemilihan umum Indonesia pertama mengalami keberhasilan, pemilihan baru dapat terwujud karena alasan keamanan dalam negeri²⁵. Pemilihan umum pertama di Indonesia menurut Hatta tidaklah memiliki hasil yang memuaskan karena tidak ada partai pemenang mutlak. Mohammad Hatta memandang bahwa pelaksanaan pemilihan umum pertama, kurang mengarah pada perimbangan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

²³ Untuk keterangan lebih jelas lihat dalam Deliar Noer, *op.cit*, hal. 429. Lihat juga, A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 3*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal. 163-175.

²⁴ Daud Beureuh merupakan tokoh Aceh, ia pada tahun 1939 menjabat ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), tahun 1948 diangkat menjadi komandan divisi X komandemen Sumatera, pada tahun 1949 pemerintah Republik Indonesia mengangkatnya menjadi gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Di cuplik dari. Tim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 3*, Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, 1989, hal. 344.

²⁵ Tentang daftar kursi perolehan dalam pemilihan umum pertama Indonesia lihat. Badruzzaman Busyairi, *Boerhanoedin Harahap Pilar Demokrasi*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1989, hal. 101-102.



Mohammad Hatta merupakan sosok seorang nasionalis Indonesia yang memiliki keteraturan dalam pemikiran dan tindakan, yang senantiasa disesuaikan dengan melihat realitas. Bukti dari kedewasaan politik terlihat pada saat Mohammad Hatta meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden, pada tanggal 1 Desember 1956 pada pemerintahan parlementer dengan UUDS 1950 sebagai landasan konstitusional. Alasan mundurnya Hatta terletak pada tidak adanya efektifitas, fungsi dan wewenang posisi wakil presiden dalam sistem pemerintah parlementer.

2. Politik Luar Negeri

Mohammad Hatta berperan dalam menciptakan tatanan pemerintahan bertanggung jawab, dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap rakyat dan dunia internasional. Setelah diangkat menjadi wakil presiden pertama, Mohammad Hatta melakukan serangkaian langkah pendemokrasian Indonesia yang didasarkan atas keinginan rakyat. Puncak keinginan rakyat dalam memberikan kritik terhadap keberadaan kabinet presidensiil pertama, terimplementasi dalam rapat Ikada yang dihadiri wakil dari pemerintah.

Pasca rapat Ikada Mohammad Hatta berperan dalam mengeluarkan berbagai keputusan yang terlihat dalam maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945, maklumat 1 Nopember 1945, maklumat 3 Nopember 1945 dan maklumat 14 Nopember 1945, dengan memberikan harapan terhadap pentingnya mengadakan pemilihan umum yang jujur dan adil bagi

perwujudan pelaksanaan demokrasi. Berbagai maklumat yang dikeluarkan atas peran Mohammad Hatta merupakan perwujudan kepeduliannya, dalam menciptakan tatanan pemerintahan demokratis dan bertanggung jawab, sehingga penerapan demokrasi dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional khususnya Inggris dan Amerika.

Dalam menciptakan kepercayaan terhadap dunia internasional Mohammad Hatta berperan mengeluarkan maklumat 1 Nopember 1945. Maklumat ini merupakan suatu pernyataan sebuah negara merdeka yang berdaulat untuk memberikan perlindungan, serta membuka kerjasama dengan negara lain termasuk Belanda. Kerjasama dapat berjalan apabila tercipta pemerataan kemakmuran rakyat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk melatih pekerja Indonesia. Dengan begitu Mohammad Hatta mengacu pada penciptaan kerjasama saling menguntungkan, yang berlandaskan pada politik bebas aktif. Konsep politik bebas aktif merupakan landasan untuk melakukan kerjasama, yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan rakyat dengan saling menghormati kedaulatan.

Prinsip mendasar politik luar negeri bebas aktif telah terwujud dalam bentuk kerjasama Indonesia dan India, yang mengarah pada penciptaan kestabilan dan kemerdekaan bagi setiap bangsa. Menurut Mohammad Hatta hubungan Indonesia dan India sangat besar pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia, sehingga dalam melakukan kerjasama antar negara haruslah menjalin hubungan yang berdampak pada penciptaan perdamaian dunia. Konsep ini akan terlaksana apabila terbangun perasaan

saling pengertian, sehingga memiliki kemauan yang besar untuk membantu seperti kerjasama Indonesia dengan India.²⁶

Keseriusan kerjasama Indonesia dan India telah terjalin lama terutama bantuan India dalam politik diplomasi untuk mengangkat permasalahan tentang sengketa Indonesia-Belanda, melalui DK-PBB dan konferensi internasional lainnya. Hubungan ini berlanjut dalam penawaran imbal dagang pada pertengahan April-Juni 1946 dalam hasil pertanian khususnya beras Indonesia yang berbobot 7.000 ton dengan peralatan pertanian dan tekstil dari India. Keberhasilan dalam melakukan kerjasama bidang ekonomi merupakan wujud kemandirian pemerintah Indonesia sebagai bagian dari negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga membantu Indonesia menentang propaganda pemerintah Belanda.

Setelah perjanjian Linggajati dengan pengakuan wilayah yang meliputi Jawa, Madura dan Sumatera, negara-negara tetangga memberikan dukungan terhadap Indonesia dengan memberikan pengakuan kekuasaan secara *de facto*²⁷. Kegagalan diplomasi dalam perjanjian Linggajati dibuktikan pada agresi militer Belanda pertama yang berusaha mengepung

²⁶ Menurut Hatta tanda-tanda dan isyarat-isyarat sejarah dewasa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan India sudah dekat. Segera India yang merdeka, yang terjalin dalam ikatan-ikatan persahabatan yang paling intim dengan Indonesia yang merdeka akan memberikan contoh pada seluruh dunia tentang bagaimana bangsa-bangsa seharusnya hidup dalam persahabatan dan pengertian. PRS Mani, *Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah*, Terj: Lamy Kristono, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 122

²⁷ Negara-negara yang memberikan pengakuan *de facto* atas Indonesia antara lain Inggris 31 Maret 1947, Amerika Serikat 17 April 1947, Mesir 11 Juni 1947, Libanon 29 Juni 1947, Suria 2 Juli 1947, Afganistan 23 September 1947, Burma 23 November 1947, Saudi Arabia 24 November 1947, Yaman 3 Mei 1948, Rusia 26 Mei 1948, India dan Pakistan (Pada waktu itu kedua Negara itu belum secara resmi menerima kedaulatan dari Inggris) negara-negara tersebut kemudian membuka perwakilan konsuler di Republik Indonesia. Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid 1, op.cit*, hal. 184.

Indonesia dengan melakukan penghancuran dalam bidang politik, ekonomi, militer. Sesudah agresi militer pertama Syahrir menyampaikan pidatonya dalam sidang DK PBB di Lake Succes, New York, dengan mengangkat permasalahan tentang agresi militer pertama. Langkah yang diambil Sutan Syahrir mendapat tanggapan positif, sehingga Belanda mendapat kecaman dari India dan Australia untuk segera mungkin diadakan kompromi dalam DK-PBB. Tindak lanjut dari usulan tersebut tertuang dalam keputusan Amerika Serikat untuk membentuk badan pengawas, yang independent dan mewakili kepentingan tiap anggota. Pada akhirnya DK PBB mendukung pembentukan badan pengawas yang independent dan terimplementasi dalam komisi jasa-jasa baik, yang anggotanya antara lain Belgia mewakili Belanda, Australia mewakili Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga, pada 25 Agustus 1947 komisi ini baru tiba di Indonesia akhir Oktober²⁸.

Dukungan dunia internasional terhadap Indonesia untuk melaksanakan perundingan dengan Belanda, terwujud dalam pertemuan Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Di lain sisi hasil persetujuan Renville mendapat berbagai kecaman dari kalangan partai politik, karena dianggap merugikan Indonesia. Sebaliknya pihak Indonesia menerima persetujuan tersebut dengan alasan untuk memperbaiki kondisi militer yang melemah, meningkatkan simpati pada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang mengutamakan diplomasi.

²⁸ Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid 2, op.cit*, hal. 17.

Sekembalinya Hatta melakukan konsolidasi dengan rakyat di Sumatera dan melakukan kunjungan rahasia ke India, Hatta ditunjuk untuk menyusun kabinet, karena Kabinet Amir Sjarifuddin mengalami krisis dukungan dalam BP-KNIP, sehingga Amir Sjarifuddin mengembalikan mandatnya pada tanggal 23 Januari 1948.

Mohammad Hatta membentuk kabinet yang meliputi orang-orang Masyumi, PNI paling dominan, Partai Katolik, Kristen dan anggota-anggota partai sosialis²⁹. Kabinet Mohammad Hatta memberikan landasan kokoh dalam penancangan politik luar negeri Indonesia, yang tertuang dalam penyampaian keterangan pemerintah kepada BP-KNIP di Yogyakarta tanggal 22 September 1948 (Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan semenjak 4 Januari 1946). Dalam keterangan ini Mohammad Hatta berpendapat bahwa politik luar negeri Indonesia, haruslah berdasarkan pada pencapaian kepentingan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertentangan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri yaitu Indonesia merdeka seluruhnya³⁰.

Dasar politik luar negeri Indonesia mengacu pada landasan kebutuhan pada masa itu dan menjadi landasan yang kokoh pada masa

²⁹ George Mct Kahin, *op.cit*, hal. 292.

³⁰ Sri Edi Swasono, Fauzie Ridjal (Pany), *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 30. Lihat juga Mohammad Hatta, *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Jakarta, Tinta Mas, 1953, hal. 16.

yang akan datang. Landasan kebutuhan pada masa itu mengandung pokok pemikiran tentang pentingnya memfokuskan penciptaan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, sehingga dapat mempercepat pengakuan kedaulatan secara *de jure*, sedangkan tujuan jangka panjang untuk menciptakan tatanan perdamaian dunia.

Landasan politik luar negeri Indonesia pada tanggal 18 September 1948 mengalami ujian yang berasal dari pemberontakan Komunis pimpinan Muso, dengan mengklaim Madiun sebagai pusat kekuasaan yang terlepas dari Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut merupakan sesuatu yang dilematis bagi pemerintah, karena pemerintah sedang giat-giatnya menepis anggapan bahwa tanpa Belanda dapat menciptakan tatanan yang demokratis. Keberhasilan dalam menumpas pemberontakan komunis Muso di Madiun semakin meningkatkan kepercayaan dunia internasional, khususnya Inggris dan Amerika Serikat yang pada saat itu sedang terjadi perbedaan persepsi ideologi dengan Uni Soviet.

Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Sumatera dengan tujuan menghentikan konflik di daerah, sekaligus melakukan konsolidasi persatuan agar siap menghadapi serangan dari pihak Belanda. Anggapan itu ternyata memang terjadi setelah kembali ke Yogyakarta pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 dan mengasingkan pemimpin Indonesia seperti Sukarno-Hatta. Langkah yang diambil Belanda dalam agresi militer yang kedua

mendapat kecaman dari berbagai negara³¹. Dalam menyikapi perkembangan hubungan Belanda dan Indonesia DK-PBB membahas permasalahan tersebut pada sidang Dewan Keamanan tanggal 22 Desember 1948 yang dihadiri wakil-wakil dari India, Australia, Filipina dan Indonesia.

Pemerintah Belanda mendapatkan kritikan dari berbagai wakil Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Uni Sovyet, Inggris dan Kanada. Sidang dewan keamanan ini ditutup pada tanggal 24 Desember 1948 dan menghasilkan keputusan: (a). Segera menghentikan peperangan dan tembak-menembak; (b). Segera membebaskan presiden RI, wakil presiden dan semua pejabat tinggi pemerintah republik yang ditahan sejak 19 Desember 1948; (c). Dewan menugaskan KTN untuk segera mengirimkan laporan terinci mengenai perkembangan politik dan militer di Indonesia sejak 12 Desember 1948 dan tentang pelaksanaan pasal a dan b resolusi ini³².

Pada 1 Januari 1949, Mohammad Roem dan Ali Sastroamijoyo ditahan bersama Hatta di Sumatera. Selama penahanan, Hatta dan Sukarno selalu menerima kunjungan dari beberapa delegasi untuk membicarakan rencana penyerahan kedaulatan melalui dialog antara pemimpin Republik

³¹ Amerika Serikat melalui departemen luar negerinya menanggapi agresi militer Belanda II dengan pernyataan cara Belanda menangani Indonesia itu patut disayangkan kalau kita pertimbangkan efeknya terhadap Belanda sendiri, efeknya terhadap hubungan mereka dengan Indonesia dimasa depan dan efeknya terhadap sistem Amerika Serikat dalam mengendalikan perdamaian; juga kalau kita pertimbangkan bahayanya terhadap kerjasama Amerika Serikat dengan Eropa Barat dalam masalah seperti ERP (Bantuan Marshal) dan Pakta Atlantik. Jan Bank, *Katolik di Masa Revolusi Indonesia*, Terj: Nicolette P Ratih, Peny: Moniq Soesman dan Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta, Grasindo, 1999, hal. 650.

³² KML Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville*, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hal. 195-196.

Indonesia dengan BFO³³. Pada 24 April 1949, Hatta berangkat ke Jakarta dan sehari kemudian menemui Van Royen untuk melakukan pembicaraan tentang posisi Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia, dan tanggal 7 Mei 1949 Cocharn mensponsori terbentuknya persetujuan Roem Royen. Mohammad Roem sebagai delegasi Indonesia, sedangkan Van Roijen sebagai wakil delegasi Belanda dengan menghasilkan keputusan: (1). Mengeluarkan perintah agar pasukan-pasukan bersenjataanya menghentikan perang gerilya; (2). Bekerjasama dalam mengembalikan kedamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan; (3). Berpartisipasi dalam suatu KMB di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang nyata tanpa syarat dan penuh kepada RIS³⁴.

Setelah pemerintahan PDRI pimpinan Mr Syariffudin Prawiranegara, Sukarno dan Hatta memiliki kesepakatan dengan keputusan perjanjian Roem-Royen, beberapa pemimpin yang ditawan seperti Sukarno, Mohammad Hatta dan beberapa yang lainnya kembali ke Yogyakarta pada 13 Juli 1949, dan melakukan serah terima mandat dari PDRI pimpinan Mr Syariffudin Prawiranegara pada 13 Juli 1949. Untuk menindaklanjuti keputusan dalam perjanjian sebelumnya diselenggarakan konferensi antar Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta, dengan konferensi ini dihasilkan

³³ BFO (*Bijeen Komist Voor Federaal Overleg*) adalah negara boneka yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, dalam usahanya mendirikan Republik Indonesia Serikat. Tim, *op.cit*, hal. 344.

³⁴ George Mct Kahin, *op.cit*, hal. 536. Lihat juga, Ide Anak Agung, *Pernyataan Rum-Van Royen 7 Mei 1949*, Surakarta, UNS Press, 1995, hal. 84-85. Perlu diketahui PDRI menyetujui hasil pembicaraan Roem Van Royen dengan syarat: 1). TNI tetap berada dalam daerah-daerah yang diduduki; 2). Tentara Belanda harus ditarik dari daerah-daerah yang diduduki; 3). Pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta harus tanpa syarat. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Jakarta, PT Kinta, 1974, hal. 281.

keputusan: (1). Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat; (2). RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada dewan perwakilan rakyat; (3). Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat); (4). Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia³⁵.

Untuk mempersiapkan tercapainya kesepakatan dalam konferensi Antar-Indonesia dibentuklah kabinet Hatta RIS yang pertama dan terakhir 19 Desember 1949, sedangkan posisi Sukarno pada masa itu sebagai presiden RIS. Dalam Kabinet RIS Mohammad Hatta memiliki prestasi yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama dengan dilaksanakannya pengesahan persetujuan KMB. Sebelumnya telah diangkat delegasi Indonesia untuk melaksanakan pertemuan KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dan diratifikasi dalam sidang KNIP. Setelah diratifikasi Hatta berangkat ke Belanda, untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari pemerintah Belanda di Amsterdam pada 27 Desember 1949.

Pengakuan kedaulatan yang diterima oleh Indonesia merupakan jalan keluar bagi bangsa Indonesia untuk meraih pengakuan *deyure* dan *defacto* dari negara-negara tetangga. Dengan diterimanya keputusan KMB oleh pemerintah Indonesia, terjadi perubahan dalam bentuk negara dari

³⁵ P. J. Suwarno, *op.cit*, hal. 148.

Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat yang meliputi 16³⁶ negara bagian dengan landasan konstitusional UUD RIS yang bersifat sementara dan dasar negara Pancasila.

Dengan perubahan ketatanegaraan dari RI menjadi RIS bukan berarti kekalahan terhadap Indonesia oleh Belanda, melainkan kemenangan atas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, walaupun posisi Republik Indonesia masuk menjadi bagian dari RIS. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kepercayaan pada dunia internasional untuk menumbuhkan anggapan Indonesia adalah negara yang berkemauan menjaga kestabilan dunia. Setelah pengakuan kedaulatan, selama beberapa minggu berikutnya negara besar di dunia memberikan pengakuan *de jure* pada Indonesia. Dalam waktu lima bulan Rusia dan RRC mengikuti cara itu, dan tidak lama kemudian Indonesia dimasukkan kedalam PBB sebagai anggota ke 60³⁷.

Pemerintahan Mohammad Hatta dalam Republik Indonesia Serikat banyak menemui kesulitan karena pergolakan di daerah yang ingin melepaskan diri dari RIS. Pergolakan ini disinyalir sebagai bagian dari propaganda Belanda yang sepenuhnya tidak menginginkan penyerahan kedaulatan. Belanda secara illegal membantu kegiatan-kegiatan subversive

³⁶ 16 negara bagian itu adalah: (1) Negara RI dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville 17 Januari 1948; (2) Negara Indonesia Timur; (3) Negara Pasundan termasuk distrik Federal Jakarta; (4) Negara Jawa Timur; (5) Negara Madura; (6) Negara Sumatra Timur dengan pengertian bahwa status quo Asahan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatra Timur tetap berlaku; (7) Negara Sumatra Selatan. Satuan-satuan Negara yang tegak sendiri, yaitu; (8) Jawa Tengah; (9) Bangka; (10) Belitung; (11) Riau; (12) Kalimantan Barat (daerah istimewa); (13) Dayak Besar; (14) Daerah Banjar; (15) Kalimantan Tenggara dan (16) Kalimantan Timur. P.J. Suwarno, *op.cit*, hal. 150.

³⁷ George Mct Kahin, *op.cit*, hal. 565

untuk mengacaukan stabilitas keamanan, seperti dalam peristiwa Westerling yang merupakan suatu peristiwa nyata tentang keterlibatan Belanda. Ketidaksetujuan ini didasarkan pada pemimpin RIS yang berasal dari orang Republik (golongan Republikan), setelah diusut tuntas Sultan Hamid II (golongan Federalis) berada dibalik peristiwa ini, sedangkan Westerling berhasil meloloskan diri dengan bantuan angkatan laut Belanda.

Peristiwa Andi Azis seorang mantan KNIL, gerakan ini dapat diselesaikan setelah Andi Azis datang ke Jakarta memenuhi panggilan perdana menteri Mohammad Hatta, dan mendapat hukuman 10 tahun. Peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan) yang digerakan oleh orang-orang KNIL dan peristiwa Darul Islam yang juga diduga melakukan hubungan dengan orang-orang KNIL. Faktor reorganisasi KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger*) dan penarikan KL (*Koninklijk Leger*) untuk bergabung membangun RIS, baik dalam kemiliteran dan pemerintahan. Penggabungan ini secara otomatis merupakan masalah yang rumit dalam menerapkan profesionalisme kepegawaian, terutama sektor-sektor publik agar tercipta kepercayaan bahwa kedaulatan berada dalam tangan rakyat.

Pada tanggal 13 Maret 1950 pemerintahan Hatta memperkenalkan sistem nilai dari ratio 1:1 antara mata uang Belanda dengan Indonesia menjadi 1:3 sejauh menyangkut urusan ekspor impor, dan transaksi lain³⁸.

³⁸ Mavis Rose, *op.cit*, hal. 294.

Keputusan ini merupakan suatu kemajuan bagi perkembangan perekonomian Indonesia, sebab mata uang Indonesia mengalami kenaikan nilai tukar, karena patokan kurs yang dipakai telah beralih pada dolar Amerika. Pada tanggal 19 Maret 1950 Hatta mengeluarkan keputusan mata uang kertas f 2,5 dipotong sepenuhnya dan ditukar dengan mata uang kertas dan obligasi baru, seluruh deposito bank yang jumlahnya melebihi f 400 harus dibagi dua, yang setengah masuk kepada pemerintah sebagai pinjaman wajib³⁹. Tujuan dari program ekonomi Mohammad Hatta dalam RIS, berorientasi pada peningkatan modal, karena memang dibutuhkan pada masa itu.

Kinerja pemerintahan RIS dibawah perdana menteri Mohammad Hatta mengalami perbaikan yang signifikan, sehingga dapat meminimalisasi krisis ekonomi dan mempercepat munculnya anggapan tentang penciptaan kestabilan ekonomi masa Republik Indonesia Serikat. Selain itu Indonesia mengenal proses industrialisasi karena penanaman modal asing, walaupun Belanda masih memiliki prioritas dalam kedudukannya sebagai mitra dagang dengan Indonesia sesuai dengan persetujuan KMB

Republik Indonesia Serikat mengalami banyak guncangan dari berbagai pihak untuk kembali pada negara kesatuan. Rencana ini mendapatkan dukungan dari Mohammad Hatta sehingga dilakukanlah penandatanganan piagam kembali pada Negara Kesatuan Republik

³⁹ *ibid*, hal. 294-295.

Indonesia. Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden dalam pemerintahan parlementer. Pada masa kabinet parlementer, Mohammad Hatta sering memberikan masukan dan kritikan terhadap kinerja kabinet, terutama masa Kabinet Sukiman yang melakukan penandatanganan kerjasama dalam ekonomi dengan Amerika Serikat (*Mutual Security Aids*), antara menteri Subarjo dan Cochran duta besar Amerika Serikat di Jakarta. Kerjasama ini menurut Mohammad Hatta telah merusak citra politik bebas aktif karena Indonesia terikat dengan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo, bangsa Indonesia berhasil memperluas kerjasama dalam penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dengan disponsori lima negara seperti India, Pakistan, Burma, Srilanka, Indonesia. Mohammad Hatta berpandangan bahwa konferensi Asia-Afrika merupakan suatu wujud kesatuan baru yang harus menciptakan perdamaian dunia secara konsisten. Dampak dari konferensi Asia-Afrika cukup berarti bagi Indonesia, terutama dalam perjuangan Indonesia untuk menghadapi tekanan Belanda dalam masalah Irian Barat.

Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo mengalami krisis dukungan di parlemen, digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap yang berhasil melaksanakan pemilihan umum Indonesia dengan sukses. Sebenarnya pelaksanaan Pemilihan umum telah dipersiapkan oleh kabinet terdahulu, namun karena kondisi keamanan dan seringnya timbul krisis kabinet, rencana ini baru dapat terlaksana. Keberhasilan dalam pelaksanaan

pemilihan umum, telah meningkatkan kepercayaan dunia internasional, terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi pertama Indonesia.

B. Peran Bidang Ekonomi

1. RE-RA

Pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin tercapai persetujuan penandatanganan perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville membawa dampak negative bagi bangsa Indonesia sebab daerah Indonesia dalam perjanjian Renville menjadi sempit karena garis Van Mook. Garis Van Mook telah membagi daerah kekuasaan Indonesia di pedalaman Sumatera, dan dua daerah di Jawa, Jawa tengah bagian Selatan dan karisidenan Banten di bagian paling Barat pulau Jawa⁴⁰.

Berdasarkan penerimaan keputusan Renville, Kabinet Amir Sjarifuddin mengalami goncangan dari berbagai partai politik yang menarik wakil mereka dalam kabinet yang menyebabkan krisis kabinet. Sepulang dari kunjungannya ke Sumatera, Mohammad Hatta mendapatkan tugas menjadi formatur kabinet tanggal 29 Januari 1948 dengan program⁴¹ yang memfokuskan pada pengentasan masalah sosial. Sesuai dengan perjanjian Renville menjelang bulan Februari 1948 dihijrahkanlah 25.000 TNI dari kantong-kantong di Jawa ke daerah republik yang disusul

⁴⁰ Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hal. 163.

⁴¹ Program Kabinet Hatta I mengacu pada: 1). Berunding atas dasar (persejutan) Renville; 2) Melekaskan terbentuknya NIS; 3). Rasionalitas; 4). Pembangunan; Lihat Deliar Noer, *op.cit*, hal. 313.

kemudian oleh beratus-ratus ribu pengungsi yang meningkat sampai lebih dari sejuta⁴².

Dengan melihat kondisi yang memberatkan Indonesia karena banyaknya jumlah tentara dan pengungsi, Mohammad Hatta melaksanakan program rasionalisasi dalam ketentaraan dan kepegawaian untuk menuju profesionalitas. Tindak lanjut dari keinginan Mohammad Hatta tertuang pada tanggal 2 Februari 1948 dengan mengeluarkan maklumat pemerintah tahun 1948 No 2 dan No 3 tentang kedudukan pegawai Republik Indonesia⁴³. Pengumuman pemerintah tersebut memberikan kebebasan terhadap para pegawai Republik Indonesia untuk bekerja dengan pemerintah pendudukan Belanda. Keputusan tersebut dapat menjadi jalan keluar terhadap surplus pegawai pemerintah, sebab dengan mentolerir para pegawai untuk bekerja dengan Belanda, bukan berarti mereka kehilangan nasionalisme pada Indonesia tetapi mereka dapat belajar cara kerja kepegawaian pemerintah pendudukan Belanda. Keputusan tersebut dapat memunculkan kepercayaan pada Indonesia dari pengamat asing tentang posisi Indonesia yang bersedia menghormati hasil perjanjian dengan menumbuhkan semangat diplomatik.

Pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin sebelum mengalami krisis kabinet telah tersusun rencana untuk melakukan pembenahan dalam

⁴² AH. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia, Jilid 2*, Jakarta, Seruling Masa, 1968, hal. 123.

⁴³ Untuk mengetahui secara jelas tentang isi Maklumat Pemerintah tahun 1948 lihat, *ib.id*, hal. 117-118.

ketentaraan Indonesia⁴⁴, rencana tersebut telah sampai pada tahapan pengesahan oleh presiden Sukarno untuk merubah posisi ketentaraan Indonesia dibawah koordinasi menteri pertahanan, namun tahap pelaksanaannya dijalankan oleh Kabinet Mohammad Hatta I, yang bertujuan untuk penghematan keuangan negara, melalui demobilisasi pasukan secara bertahap⁴⁵. Dengan demobilisasi bukan berarti pemerintah lepas tangan setelah mereka tidak menjadi tentara, tetapi pemerintah berusaha memberikan lapangan pekerjaan baru yang disesuaikan potensi-potensi tiap daerah dan disesuaikan dengan ketrampilan tiap orang. Dengan cara inilah pemerintah merasa, bahwa rakyat dituntut keikutsertaanya dalam menumbuhkan perekonomiannya secara mandiri.

Pada bulan Maret 1948 program rasionalisasi mulai dijalankan dengan perbandingan antara senjata dan tentara sebagai berikut: 4:1 dan untuk brigade mobil 1:1. Opsir-opsir menurunkan pangkatnya satu tingkat sehingga TNI tinggal tiga Jenderal yaitu panglima besar Sudirman jadi Letnan Jenderal, Letnan Jenderal Urip Sumohardjo tetap, Hardjowardojo

⁴⁴ Pembentukan ketentaraan Indonesia bermula dari BKR (Badan Keamana Rakyat), dalam kenyataannya BKR tidak berjalan efektif, sehingga dirubah tanggal 5 Oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan tujuan masih sama memelihara keamanan dalam negeri, Urip Sumohardjo diangkat oleh Hatta sebagai kepala markas besar umum TKR, pada 1 Januari 1945 pemerintah mengganti nama TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan kementerian keamanan menjadi kementerian pertahanan, pada 26 Januari 1946 presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang merubah Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya melalui penetapan presiden 5 Mei 1947 diputuskan untuk mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu organisasi tentara, setelah itu dengan penetapan presiden 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Lihat Wawan Tunggul Alam, *op.cit*, hal 472. Bandingkan juga dengan Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hal. 10-19.

⁴⁵ Kabinet Mohammad Hatta berpandangan bahwa reorganisasi dan rasionalisasi perlu terwujud dengan demobilisasi 160.000 orang angkatan perang, sehingga nantinya tinggal 57.000 orang prajurit reguler yang memiliki profesionalitas terlatih dengan senjata lengkap dan tidak buta huruf, program rasionalisasi pada nantinya akan diperluas pada lingkungan administrasi pemerintahan, kelebihan personel akan dikeluarkan dan akan ada integrasi organisasi secara umum. Bandingkan dengan George Mct Kahin, *op.cit*. hal 331-332. Lihat juga. Ulf Sundhaussen, *op.cit*. hal. 68-69.

di Bukit Tinggi tetap menjadi Mayor Jenderal, pangkat tertinggi dibawah Mayor Jenderal ialah Kolonel⁴⁶. Keputusan Hatta melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi dalam ketentaraan Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari BP-KNIP dalam dengar pendapat dengan menyampaikan pandangannya tentang tujuan dilaksanakannya RE-RA.

Untuk memperlancar program pokok Kabinet Mohammad Hatta I mulailah dilakukan demobilisasi pasukan terutama di Sumatera, keenam divisinya dicituk menjadi tiga, ketujuh divisi di Jawa dicituk menjadi empat divisi, divisi yang berada di front Barat, divisi yang berada di front Utara, divisi yang mempertahankan front Timur; *Kesatuan Reserve Umum* yang terdiri dari divisi Siliwangi yang tidak ditugaskan untuk mempertahankan front tertentu⁴⁷. Dengan pembagian tersebut setiap tentara yang tergabung dalam tiap divisi semakin mengerti tugas dan daerah territorial pengamanannya. Disamping itu, tentara Indonesia semakin terkontrol dalam kesatuan komando sehingga mempercepat penyelesaian tugasnya masing-masing dengan profesionalisme ketentaraan.

Mohammad Hatta berpendapat bahwa program yang ada harus didahului dengan melakukan perimbangan melalui: 1). Mengurangkan pengeluaran negara; 2). Memperbesar masuknya pajak; 3). Memperbesar produksi; 4). Mengadakan *sanering* uang berhubungan dengan banyaknya uang palsu beredar dan dengan merosotnya nilai uang kita⁴⁸. Dasar

⁴⁶ Mohammad Hatta, *op.cit.*, hal 528. Bandingkan juga dengan Deliar Noer, *op.cit.* hal 325-326. Lihat juga AH. Nasution, *op.cit.*, hal. 174-176.

⁴⁷ Bandingkan dengan Ulf Sundhaussen, *op.cit.* hal. 69.

⁴⁸ Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (Peny), *op.cit.*, hal. 35.

perimbangan ini mengacu pada pentingnya meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai berbagai masalah sosial karena pengungsian dan blokade ekonomi Indonesia. Program pembangunan yang dicanangkan kabinet Hatta haruslah berjalan seiring dengan reorganisasi dan rasionalisasi tentara⁴⁹. Terhitung mulai tanggal 1 April 1948 diserahkan kepada menteri pembangunan dan pemuda penyelenggaraan urusan-urusan mengenai: 1). Pemberian pekerjaan; 2). Transmigrasi; 3). Pendidikan tenaga muda dalam suatu vak; 4). penempatan tenaga akibat rasionalisasi⁵⁰. Apabila program dari RE-RA dapat dilaksanakan dengan baik, dipastikan muncul kestabilan ekonomi dalam negeri dan meningkatnya profesionalisme ketentaraan Indonesia.

Berbagai pekerjaan pengganti dalam dinas ketentaraan membutuhkan semangat kerja keras. Mereka yang terkena demobilisasi tidak menyukai pekerjaan tersebut sebab telah muncul pandangan bahwa pekerjaan di luar dinas ketentaraan bukanlah pekerjaan prestisius. Dilihat dari sisi keuangan negara, banyaknya anggota ketentaraan Indonesia merupakan beban tersendiri, ditambah dengan munculnya pengungsian, blokade ekonomi, serta pendirian negara boneka yang telah melanggar

⁴⁹ Sebagai jalan keluar dari pelaksanaan rasionalisasi Kabinet Mohammad Hatta menawarkan lapangan pekerjaan atas kerelaan yang bersangkutan. Bagi mereka diberi kebebasan bila ingin kembali ke pekerjaan semula, ada yang diserahkan kepada kementerian pembangunan pemuda, untuk dilatih dan dipekerjakan pada berbagai badan atau objek usaha seperti penggergajian kayu dar pembuatan barang-barang kayu, ada yang dikembalikan ke desa-desa dengan perhitungan seluruhnya 100.000 orang. Tiap desa menampung 10 orang yang dapat membantu desa dan sebaliknya dibantu desa, mereka yang dikembalikan ini memperoleh 3 bulan gaji waktu berhenti. Deliar Noer, *op.cit*, hal 326-327. Bandingkan dengan Mohammad Hatta, *Memoir, op.cit*, hal. 528.

⁵⁰ AH. Nasution, *op.cit*, hal. 228.

persetujuan Renville⁵¹. Puncak penyelewengan Belanda terjadi pada saat pengusiran semua pegawai Republik Indonesia termasuk pegawai sekretariat delegasi di Jakarta ke daerah RI tanggal 24 Agustus 1948 dengan alasan melaksanakan perayaan proklamasi 17 Agustus 1948 di gedung Proklamasi Jakarta⁵²

Pelaksanaan RE-RA dalam ketentaraan mendapat kecaman paling kuat dari kelompok FDR pimpinan Amir Sjarifuddin. Perubahan posisi Amir Sjarifuddin dalam RE-RA ketentaraan merupakan suatu dilema, sebab Amir Sjarifuddin merupakan penggagas RE-RA dan Kabinet Hatta hanya sebagai pelaksananya. Sikap oposisi yang dilancarkan Amir Sjarifuddin ternyata didukung oleh PKI dan sebagian dari korban demobilisasi RE-RA.

FDR (Front Demokrasi Rakyat) pada dasarnya memiliki dua rencana untuk menghancurkan posisi Kabinet Mohammad Hatta pertama, rencana pertama yaitu melakukan propaganda dengan memprovokasi pemogokan buruh perkebunan tebu di sekitar Klaten terutama di daerah Delanggu. Pemogokan tersebut tidak membawa hasil yang diharapkan Amir Sjarifuddin, karena Kabinet Mohammad Hatta dapat menyelesaikan

⁵¹ Isi perjanjian Renville: 1). Persejutan gencatan perang (senjata) yang antara lain berisi ketentuan diterimnya garis demarkasi Van Mook; 2). Dasar-dasar politik Renville (*Renville Princlipes*) yang pada pokoknya berisi kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN; 3). Enam pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap ditangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak NIS. Lihat G Moedjanto, *Indonesia Abad ke: 20, Jilid 2, op.cit, hal. 22.*

⁵² Lihat, Deliar Noer, *op.cit, hal 315.*

lewat perundingan⁵³. Rencana kedua FDR adalah memberikan penawaran negosiasi dalam program nasional yang terdiri dari 4 pasal: 1). Pembatalan persetujuan Renville; 2). Penghentian perundingan-perundingan dengan Belanda sampai mereka menarik diri dari bumi Indonesia; 3). Nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa pemberian ganti rugi; 4). Pembubaran kabinet presidensiil Hatta dan pembentukan kabinet parlementer, dimana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi penting⁵⁴

Mohammad Hatta memandang program nasional FDR sepadan dengan programnya, kecuali usulan dalam program nomor empat yang tidak perlu dilakukan segera sehingga tidak perlu melakukan perombakan kabinet. Kegagalan dalam penerimaan program nasional telah mendorong pihak oposisi khususnya FDR untuk merintis kemenangan melalui jalan inskonstitusional dengan penggunaan kekuatan dari rakyat, petani miskin, buruh, Pesindo, tentara resmi pemerintah yang menaruh simpati pada FDR dan menarik kembali tentara masyarakat yang pernah dibentuk oleh Amir

⁵³ Kesejajaran sikap FDR dengan SOBSI telah memperjelas hubungan antara FDR dengan SOBSI, baik secara formal maupun *defacto*. Secara formal telah terbukti bahwa mata rantai hubungan FDR dengan SOBSI dan Sarbupri itu memang ada dan telah memperoleh pengakuan. Secara organisator adalah organisasi buruh yang berada dalam FDR dan Sarbupri adalah *underbouw* dari SOBSI. Dengan demikian dapat dikatakan pada hakekatnya telah memiliki wewenang sah untuk mengendalikan Sarbupri, secara *defacto* pemogokan Delanggu adalah pemogokan kaum buruh yang secara formal menjadi anggota Sarbupri. Lihat. Sarjana Sigit Wahyudi, *Ketika SARBUPRI Menguncang Pabrik Karung Delanggu 1948: Sebuah Study Awal Pemberontakan PKI Madiun*, Semarang, CV Aini, 2001 hal 112. Bandingkan dengan George Mct Kahin, *op.cit*, hal. 336.

⁵⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20, Jilid 2, op.cit*, hal. 31.

Sjarifuddin namun sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintah, akibat terkena rekonstruksi dan reorganisasi dari Kabinet Hatta⁵⁵.

Oposisi FDR terhadap pemerintah ternyata menjadi tidak terarah sehingga tidak segan-segan melakukan serangkaian propaganda terhadap ketidakmampuan Kabinet Hatta dalam mengatasi masalah ekonomi. Pada saat sedang hangatnya oposisi FDR terhadap Kabinet Hatta, datanglah seorang tokoh penting PKI Muso yang kembali ke Indonesia pada 3 Agustus 1948 melalui Bukit Tinggi dan tiba di Yogyakarta 11 Agustus 1948. Selain itu, FDR ternyata mendapat dukungan dari divisi IV (Panembahan Senopati) yang memang mendapat giliran demobilisasi. Dengan keikutsertaan Divisi IV dari Surakarta maka daerah-daerah yang bergolak dan mendukung propaganda oposisi semakin meluas seperti Pacitan, Wonogiri, Cepu, Blora, Purwodadi, Madiun, dimana sejak awal berada dibawah komando Brigade 29 (Ex Biro Perjuangan)⁵⁶.

Surakarta menjadi pusat pergolakan antara pasukan Siliwangi dengan pasukan divisi IV yang didukung kelompok PKI dan Pesindo. Peristiwa ini menewaskan Dr Muwardi ketua barisan banteng dan GRR⁵⁷ yang pro pasukan Siliwangi. Berawal dari rumitnya masalah ini, diangkatlah Kolonel Gatot Soebroto tanggal 16 September 1948 sebagai gubernur militer di Surakarta dengan tugas mengamankan situasi dan

⁵⁵ Sarjana Sigit Wahyudi, *op.cit*, hal. 151.

⁵⁶ Lihat AH. Nasution, *op.cit*. hal. 238.

⁵⁷ Perlu diingat bahwa barisan banteng telah memiliki markas di Surakarta dan memiliki 3000 orang bersenjata serta telah dimasukkan dalam angkatan perang semi otonom, barisan banteng ini merupakan kelompok yang berafiliasi dengan GRR pimpinan Tan Malaka. Kelompok Tan Malaka telah dibebaskan (amnesti) oleh presiden Sukarno pada ulang tahun Ke 3 kemerdekaan RI Lihat George Mct Kahin, *op.cit* hal 336, bandingkan pula dalam. G. Moedjanto, *op.cit*, hal. 35.

mengambil tindakan hukum bagi yang tidak disiplin. Selang empat hari setelah perang saudara antara Divisi IV yang didukung FDR dan pasukan Siliwangi yang didukung barisan banteng memuncak pada pemberontakan komunis Madiun pimpinan Muso pada tanggal 18 September 1948.

Mohammad Hatta dan Sukarno melakukan berbagai konsolidasi dalam menumpas pemberontakan komunis Madiun yang didukung oleh Brigade 29 dengan komandan Kolonel Dachlan serta Divisi IV yang melarikan diri dan bergabung dengan pasukan gerakan komunis di Madiun. Untuk memperjelas permasalahan dalam pemberontakan komunis Muso yang didukung pula oleh Amir Sjarifuddin, presiden Sukarno melakukan pidato yang intinya pilih Sukarno-Hatta atau komunis Muso. Selain itu, presiden Sukarno memerintahkan pasukannya untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Amir Sjarifuddin. Dari penggeledahan ditemukan dokumen yang memuat rencana FDR/PKI tertanggal 5 Februari 1948⁵⁸.

Pemberontakan komunis Madiun menambah derita rakyat sebab banyak korban yang berjatuh dari peristiwa ini, baik dari orang-orang pemerintahan dan pemimpin keagamaan. Pemberontakan komunis Madiun tidak bertahan lama, sebab banyaknya dukungan yang diperoleh pemerintah dari pasukan Siliwangi serta pasukan dari Jawa Timur yang dipimpin Major Jonosewojo, dan dipimpin panglima besar Sudirman dan

⁵⁸ Tentang Isi Dokumen tersebut dapat dilihat dalam. Tim Jawa Pos, *Lubang-Lubang Pembantaian*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990, hal. 12-14.

A.H. Nasution sehingga dapat merebut kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai komunis.

Dukungan terhadap kepemimpinan Sukarno-Hatta terbukti dalam penumpasan gerakan komunis Madiun yang mendapatkan legalitas dari BP-KNIP. Melalui pengesahan UU pemberian kekuasaan penuh kepada presiden tentang keadaan bahaya tertanggal 20 September 1948 di Yogyakarta selama tiga bulan⁵⁹, pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat diamankan kembali. Keberhasilan dalam menumpas pemberontakan komunis Madiun 1948 merupakan jalan terbaik dalam memperkuat ketahanan nasional. Pelaksanaan rencana RE-RA dalam ketentaraan tidak berhasil, namun bagi pendukung pemberontakan komunis Madiun dari laskar dan tentara yang dahulu menolak demobilisasi (tetapi tidak semua), telah menjadi tahanan pemerintah karena terkait peristiwa Madiun sehingga kehilangan posisinya dalam ketentaraan. Muso terbunuh 29 November 1948, empat hari kemudian beberapa tokoh lainnya telah tertangkap termasuk Amir Sjarifuddin.

Pelaksanaan program RERA dalam ketentaraan membawa luka psikologis bagi mereka yang terkena demobilisasi. Apabila dipandang dari sudut ekonomi pelaksanaan program tersebut dapat menghemat keuangan negara, sebab orang-orang yang terkena demobilisasi akan berkarya di luar dinas ketentaraan asalkan memiliki kemauan untuk mengisi lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Mohammad Hatta menunjukkan

⁵⁹ Tentang isi Undang-undang dapat dilihat dalam, I Wangsa Widjaja, Meutia F Swasono, *Kumpulan Pidato Mohammad Hatta: Dari Tahun 1942 sampai dengan 1949*, Jakarta, Yayasan Idayu, 1981, hal. 263-267.

keberhasilan pemerintahannya dengan menyatakan bahwa meskipun dalam situasi darurat pemerintah berhasil memperluas sawah dengan 75.000 hektar, membentuk berbagai koperasi pertanian mengendalikan harga-harga dan mencegah penimbunan⁶⁰.

2. Koperasi

Bangsa Indonesia perlu membangun suatu konsep ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Konsep ekonomi Pancasila yang menjadi dasar perekonomian Indonesia pada kenyataannya terdapat pada sistem ekonomi koperasi. Koperasi berasal dari kata-kata “Ko” yang artinya “Bersama” dan operasi yaitu “Bekerja”, jadi koperasi artinya sama-sama bekerja, perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerjasama dalam mencapai tujuan⁶¹. Mohammad Hatta memandang bahwa sistem ekonomi koperasi dapat diterapkan sebagai dasar perekonomian kerakyatan yang berlandaskan Pancasila. Sistem ekonomi koperasi dapat berjalan secara baik dan membawa kemakmuran bagi anggotanya apabila ditangani secara professional, koperasi merupakan suatu organisasi yang sesuai dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Gagasan tentang koperasi itu sendiri telah dikenal di Indonesia sejak akhir abad 19 dengan dibentuknya organisasi swadaya (*self help organization*) untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan pegawai dan petani oleh patih Purwokerto Tirto Adi Suryo yang kemudian dibantu

⁶⁰ Mavis Rose, *op.cit*, hal. 254.

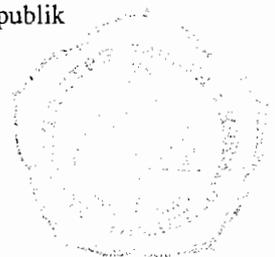
⁶¹ Mohammad Hatta, *Koperasi*, Jakarta, PT Pembangunan, 1954, hal. 1.

pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Koperasi yang timbul dan mencapai puncak perkembangannya pada tahun 1933 bukanlah hasil pembinaan pemerintah, melainkan dibangun oleh gerakan kebangsaan yang dipimpin kaum cendekiawan⁶². Koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Dengan dasar ini perekonomian rakyat yang berlandaskan pada sistem ekonomi koperasi semakin mengalami perkembangan karena berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Setelah merdeka, pemerintah menetapkan dasar hukum perekonomian Indonesia dalam landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi: 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶³. Pasal 33 UUD 1945 mengacu pada pembentukan usaha untuk menghidupkan perekonomian Indonesia yang bertumpu pada asas kekeluargaan.

⁶² M Dawam Rahardjo, *Apa Kabar Koperasi Indonesia*. Dalam Rikard Bangun (Editor), *Bung Hatta*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, hal. 326. Setelah merdeka pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya, dalam kongres itu di putuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi, serta mengajurkan diadakannya pendidikan koperasi dikalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Arifin Sitio, Halomoan Tambu, *Koperasi Teori dan Praktika*, Jakarta, Erlangga, 2001, hal. 11.

⁶³ Majelis Perwusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2002, hal. 62-63.



Mohammad Hatta berpandangan bahwa koperasi memenuhi keperluan bersama, bukan mencari keuntungan, koperasi sebenarnya berdiri atas dua tiang yaitu solidaritas setia bersekutu dan individualitas⁶⁴. Pandangan Mohammad Hatta tentang pentingnya memberdayakan ekonomi rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sehingga pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia yang terimplementasi dalam koperasi membutuhkan kerangka kerjasama dengan dilandasi semangat saling menghargai antar anggota.

Koperasi merupakan suatu jalan menuju kemandirian ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dalam koperasi, tiap individu dituntut untuk bertanggung jawab agar tercipta kemauan untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Pemerintah dalam pelaksanaan sistem ekonomi koperasi berkedudukan sebagai pengawas dan pembuat aturan dasar tentang tatanan perkoperasian, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan secara konstruktif.

Mohammad Hatta membagi koperasi dalam tiga macam: 1). Koperasi konsumsi; 2). Koperasi kredit; 3). Koperasi produksi⁶⁵. Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang dijalankan atas kebutuhan masyarakat Indonesia. untuk menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari. Koperasi kredit merupakan usaha bersama yang menyediakan kemudahan dalam

⁶⁴ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi I*, Jakarta, Perpustakaan Perguruan P. P & K, 1954, hal. 126.

⁶⁵ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi I*, Jakarta, Perpustakaan Perguruan P. P dan K, 1957, hal. 127.

peminjaman uang dengan pengembalian secara angsuran, dalam pelaksanaan sistem kredit tiap anggota diwajibkan memiliki semangat menghargai peraturan yang berlaku agar jalannya ekonomi koperasi sesuai rencana. Koperasi produksi merupakan suatu usaha bersama dalam menghasilkan produk, sehingga hasil produksi yang tersedia dapat digunakan bersama, seperti hasil-hasil pertanian dalam masyarakat pedesaan serta hasil perkebunan.

Bentuk-bentuk koperasi ini merupakan pembagian yang didasarkan atas bidang usaha menuju pada peningkatan kesejahteraan bersama, diukur atas keaktifannya dalam berkarya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Koperasi Indonesia memiliki fungsi khas yaitu: 1). Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat; 2). Alat pendemokrasian ekonomi nasional; 3). Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia; 4). Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat⁶⁶. Sistem ekonomi koperasi Indonesia merupakan sistem yang dapat membawa pada kemandirian perekonomian rakyat dengan mengacu pada peningkatan profesionalitas manajemen, peningkatan semangat kesetiakawanan yang humanis dan memegang teguh prinsip keadilan sosial.

Koperasi Indonesia memiliki sendi-sendi dasar yang mengacu pada: 1). Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga

⁶⁶ Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia: Sistem Koperasi*. Ada dalam Kamarlsyah dkk, *Panca Windu Gerakan Koperasi*, Jakarta, Dekopin, 1987, hal. 195.

negara Indonesia; 2). Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi; 3). Pembagian hasil usaha diatas menurut jasa-jasa masing-masing anggota; 4). Adanya pembatasan bunga atas modal; 5). Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya; 6). Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka; 7). Swadaya, swakarsa dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar percaya pada diri sendiri⁶⁷. Sendi-sendi dasar dalam koperasi merupakan suatu perwujudan keterbukaan koperasi itu sendiri terhadap berbagai golongan dan kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar pembentuk perekonomian kerakyatan Indonesia.

Mohammad Hatta melihat bahwa koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan pribadi. Seterusnya koperasi mengandung dasar pendidikan kepada anggotanya ke jalan berbakti dan bertanggung jawab dalam hal mengurus keperluan bersama. Di atas bangunan-bangunan koperasi itu diadakan pimpinan pemerintah untuk mengkoordinir segala usaha produktif koperasi bagi keselamatan masyarakat⁶⁸. Pandangan Mohammad Hatta tentang koperasi Indonesia merupakan pemikiran tentang pelaksanaan demokrasi ekonomi Indonesia, yang memungkinkan, setiap orang mengembangkan daya kreativitasnya.

Dengan dasar ekonomi yang berlandaskan pada koperasi setiap anggota

⁶⁷ *ibid*, hal 196. bandingkan juga dalam Mohammad Hatta, *Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*. Ada dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan, Jilid III*, Jakarta, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1945, hal. 220-221.

⁶⁸ Mohammad Hatta, *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*. Ada dalam. Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, *op.cit*, hal. 6.

memiliki tanggung jawab untuk berdiri bersama dalam membawa kemajuan koperasi, karena tiap orang yang tergabung didalamnya dapat belajar untuk menjadi seorang yang koperatif.

Koperasi Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam peningkatan jumlah koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi ini tidak terlepas dari peran Mohammad Hatta dalam memberikan dukungan terhadap gerakan koperasi Indonesia⁶⁹. Gerakan koperasi merupakan jawaban terhadap posisi masyarakat Indonesia untuk memperbesar modal pembangunan yang belum terlaksana secara merata akibat gejolak di daerah dan intervensi Belanda. Peningkatan perekonomian Indonesia seharusnya berlandaskan pada usaha swadaya dan dipergunakan bersama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Semua langkah tersebut terimplemantasi dalam sistem ekonomi koperasi sehingga harus tetap ditingkatkan.

Sistem ekonomi koperasi merupakan suatu alat untuk mendidik rakyat dalam berusaha mengarahkan pembentukan sistem ekonomi berkelanjutan yang membutuhkan semangat bekerja keras secara bersama, saling toleransi, dengan memiliki daya saing yang konstruktif. Koperasi dapat membawa kemakmuran apabila dalam tiap anggota memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab bersama untuk meminimalisasi krisis

⁶⁹ Pada ulang tahun koperasi ke IV, Hatta memiliki harapan agar mudah-mudahan gerakan menyimpan yang ditingkatkan oleh anggotanya, dengan hari koperasi yang ke IV ini mencapai hasil yang lebih memuncak dibanding tahun lalu, kemajuan yang memuncak itu pulalah yang mengharumkan nama gerakan koperasi Indonesia di luar negeri, dengan koperasi kita dapat memperkuat moril rakyat, memperkuat tali persaudaraan sebangsa. Mohammad Hatta, *Hari Koperasi Keempat*, dalam Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan III*, *op.cit*, hal. 242.

kesadaran rakyat dalam berusaha bersama. Koperasi dapat mendidik rakyat untuk mandiri dengan memiliki loyalitas, dan menghindarkan pengaruh dari kepentingan sepihak yang dapat merugikan kepentingan bersama karena koperasi merupakan usaha bersama yang berdiri di atas berbagai perbedaan kepentingan kelompok dan golongan dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Mohammad Hatta, desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadinya Indonesia ibarat satu taman berisi pohon-pohon koperasi yang buahnya dipungut oleh rakyat banyak. Bukan koperasi yang bersaing satu sama lain dalam mencari untung besar, melainkan bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni dan lain-lain⁷⁰. Pemikiran Hatta tentang desentralisasi ekonomi yang terwujud dalam sistem ekonomi koperasi, merupakan perwujudan terhadap pentingnya pemanfaatan keanekaragaman sumber alam yang potensial untuk diupayakan sebagai modal usaha bersama. Keanekaragaman yang potensial merupakan daya tarik tersendiri bagi rakyat Indonesia untuk saling mencukupi satu sama lain dalam tiap daerah.

Mohammad Hatta setelah kemerdekaan Republik Indonesia berusaha meletakkan dasar-dasar pemerintahan demokratis. Langkah tersebut berorientasi pada penciptaan kepercayaan dari rakyat terhadap tatanan pemerintahan Indonesia yang baru, dengan didukung oleh

⁷⁰ Wawan Tunggal Alam, *op.cit*, hal. 451.

pembentukan alat negara yang bekerja secara professional. Perimbangan kontrol dalam pemerintahan menjadi prioritas, dengan dasar inilah secara ke dalam dan ke luar tatanan pemerintahan Indonesia berusaha memantapkan tujuan mendasar yang bermanfaat bagi masa sekarang dan mendatang.

Penerapan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah tuntutan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus memperoleh kepercayaan dari dunia internasional terhadap jalannya pemerintahan. Berdasarkan landasan inilah, gerakan oposisi terhadap pemerintah haruslah berpegang pada asas-asas demokrasi yang menghormati konstitusi, sehingga dalam menyampaikan aspirasinya harus berpegang pada penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara agar tidak mengarah pada tindakan anarkhis.

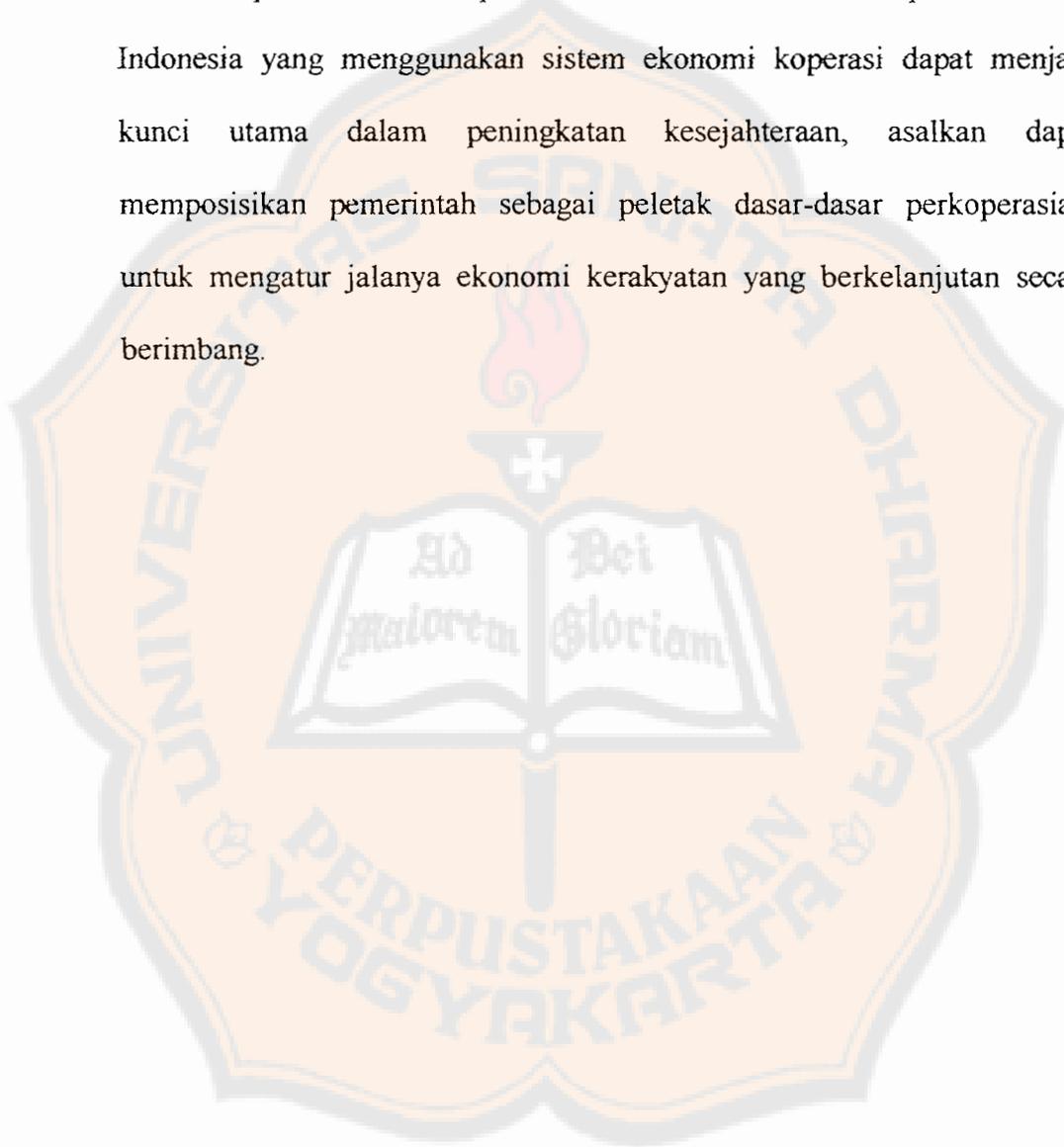
Pembentukan tatanan yang demokratis tidaklah mencukupi bagi jalannya pemerintahan di Indonesia, sebab hubungan luar negeri dengan negara lain juga mempengaruhi perkembangan dalam segala bidang. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan pemahaman politik luar negeri yang mengarah pada penciptaan hubungan saling menghormati dan menguntungkan, tanpa ikatan ketergantungan dalam mencapai perdamaian dunia. Penerapan politik luar negeri yang bebas aktif berdampak pada pencapain tujuan Indonesia dalam meraih pengakuan kedaulatan dari negeri Belanda. Dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda bangsa Indonesia semakin terbentuk kematangan dalam

penemuan jati diri, sehingga perlu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Mohammad Hatta pada saat memimpin kabinet berusaha melakukan perbaikan dalam berbagai bidang khususnya ekonomi, setelah Indonesia menerima persejutan Renville. Usaha tersebut dilakukan dengan berdasar pada pentingnya peningkatan ekonomi Indonesia yang bersumber dari kemandirian ekonomi. Pelaksanaan program RE-RA merupakan suatu perwujudan terhadap pentingnya penghematan keuangan negara dalam menyetatkan keuangan negara dengan menerapkan profesionalitas ketentaraan dan kepegawaian. Program tersebut merupakan suatu dilema bagi mereka yang terkena demisioner karena telah ada semacam tekanan psikologis, sebab dalam ketentaraan berkembang pandangan bahwa bekerja diluar dinas ketentaraan bukanlah pekerjaan prestisius.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang merasa tersingkir untuk melakukan serangkaian tindakan penolakan terhadap program pemerintah dan berakhir pada penerapan tindakan kekerasan, walaupun pemerintah dapat meredam pergolakan. Berawal dari peristiwa ini, dapatlah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa kemajuan sebuah bangsa berawal dari pentingnya penerapan pemerintahan dan ketentaraan yang mengembangkan tanggung jawab secara profesional sebagai pengabdian dan pelindung rakyat, begitu juga rakyat haruslah mengerti hak dan kewajiban secara berimbang berdasarkan konstitusi.

Rakyat merupakan elemen terpenting bagi sebuah negara sehingga dalam pengembangan perekonomian, rakyat dituntut untuk memberdayakan setiap kemampuan ekonominya secara bersama dalam wadah koperasi. Hal ini perlu dilakukan karena dasar perekonomian Indonesia yang menggunakan sistem ekonomi koperasi dapat menjadi kunci utama dalam peningkatan kesejahteraan, asalkan dapat memposisikan pemerintah sebagai peletak dasar-dasar perkoperasian, untuk mengatur jalanya ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan secara berimbang.



BAB III

HUBUNGAN MOHAMMAD HATTA DENGAN SUKARNO

DAN SUTAN SYAHRIR ANTARA 1945 - 1956

A. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno

Setelah kemerdekaan Indonesia Sukarno dan Mohammad Hatta dianggap sebagai tokoh nasional yang menjadi simbol pemersatu bangsa Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan, dalam sidang PPKI Sukarno dan Mohammad Hatta diangkat secara aklamasi sebagai presiden dan wakil presiden, menetapkan UUD 1945 serta pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 8 propinsi¹.

Mohammad Hatta dan Sukarno telah lama melakukan kerjasama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Hubungan tersebut mulai berkembang secara dekat dan memiliki kesamaan tujuan untuk memantapkan nasionalisme Indonesia, semenjak bergabung dalam organisasi bentukan Jepang yang digunakan sebagai kedok untuk mendukung eksistensi Jepang di Indonesia. Organisasi bentukan Jepang semakin mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia setelah didukung oleh tokoh nasional yang sangat terkenal dengan sebutan empat serangkai yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, KH.

¹ Untuk mengetahui lebih lanjut 8 propinsi itu dapat dilihat dalam *Tim, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Peny: Safroedin Bahar, Nannie Hudawati, Jakarta. Sekretariat Negara RI, 1998, hal. 580 – 582.

Dewantara dan KH. M. Mansoer yang ditugasi untuk membentuk organisasi yang bernama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)².

Sukarno dan Mohammad Hatta mampu memanfaatkan PUTERA sebagai organisasi pergerakan murni untuk memupuk nasionalisme Indonesia. Perjuangan Sukarno dan Hatta telah menunjukkan kemajuan berarti, karena dengan dibentuknya berbagai organisasi khususnya pusat tenaga rakyat dapat melahirkan pendidikan bagi rakyat dalam keorganisasian, sebab rakyat diperbolehkan ikut didalamnya. Dalam perkembangan waktu, Jepang juga memandang perlu untuk membentuk PETA yang dapat mendukung eksistensinya di Indonesia, namun secara kenyataan rakyat yang tergabung didalamnya mulai mengenal teknik-teknik ketentaraan sehingga dapat membantu pembentukan ketentaraan Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia berusaha membentuk berbagai unsur penunjang sebagai syarat berdirinya suatu negara, seperti presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh kabinet, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, landasan idiologis Pancasila, pembentukan lembaga legislatif sebagai perwujudan perwakilan rakyat (KNIP), pembentukan alat ketahanan negara dengan wilayah kekuasaan beserta rakyat. Segala unsur tersebut harus didukung, dengan pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Sukarno berusaha menciptakan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dengan mengeluarkan dekrit

² Pusat Tenaga Rakyat pada dasarnya hanyalah untuk membujuk nasionalisme Indonesia dan para pemimpinnya serta kaum terpelajar sebagai alat sambil lalu untuk dapat meminta pengabdian besar bagi rakyat guna usaha-usaha peperangan yang diduga akan lebih memuncak dan semakin mendekati pulau Jawa. Noerhadi Soedarno, *POETERA (Poesat Tenaga Rakjat)*, Jakarta, Tinta Mas, 1982, hal. 17.

tertanggal 10 September 1945 tentang perlunya mentaati perintah-perintah republik³.

Pada tanggal 19 September 1945, Sukarno menghadiri rapat Ikada yang dihadiri oleh rakyat Indonesia. Sebelum rapat Ikada berjalan telah dicurigai akan terjadi kerusuhan, namun Sukarno dapat membuat jalannya rapat secara damai sehingga rakyat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta⁴. Peristiwa ini memberikan pengaruh positif terhadap dunia internasional tentang betapa besarnya perasaan nasionalisme rakyat Indonesia sehingga pasukan sekutu⁵ yang datang ke Indonesia merasa perlu bekerjasama dengan pemerintahan Sukarno dan Mohammad Hatta.

Dalam kenyataannya, intensitas masuknya tentara Belanda semakin besar dengan disertai pengacauan keamanan. Berbagai tindakan pasukan Belanda yang tidak menghargai pemerintahan di Indonesia telah membuat Sukarno dan Mohammad Hatta mengambil inisiatif untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada panglima tentara sekutu untuk urusan wilayah timur

³ Lihat dalam. Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Terj: Hasan Basari, Jakarta, LP3ES, 1987, hal. 392.

⁴ Pidato presiden Sukarno dalam rapat Ikada adalah: Saya mengetahui bahwa saudara-saudara berkumpul di sini untuk melihat presiden saudara-saudara dan untuk mendengarkan perintahnya. Nah apabila saudara-saudara masih setia dan percaya kepada presidenmu, ikutilah perintahnya yang pertama. Pulanglah dengan tenang. Tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur, dan tunggulah berita dari para pemimpin ditempatmu masing-masing sekarang... bubarlah... pulanglah saudara-saudara dengan tenang. Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Terj: Abdul Salim, Jakarta, Gunung Agung, 1966, hal. 340.

⁵ Baru pada 8 September 1945 sebuah pasukan pemantau Inggris bisa diturunkan dengan parasut di lapangan terbang kemayoran di Batavia. Berbeda dengan keterangan yang dilaporkan Van Mook di markas besar Mountbatten, regu pemantau ini mensinyalir bahwa perasaan anti Belanda di kota sangatlah kuat. Gedung dan *Tram* (kereta listrik) penuh slogan-slogan kemerdekaan dalam bahasa Inggris. Sesudah jalur pelayaran masuk Tanjung Priok dibersihkan dari ranjau, pada 14 September masuklah kapal perang *Cumberland*, kapal Inggris yang pertama, disusul oleh kapal pemburu Belanda, *Tromp* yang mengangkut para perwira pertama Belanda dan tangan kanan Van Mook, Vanderplas dan kepala tentara NICA Kapten Abdoel Kadir. Lambert Giebels, *Soekarno: Biografi 1901 - 1950*, Terj: I. Kapitan Oen, Jakarta, Gramedia, 2001, hal. 378.

jauh perihal keberatan terhadap apa yang telah dilakukan tentara Belanda di Indonesia⁶. Puncak kekecewaan rakyat Indonesia terhadap aksi sepihak tentara sekutu dan NICA terlihat dalam pertempuran Surabaya pada 10 Nopember 1945, walaupun Sukarno bersama Hatta sebenarnya telah berusaha mendamaikan. Pasukan Belanda yang berada di Indonesia berusaha melakukan serangkaian percobaan pembunuhan terhadap Sukarno. Dilain sisi, Tan Malaka mulai mendekati Sukarno untuk menggantikan posisinya, namun tawaran ini ditanggapi lain dengan alasan untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat. Dengan dasar ini dibuatlah surat untuk empat kelompok pendukung revolusi yang dianggap mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat⁷.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kemungkinan buruk yang datang dari dalam dan luar negeri⁸, Sukarno bersama Hatta memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946, tentunya atas persetujuan Sultan Hamengku Buwono Ke IX. Kepindahan Sukarno dan Mohammad Hatta dengan alasan bahwa Yogyakarta merupakan daerah pedalaman dengan kondisi yang aman, sedangkan Syahrir tetap di Jakarta guna melakukan berbagai rangkaian diplomasi.

⁶ Surat Sukarno kepada Christison 9 Oktober 1945 berisi 4 syarat: 1). Pendaratan lebih lanjut pasukan Belanda harus dihentikan; 2). Militer Belanda yang sudah mendarat harus dikeluarkan; 3). NICA tidak boleh bertindak; 4). Menantikan konferensi perdamaian, Republik Indonesia harus diakui sebagai pemerintahan *de facto* di Indonesia. Lambert Giebels, *op.cit*, hal 384. Sedangkan surat Hatta point I, II, III, IV sama namun point V tentara sekutu tanpa serdadu Belanda membatasi kegiatan mereka pada maksud ganda semula: membebaskan, merawat dan mengevakuasi tahanan perang sekutu, serta melucuti senjata Jepang. Lihat Deliar Noer, *op.cit*, hal. 276 – 277.

⁷ Empat sekawan ahli waris terdiri dari para pemimpin yang mewakili empat kelompok pendukung revolusi yaitu: Tan Malaka mewakili kelompok marxist kiri, Syahrir mewakili kaum sosialis moderat, Iwa Kusuma Sumantri mewakili organisasi-organisasi muslim, Wongsonegoro mewakili golongan ningrat, pegawai negeri gaya lama. George Mac Turnan Kahn, *op.cit*, hal 188 – 189.

⁸ Berbagai percobaan pembunuhan terhadap presiden Sukarno oleh pasukan NICA memang telah disengaja dengan alasan bahwa Sukarno dan Mohammad Hatta merupakan pejahat perang yang merupakan kolaborator Jepang. Untuk lebih jelas lihat dalam, Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*, Terj: Abdul Salim, Jakarta, Gunung Agung, 1966, hal. 346 – 352.

Dengan kepindahan Sukarno dan Mohammad Hatta ke Yogyakarta, semakin terbukalah perbedaan pandangan antara Sukarno, Syahrir, Mohammad Hatta dengan Tan Malaka. Sukarno, Hatta dan Syahrir berpandangan bahwa kepercayaan dari dalam maupun luar negeri perlu dicapai melalui jalur diplomasi, sekaligus mengatur kehidupan rakyat dalam berbagai bidang, dengan didukung oleh tentara sebagai alat ketahanan negara. Tan Malaka memandang bahwa politik diplomasi bukanlah jalan terbaik, namun dengan konfrontasi dapat membawa kemerdekaan 100 %⁹, sehingga dapat menjadi pemecah permasalahan untuk mencapai pengakuan kedaulatan.

Pengaruh Tan Malaka sangat besar sehingga memiliki kemampuan dalam melakukan kritik terhadap Kabinet Syahrir melalui persatuan perjuangan. Pada tanggal 28 Februari 1946 Kabinet Syahrir jatuh dan Sukarno memberikan kepercayaan terhadap Tan Malaka untuk menyusun kabinet. Pembentukan Kabinet Tan Malaka tidak terwujud karena semua anggota dalam persatuan perjuangan tidak sepenuhnya sepaham dengan kepemimpinan Tan Malaka, sehingga hanya ada ikatan emosional terhadap kinerja Kabinet Syahrir. Sukarno dan Mohammad Hatta lalu berkoordinasi untuk menghindari krisis kabinet yang berkepanjangan, sehingga ditunjuk kembali Kabinet Syahrir untuk membentuk kabinet koalisi.

⁹ Program minimum PP berbunyi: 1).Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100 %; 2). Pemerintah rakyat (dalam arti kemauan pemerintah sesuai dengan kemauan rakyat); 3). Tentara rakyat (dalam arti kemauan tentara sesuai dengan kemauan rakyat); 4). Menyelenggarakan tawanan Eropa; 5). Melucuti senjata Jepang; 6). Menyita hak dan milik musuh; 7). Menyita perusahaan (pabrik, bengkel, dan lain-lain) dan pertanian (perkebunan, tambang, dan lain-lain) musuh. Dicuplik dari Deliar Noer, *op.cit*, hal. 291 – 292. Dalam masa inilah keakraban Sukarno, Hatta dan Syahrir begitu kental dengan didukung berbagai perbedaan latar belakang yang dapat terlihat dalam lampiran 11 halaman 165.

Dalam sidang KNIP tanggal 2 Maret 1946 Mohammad Hatta mengumumkan penunjukan Kabinet Syahrir II, dengan merangkum program kabinet dalam lima pasal¹⁰. Syahrir menduduki kembali posisi perdana menteri dan kedudukan Tan Malaka sebagai oposisi semakin terjepit, kondisi ini terbukti dengan penangkapan Tan Malaka pada 17 Maret 1946 serta beberapa pengikut seperti Abi Koesno, Yamin, Sukarni, Sayuti Melik bekas sekretaris Sukarno dan Chaerul Saleh¹¹. Penangkapan pengikut Tan Malaka telah membukakan jalan bagi Kabinet Sutan Syahrir II, untuk menerapkan politik diplomasi dalam meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda.

Kabinet Syahrir mengirimkan delegasinya di bawah pimpinan Suwandi dari kehakiman bersama Soedarsono dari urusan dalam negeri dan sekretaris negara Pringgodigdo untuk bertemu dengan Schermehon delegasi Belanda yang dihadiri perantara seorang diplomat Inggris Archibald Clark dan didampingi oleh Van Mook di benteng Hubertus daerah Hoge Valuwe. Pertemuan ini hanyalah menghasilkan keputusan pengakuan *de facto* atas Jawa dan Madura¹². Kegagalan diplomasi telah menurunkan citra pemerintah di mata masyarakat khususnya dari pihak tentara Indonesia.

¹⁰ Program Kabinet Syahrir kedua yang terangkum dalam program lima pasal adalah: 1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia merdeka; 2. Mempersiapkan rakyat negara disegala lapangan politik, ekonomi, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia; 3. Menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis; 4. Berusaha sekuat-kuatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian; 5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknya oleh pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunya, sehingga memenuhi maksud sebagaimana termasuk dalam UUD 1945 pasal 33. Diambil dari G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid I, op.cit*, hal. 160

¹¹ Lihat Lambert Gielbers, *op.cit*, hal. 416 – 417.

¹² Bandingkan dengan G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid I, op.cit*. hal. 166.

Ketidakberhasilan dalam perjuangan diplomasi pemerintahan Syahrir menyebabkan reaksi negatif dari tentara, terutama dalam pembentukan pemerintahan presidensiil dibawah Sukarno dan Mohammad Hatta. Peristiwa ini memuncak dalam penculikan Sutan Syahrir oleh Soedarsono selaku panglima daerah militer Solo-Yogyakarta. Berdasarkan peristiwa ini presiden Sukarno mengambil alih kekuasaan dan menyampaikan pidato tentang perlunya melakukan oposisi damai. Soedarsono ditangkap dan peristiwa ini terkenal sebagai peristiwa 3 Juli. Setelah diadakan pengusutan lebih lanjut Sukarno dan Mohammad Hatta melakukan persetujuan dengan Jendral Sudirman¹³, untuk menghindari pandangan yang negative di masyarakat dan menjaga kestabilan keamanan dalam negeri.

Pada saat perjanjian Linggajati¹⁴ telah dihasilkan keputusan sehingga tinggal menunggu ratifikasi dari parlemen. Sukarno dan Mohammad Hatta memiliki peran begitu besar dalam menggalang dukungan untuk dapat meratifikasikan keputusan perjanjian Linggajati. Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No.6 tertanggal 29 Desember 1946 yang mengacu pada pentingnya penambahan jumlah anggota KNIP dari 200 menjadi 514¹⁵.

¹³ Ada enam butir persetujuan yaitu: 1). Sudirman bersedia memecat Sudarsono dan mengangkat Umar Joy sebagai gantinya.; 2). Sudirman menyetujui penangkapan sejumlah politisi (75 orang) dan tentara (21 orang); 3). Kabinet Syahrir tidak akan dihidupkan kembali sedang untuk sementara Sukarno tetap akan memimpin kabinet dengan bantuan dewan pertahahan negara dimana Sudirman tetap menjadi anggota; 4). Tak akan diadakan penuntutan atas pemimpin-pemimpin politik dan militer yang hanya memegang peranan tak berarti dalam peristiwa tiga Juli; 5). KNIP akan diperluas supaya lebih mencerminkan berbagai kepentingan dan paham dalam masyarakat; 6). Diplomasi dilanjutkan. Lihat dalam, G Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, jilid 2, op.cit.* hal. 179-180.

¹⁴ Isi dalam perjanjian Linggajati dapat dilihat dalam G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke 20, Jilid I, op.cit.*, hal. 181-182.

¹⁵ Tentang komposisi wakil dalam parlemen dapat dilihat dalam George Mct Kahin, *op.cit.*, hal. 252.

Keputusan presiden Sukarno menjadi polemik dalam badan pekerja KNIP, sehingga antara 25 Februari sampai 5 Maret 1947 diadakan sidang KNIP di Malang. Dalam persidangan itu Mohammad Hatta melakukan perdebatan tentang perlunya penambahan perwakilan dalam parlemen, pada akhirnya KNIP menyetujui Peraturan Pemerintah No.6 tertanggal 29 Desember 1946¹⁶. Pada tanggal 2 Maret 1947 Peraturan Presiden dijalankan dan 3 Maret 1947 diangkat BP KNIP baru, tanggal 5 Maret 1947 diadakan pemungutan suara untuk mencari dukungan kepercayaan Kabinet Syahrir. Keberhasilan dari pihak Sukarno dan Mohammad Hatta dalam menggalang ratifikasi perjanjian Linggajati membuat dukungan terhadap pemerintah semakin kuat, khususnya keberadaan Sukarno dan Mohammad Hatta. Dengan diratifikasinya keputusan Linggajati diadakanlah penandatanganan bersama antara Republik Indonesia dan pemerintah Belanda pada 25 Maret 1947.

Keberhasilan Sukarno dan Mohammad Hatta dalam menggalang dukungan terhadap ratifikasi persetujuan Linggajati memberikan bukti bahwa KNIP merupakan perwujudan perwakilan rakyat di parlemen yang dapat bekerjasama dengan pemerintah. Dengan disetujuinya perjanjian Linggajati pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan waktu, untuk mengkonsolidasi

¹⁶ Mohammad Hatta menghadapi sidang pada suatu alternative, menyetujui Peraturan Pemerintah No.6 atau presiden terpaksa melakukan pilihan antara lain: 1). Membubarkan KNI; suatu tindakan yang kami tidak akan lakukan, oleh sebab itu tinggal satu pilihan saja; 2). Kami, presiden dengan wakil presiden, mengundurkan diri. KML Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Linggarjati*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal. 41. Foto Hatta saat mempertahankan keputusan Linggajati lihat dalam lampiran 12 halaman 166.

bidang kemiliteran, meningkatkan pendapatan dengan memperbaiki sektor perekonomian¹⁷ dan melakukan imbal dagang dengan India.

Keberhasilan dalam persejutuan perjanjian Linggajati telah memantapkan posisi Sukarno dan Hatta di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan *de facto* negara-negara tetangga, dari pihak republik meresponnya dengan membentuk korps diplomatik untuk mewakili Indonesia dalam urusan diplomatik dengan negara-negara tetangga¹⁸. Belanda mereaksi dengan menambah jumlah pasukan untuk alasan mempertahankan Indonesia sebagai tanah jajahan. Selain itu faktor mempertahankan Indonesia sebagai sumber pemasukan yang dapat diambil dari sumber alam baik hutan, perkebunan, dan pertambangan.

Berdasarkan kondisi yang tidak menguntungkan Sukarno meminta Hatta untuk melakukan kunjungan ke Sumatra, dalam rangka mempersatukan rakyat Sumatra untuk menghadapi Belanda. Mohammad Hatta juga melakukan kunjungan rahasia ke India dengan memakai nama samaran Abdullah untuk meminta bantuan persenjataan Inggris dari India. Upaya ini tidak berhasil, namun dibalik kegagalan terdapat satu dukungan yang semakin besar terhadap perjuangan Indonesia di kancah internasional khususnya dalam diplomasi. Penafsiran Sukarno dan Mohammad Hatta atas sikap Belanda yang selalu melakukan provokasi untuk memecah belah bangsa Indonesia mulai

¹⁷ Pada 16 Agustus 1946 Hatta mendirikan Bank Negara, Hatta berpendapat bahwa bank ini harus mengeluarkan mata uang sendiri. Permulaan Oktober Hatta mengeluarkan mata uang Republik Indonesia dan dalam sebuah pidato radio ia mengingatkan para pendengarnya untuk menolak uang NICA sebagai alat pembayaran (mata uang rupiah dilempar ke pasar modal dengan nilai tukar yang optimis: 1 rupiah 5 gulden Belanda. Setahun kemudian nilai rupiah hanya tinggal 5 sen.) Lihat Lambert Giebels, *op.cit*, hal. 426.

¹⁸ *Ibid.* hal 439.

terbukti dalam Agresi Militer I 21 Juli 1947. Belanda beranggapan bahwa langkah ini sebagai aksi polisionil, karena masih merasa memiliki kekuasaan *de jure* atas Indonesia, selain itu Belanda mengklaim negara-negara bagian Kalimantan Timur dan “Timur Besar” mendukung aksi itu¹⁹.

India dan Australia mereaksi keras agresi tersebut sehingga diajukanlah permasalahan ini dalam dewan keamanan, dengan mengangkat masalah agresi Belanda dalam sidang dewan keamanan di Lake Success. India dan Australia mengajukan resolusi terhadap dewan keamanan untuk memberikan putusan tentang perlunya menghentikan permusuhan. Amerika Serikat menganggap bahwa resolusi itu sebagai sarana untuk mencapai kompromi, sehingga mendesak agar Belanda dan Republik Indonesia tetap menjaga perdamaian²⁰. Amerika Serikat mengajukan usulan tentang perlunya pembentukan komisi pengawas, sehingga ditunjuklah wakil tiap negara yang berselisih dalam komisi jasa-jasa baik (Komisi Tiga Negara).

Dampak negative dari Agresi Militer I Belanda sangat terasa pada saat Belanda memutuskan jalur strategis republik, dalam pemenuhan kebutuhan persenjataan dan logistik dari daerah lain. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda pada akhirnya dapat diselesaikan dalam perundingan Renville yang diprakarsai oleh KTN (Komisi Tiga Negara). Penerimaan keputusan perjanjian

¹⁹ Lihat juga dalam Lambert Giebels, *ibid*, hal 442. Perlu diketahui bahwa Belanda pada tanggal 20 Juni 1946 mengadakan rapat di Malino untuk mengutarakan rencana pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dalam kerajaan Belanda, yang akan terdiri dari 4 negara bagian: Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Indonesia Timur. Tanggal 27 Desember 1946 Negara Indonesia Timur disahkan berdiri dan tanggal 13 Januari 1947 Najamuddin yang ditunjuk sebagai formatur berhasil membentuk sebuah kabinet. KML. Tobing, *op.cit*, hal. 50.

²⁰ Dewan Keamanan memberikan sikap bahwa Belanda dan RI haruslah: 1). Menghentikan Permusuhan; 2). Menyelesaikan perselisihan mereka dengan bantuan komisi arbitrase atau cara damai lainnya, dan melaporkan kepada DK-PBB segala kemajuan yang dicapai. G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke 20, Jilid II, opcit*, hal. 16.

Renville menyebabkan Kabinet Amir Sjarifuddin mendapat tekanan dari berbagai pihak, sehingga Sukarno memberikan kepercayaan terhadap Mohammad Hatta untuk menyusun kabinet. Dengan diterimanya perjanjian Renville berbagai dampak negatif mulai terasa seperti daerah republik menjadi sempit, munculnya masalah pengungsian, melemahnya kondisi ekonomi karena Belanda menguasai daerah penghasil sumber alam.

Berdasarkan faktor-faktor inilah Mohammad Hatta mencanangkan program kabinet yang berorientasi pada pembenahan perekonomian Indonesia, namun dalam pelaksanaannya program Kabinet Hatta mendapat tekanan dari pihak FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang berafiliasi dengan PKI Muso, dan pada tanggal 18 September 1948 melakukan pemberontakan komunis Muso di Madiun. Mohammad Hatta dan Sukarno berhasil menumpas pemberontakan tersebut, dengan melakukan kerjasama antara tentara dan rakyat. Mohammad Hatta juga mendukung terhadap keputusan presiden Sukarno untuk menyerahkan kekuasaan secara mutlak karena keadaan yang kritis. Usulan tersebut disetujui KNIP namun hanya berlangsung tiga bulan sejak 10 September 1948, pada 30 September 1948 Madiun dikuasai republik dan bulan November - Desember 1948 pemberontakan komunis Madiun dapat dibasmi.

Keberhasilan Sukarno dan Mohammad Hatta dalam menumpas pemberontakan komunis Muso di Madiun, memberikan bukti bahwa Indonesia mampu membentuk pemerintahan yang demokratis, dengan begitu dapat memperjelas posisi Indonesia terhadap dunia internasional. Posisi Sukarno dan

Hatta sebagai simbol persatuan rakyat Indonesia semakin diperjelas dengan besarnya dukungan rakyat yang kurang diperhitungkan secara matang oleh gerakan komunis Muso.

Mohammad Hatta menggambarkan bahwa dalam negara demokrasi, seperti juga Republik Indonesia tiap-tiap aliran politik apapun harus bisa berjalan dengan tiada ancaman. Idiologi betapapun coraknya tidak akan ditindas oleh pemerintah, akan tetapi segala tindakan anarchis dari manapun datangnya dan pengacau-pengacau yang membahayakan negara dan mengganggu keselamatan umum akan dibasmi²¹. Argumentasi Mohammad Hatta ini merupakan suatu kebenaran, sebab dalam pemerintahan demokratis kebebasan yang dimiliki bukannya tanpa batas, akan tetapi batasan yang ada memiliki maksud mengatur dan menjaga keharmonisan, dalam keanekaragaman sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan berkaca pada pengatasan peristiwa Madiun, Mohammad Hatta merupakan pejuang nasionalis yang berpandangan bahwa dalam negara demokratis sangat membutuhkan perasaan untuk mandiri dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga nasionalisme Indonesia haruslah dibangun atas kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Keberhasilan pemerintahan Sukarno dan Mohammad Hatta dalam menumpas pemberontakan komunis Madiun merupakan modal untuk meraih dukungan Amerika Serikat dan Inggris. Dukungan ini terbukti dengan suatu kesimpulan Marshal, bahwa kaum nasionalis Indonesia harus dibantu dengan cara yang adil dan praktis

²¹ Deliar Noer, *op.cit*, hal. 334.

sebagai prasyarat untuk menghadapi komunis di kawasan itu²². Dengan kesimpulan ini semakin memperkuat dukungan kepemimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta dalam membantu penyelesaian pertikaian Indonesia dan Belanda lewat jalur perundingan.

Setelah krisis Madiun terselesaikan Mohammad Hatta diutus oleh presiden Sukarno untuk melakukan konsolidasi terhadap para komandan militer di Tapanuli yang pada waktu itu sedang terjadi perselisihan. Kedatangan Hatta tersebut menghindari pembenaran dari Belanda dalam menguasai wilayah di Sumatera²³. Sekembalinya dari Sumatera Belanda melakukan agresinya yang kedua, dan melakukan penawanan terhadap beberapa tokoh republik diantaranya Sukarno-Mohammad Hatta, dengan keadaan ini maka terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia²⁴. Belanda ternyata telah melakukan perencanaan yang matang terhadap agresi militer II dan pengasingan terhadap tokoh republik²⁵.

Dunia internasional mengecam tindakan Belanda dengan mengeluarkan resolusi DK PBB 24 Desember 1948. Selain itu berbagai pihak

²² Jan Bank, *op.cit*, hal. 21.

²³ Lihat dalam Mavis Rose, *op.cit*. hal. 259.

²⁴ Perlu ketahui sebelum melakukan Belanda melakukan agresi militer kedua Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Sumatera, disana ia melakukan persiapan-persiapan untuk mengalihkan pemerintahan republik ke Bukit Tinggi kalau terjadi serbuan lebih lanjut dari pihak Belanda terhadap Jawa, Mohammad Hatta memerintahkan menteri ekonomi Syarifuddin Prawiranegara untuk tetap tinggal di Bukit Tinggi. Mohammad Hatta juga telah mengatur dengan Nehru melalui konsul India supaya Sukarno dan Syahrir diterbangkan ke India untuk mengangkat persoalan Republik di luar negeri dan melindungi Sukarno dari ancaman Belanda. *ibid*, hal 259-260.

²⁵ Perhitungan Republik Indonesia yang keliru terlihat juga pada persiapan presiden untuk berangkat ke India pada tanggal 19 Desember 1948, presiden menanti pesawat terbang yang dikirimkan Nehru untuk menjemputnya, sementara TNI akan menyelenggarakan latihan militer. Ketika Belanda menjatuhkan bom di Maguwo barulah diketahui kalau itu bukan latihan tetapi perang sungguh-sungguh. Hal ini pasti juga diperhitungkan oleh Belanda. Lihat dalam G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, jilid 2*, *op.cit*. hal. 260. Foto tokoh nasional yang ditawan diantaranya Hatta lihat dalam lampiran 13 halaman 167.

mendukung perjuangan diplomasi Indonesia, pihak-pihak tersebut diantaranya para wartawan asing yang mengangkat pemberitaan tentang keadaan Indonesia. Nehru yang membantu perjuangan Indonesia dalam mensponsori konferensi Inter-Asia dengan menghasilkan keputusan untuk mencapai jalan damai antara Indonesia dan Belanda, atas dasar menghormati putusan DK-PBB. Berbagai dukungan yang kuat ini dapat membangun kembali kepercayaan Indonesia khususnya Sukarno dan Mohammad Hatta, dalam perjuangannya meraih kedaulatan melalui jalur diplomasi.

Setelah disepakatinya perjanjian Roem-Royen Sukarno dan Mohammad Hatta kembali ke Yogyakarta, dan dipersiapkannya konferensi antar Indonesia. Untuk mempersiapkan perjanjian KMB, presiden Sukarno menunjuk Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi²⁶. Penunjukan Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi merupakan suatu bukti kepercayaan Sukarno terhadap kemampuan diplomasi Hatta yang dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam persetujuan KMB. Mohammad Hatta kembali ke tanah air untuk meminta ratifikasi dari parlemen, setelah diratifikasi Hatta kembali ke Den Haag pada 27 Desember 1949 untuk menghadiri upacara pengakuan kedaulatan. Selain itu, di Jakarta Sultan Hamengkubuwono IX yang berkedudukan sebagai perdana menteri ad-interim melakukan upacara penyerahan kedaulatan.

²⁶ Adapun susunan delegasinya adalah: Mohammad Hatta sebagai ketua; Mr Mohammad Roem sebagai wakil ketua; sedangkan sebagai anggotanya adalah Dr Sukiman Wirjosandjojo, Dr J Leimena, Mr ali sastroamidjojo, Mr Sujono Hadiwinoto, Kol TB Simatupang, Ir Djuanda, Prof Dr Supomo dan Dr Sumitro. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku*, Jakarta, PT Kinta, 1974, hal. 287.

Dengan di terimanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda maka terbentuklah RIS, yang merupakan sebuah negara berdaulat untuk mengatur kebijakan dalam maupun luar negeri²⁷, tanpa tekanan yang besar dari pihak asing khususnya Belanda. Unsur-unsur kepegawaian bentukan Belanda pada akhirnya harus menyesuaikan dengan aturan RIS, pasukan KNIL harus digantikan oleh pasukan RIS yang terdiri dari orang Indonesia. Semasa dalam pemerintahan RIS, Hatta menduduki posisi perdana menteri dan Sukarno sebagai presiden RIS. Keberadaan RIS ternyata tidak bertahan lama karena berbagai faktor yang menyebabkan rakyat lebih mempercayai bentuk negara kesatuan. Sukarno dan Mohammad Hatta pada akhirnya menyetujui diadakannya penandatanganan piagam untuk kembali pada negara kesatuan²⁸, yang berdasarkan landasan konstitusional UUDS 1950.

Dalam sistem pemerintahan parlementer yang dilaksanakan semenjak perayaan proklamasi 17 Agustus 1950, posisi Sukarno dan Hatta merupakan simbol pemersatu bangsa, sedangkan pelaksana pemerintahan sehari-hari ada pada perdana menteri beserta kabinetnya. Pada sistem pemerintahan parlementer hubungan Mohammad Hatta dan Sukarno mulai menampakkan berbagai masalah yang begitu kentara. masalah tentang perbedaan pandangan terhadap penyelesaian peristiwa Cililitan pada 14 Desember 1955, yang harus

²⁷ Dengan begitu maka RIS menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat dan kemudian mendapat pengakuan baik *defacto* dan *deyure* dari dunia internasional. Mulailah negara-negara lain mengadakan pertukaran duta besar dengan RIS. G Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20, Jilid 2, op.cit.*, hal. 195-196. Foto Kabinet Hatta RIS lihat lampiran 14 halaman 168.

²⁸ Sukarno pada dasarnya kurang menyetujui berdirinya RIS, hal ini di buktikan dengan berbagai pidato Sukarno selama tahun 1950 dalam rangka kunjungannya keberbagai daerah untuk memperkenalkan diri pada rakyat di luar pulau Jawa, isi pidatonya mengangkat tentang perlunya kembali pada pemerintahan kesatuan sebab federalisme dalam pandangannya mendorong regionalisme. Dengan demikian pada hakekatnya Sukarno secara aktif berkampanye untuk menghancurkan RIS yang tak lain adalah pemerintahan Hatta. Mavis Rose, *op.cit.*, hal. 289.

diselesaikan melalui jalur musyawarah, namun Mohammad Hatta memandang penyelesaian masalah itu harus berasal dari penegakan disiplin. Penolakan Sukarno terhadap penandatanganan RUU pembatalan perjanjian KMB yang diajukan Kabinet Burhanuddin Harahap walaupun Mahkamah Agung telah memberikan keputusan, bahwa RUU tersebut adalah sah²⁹. Mohammad Hatta memandang bahwa penolakan yang dilakukan oleh presiden Sukarno merupakan wujud pelanggaran terhadap konstitusi. Peristiwa ini pada nantinya dapat berdampak bagi kelangsungan pemerintahan demokratis di Indonesia. Pasca pemilihan umum I, Mohammad Hatta menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden terhitung pada tanggal 1 Desember 1956, walaupun banyak kalangan di parlemen tidak puas terhadap keputusan Mohammad Hatta.

Sukarno dan Mohammad Hatta merupakan pejuang nasionalis yang memiliki perbedaan latar belakang geografis dan kultural. Sukarno merupakan seorang Jawa yang memiliki kemampuan membangkitkan semangat rakyat terutama dalam setiap menyampaikan pidato, dengan dasar ini maka Sukarno dapat menjadi penggerak massa yang memiliki kharisma. Mohammad Hatta merupakan seorang Sumatera yang taat terhadap aturan keagamaan dan pernah menempuh pendidikan di Eropa. Mohammad Hatta diidentikkan mewakili masyarakat luar Jawa, dengan dasar inilah maka Mohammad Hatta memiliki kemampuan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan demokrasi yang disesuaikan dengan tatanan masyarakat Indonesia.

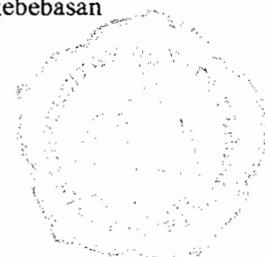
²⁹ Untuk lebih jelasnya lihat dalam Deliar Noer, *op.cit*, hal. 468-474.

Perbedaan yang dimiliki Sukarno dan Mohammad Hatta pada awalnya merupakan modal dasar pemersatu yang terimplementasi dalam Dwitunggal³⁰. Namun setelah Indonesia menerima kedaulatan dari Belanda tanda-tanda keretakan hubungan mulai nampak, karena Sukarno lebih memilih membangun rakyat dengan melandaskan pada pengangkatan harga diri nasional, sehingga dapat dihargai oleh dunia internasional. Mohammad Hatta lebih mementingkan pengembangan perekonomian Indonesia melalui kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam permodalan dengan negara asing berdasarkan prinsip saling menghargai kedaulatan, sehingga perlu didukung dengan pemerintahan yang bertanggung jawab³¹.

Apabila dirunut dari awal kemerdekaan, secara nyata Mohammad Hatta merupakan penggagas terbentuknya tatanan administratif pemerintahan yang demokratis. Kondisi ini terbukti dengan keluarnya maklumat No X 16 Oktober 1945 tentang pembentukan KNIP sebagai badan legeslatif, maklumat politik 1 November 1945 tentang garis besar haluan negara Republik Indonesia, maklumat 3 November 1945 tentang kebebasan pendirian partai politik, maklumat 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer dan penegasan terhadap pentingnya

³⁰ Definisi Dwitunggal dapat diartikan bahwa ada semacam janji diantara Sukarno dan Mohammad Hatta, ketika itu bahwa bila seorang diantara mereka berada di luar kota yang lainnya menghadapi persoalan secara tuntas dan keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab juga bagi yang lain. *ibid*, hal. 283

³¹ Pertentangan Sukarno dan Mohammad Hatta semakin meruncing setelah Mohammad Hatta berpegang pada pemikiran negara demokratis yang konstitusional serta politik kelembagaan, sedangkan Sukarno berpegang pada politik massa revolusioner dan pemerintahan yang tidak dihambat oleh prosedur hukum, perbedaan ini merupakan dua pemikiran yang saling bersaing dan dalam konteks Dwitunggal dan kurang dapat mengimbangi. Makna konstitusional dari pengunduran diri Hatta ialah bahwa keseimbangan ini hancur dan politik massa diberi kebebasan yang tak terkendali. Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, *op.cit.* hal. 279.



pelaksanaan pemilihan umum yang baru terlaksana pada 29 september 1955 untuk memilih wakil rakyat di DPR sedangkan pemilihan yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam konstituante³².

Berawal dari peristiwa ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mohammad Hatta merupakan pribadi yang memegang teguh aturan hukum dan memiliki integritas, walaupun harus mempertaruhkan jabatan yang prestisius sebagai seorang wakil presiden. Hubungan Hatta dengan Sukarno tidak pernah terputus walaupun sudah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden, sehingga perbedaan pendapat dalam pemerintahan tidak ada kaitannya dengan hubungan pribadi yang telah terjalin lama.

B. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sutan Syahrir

Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir merupakan teman semasa dalam organisasi perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, setelah kembali ke Indonesia hubungan mereka semakin kokoh dalam PNI baru. Hatta dan Syahrir memiliki persamaan prinsip dalam pergerakan nasional yang berwawasan demokratis dan mengarah pada pentingnya menerapkan pendidikan politik bagi rakyat. Perjuangan yang dilakukan Hatta dan Syahrir telah membuat kedudukan penjajah Belanda merasa terancam, sehingga mereka diasingkan untuk mempersempit ruang gerakannya. Pada saat penjajahan

³² Perlu diketahui bahwa pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam konstituante dasar hukum yang digunakan adalah lantaran keberadaan UUD masih sementara sehingga pada suatu saat harus diganti dengan UUD yang definitif. Lihat dalam Badruzzaman Busyairi, *op.cit*, hal. 87.

Jepang di Indonesia Mohammad Hatta melakukan kerjasama dengan Jepang, sedangkan Syahrir lebih memilih melakukan gerakan bawah tanah³³ terhadap Jepang. Perbedaan pola perjuangan yang dilakukan telah memperkuat posisi Hatta dan Syahrir dalam bekerjasama mencari sisi kelemahan Jepang untuk meningkatkan nasionalisme Indonesia tanpa dicurigai Jepang.

Sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai, Syahrir telah memberitahukan Mohammad Hatta sepulang dari Saigon bahwa Jepang telah menyatakan kesediaannya untuk menyerah. Dengan keadaan ini Syahrir mendesak Sukarno yang pada saat itu dianggap sebagai pemimpin rakyat, dengan mengatasnamakan rakyat untuk memproklamasikan Indonesia³⁴. Pengamatan Syahrir ini berkembang menjadi suatu desakan yang kuat untuk sesegera mungkin mengadakan proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan pembentukan tatanan pemerintahan yang secara administratif dapat menimbulkan kepercayaan dunia internasional. Dasar tersebut dapat mengacu pada peningkatan kemampuan Indonesia untuk menuju pemerintahan bertanggungjawab, sehingga dapat menghindarkan tekanan pihak Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, melalui kegiatan propaganda dengan menganggap pemerintahan yang baru merupakan pemerintahan fasis.

³³ Gerakan bawah tanah yang pada akhirnya berkembang menjadi kekuatan terbesar adalah yang dipimpin Sutan Syahrir, gerakan ini mengembangkan cabang-cabang di Jakarta (Batavia), Cirebon, Garut, Semarang dan Surabaya dengan menarik dukungan besar dari kaum pemuda terpelajar di kota-kota tersebut. Di wilayah Cirebon dibawah pimpinan Dr Sudarsono gerakan ini membentuk jaringan kerja yang luas, dengan efisien dan memafaatkan kerjasama kaum tani (disetujui oleh Jepang) dibalik organisasi ini lambat laun ia mengorganisir suatu pangkalan kaum tani yang berorientasi revolusioner secara bebas tetapi ekstensif. Lihat dalam George McT Kahin, *op.cit*, hal. 142.

³⁴ J. D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir*, terj: Hasan Basari, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1993, hal. 172.

Langkah pertama yang diambil Mohammad Hatta dalam merubah citra negative tersebut dengan mengeluarkan maklumat No X tanggal 16 Oktober 1945 untuk merubah status KNIP sebagai lembaga legeslatif. Syahrir menjabat sebagai ketua BP-KNIP dengan mengacu pada program kerja yang berusaha mengangkat kepercayaan dunia internasional untuk memberikan dukungannya terhadap penyelesaian sengketa Indonesia dan Belanda. Mohammad Hatta melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan maklumat I November 1945 tentang garis besar haluan negara dalam mempersiapkan ciri dari sebuah negara demokrasi Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat 3 November 1945 tentang kebebasan pendirian partai politik. Berbagai keputusan tersebut merupakan awal terbentuknya warna demokrasi Indonesia yang pertama dan akan menjadi dasar pembentuk kehidupan perpolitikan dalam dan luar negeri.

Pembaharuan yang telah mencapai pada tataran administratif disempurnakan dengan pengesahan maklumat 14 November 1945 tentang pengangkatan Syahrir sebagai perdana menteri pertama yang akan menggantikan kabinet presidensiil. Berbagai tekanan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia merupakan senjata bagi oposisi untuk mendukung gerakan menentang perdana menteri Syahrir, memilih jalur diplomasi dengan didukung oleh kekuatan tentara Indonesia. Gerakan oposisi terhadap Kabinet Syahrir mencapai puncaknya setelah kongres persatuan perjuangan di Purwokerto, dengan menghasilkan program tujuh pasal untuk menuju Indonesia merdeka

100%. Dukungan yang besar terhadap gerakan oposisi³⁵ menyebabkan Kabinet Syahrir pertama meletakkan jabatannya pada tanggal 23 Februari 1946.

Untuk mencegah krisis kabinet yang berkepanjangan Mohammad Hatta mengumumkan kembali penunjukan Syahrir, untuk membentuk kembali kabinet koalisi yang mengacu pada lima pokok program kabinet. Kabinet Syahrir yang kedua merupakan kabinet yang bersifat *zakenkabinet* atau kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli³⁶. Langkah yang diambil oleh Hatta untuk mendukung pembentukan Kabinet Syahrir kedua merupakan suatu bentuk kepercayaan Hatta terhadap Syahrir, yang dianggap mampu menepis semua kendala, sehubungan dengan pencapaian penyelesaian sengketa dengan Belanda melalui jalur diplomasi. Pada saat Kabinet Syahrir kedua, terjadi peristiwa 3 Juli 1946 yang dapat terselesaikan berkat dukungan Sukarno, Hatta dan Jenderal Sudirman. Dengan kejadian ini Sukarno mengambil alih kekuasaan Syahrir sampai 14 Agustus 1946, dan pada 2 Oktober 1946 Syahrir diberi kepercayaan kembali menjadi perdana menteri yang ketiga kalinya.

³⁵ Tan Malaka pada saat itu memang memiliki pengaruh yang besar, dasar yang dipergunakan mengacu pada tiga sumber dukungan yaitu: 1). Martabatnya sendiri serta daya tarik program sosial politik yang dicetuskannya, hal ini menyebabkan teras inti organisasinya bertambah dengan sejumlah pemuda militan dibawah kepemimpinan Sukarni, Adam Malik, Chairul Saleh, Panduwiguna dan Marutu Nitimihardjo; 2). Perasaan anti Syahrir yang bersumber dari para politikus dan perwira militer semasa pendudukan Jepang termasuk para anggota kabinet lama yang pernah dibubarkan oleh presiden Sukarno sehingga merasa bahwa dengan bergabung dengan gerakan oposisi yang hebat dapat kembali memperoleh jabatannya, banyak orang lain yang pernah bekerja dibawah Jepang yaitu para pemimpin militer (EX PETA) dan para pemegang pos tinggi dalam pemerintahan yang merasa kedudukannya terancam oleh gencarnya kampanye anti kolaborator dan orang-orang yang ingin menjatuhkan kelompok Syahrir agar kedudukannya terjamin; 3). Gelombang pasang nasionalisme yang menyebabkan banyak orang tidak mudah menyetujui setiap perundingan dalam bentuk apa saja dengan Belanda, selama pasukan Belanda masih bercokol dibumi Indonesia lebih-lebih jika pasukan mereka terus bertambah. Lihat dalam George Mc.T. Kahin, *op.cit.* hal. 216-217.

³⁶ Lambert Giebels, *op.cit.* hal. 216-217.

Dalam masa Kabinet Syahrir yang ketiga tercapailah kesepakatan perjanjian Linggajati yang mengakui Jawa, Sumatera dan Madura. Mohammad Hatta mendukung hasil Linggajati dengan melakukan pembelaan dihadapan sidang KNIP di Malang untuk mendapatkan ratifikasi. Ditengah kuatnya arus menentang hasil keputusan Linggajati, Mohammad Hatta mampu memberikan kepercayaan dengan mempertaruhkan jabatannya tentang arti penting perjanjian tersebut walaupun pada nantinya terjadi perbedaan penafsiran³⁷. Setelah perjanjian Linggajati, Syahrir meletakkan jabatannya 27 Juni 1947.

Kemampuan diplomasi yang dilakukan Syahrir merupakan modal untuk menjadi seorang terkenal dalam dunia internasional, sehingga presiden Sukarno masih menganggap Syahrir memiliki potensi yang berguna sehingga setelah mundur dari jabatannya diangkat sebagai penasehat yang diperbantukan kepada presiden³⁸. Kemampuan diplomasi Syahrir tidak terlepas dari peranannya yang besar dalam mewujudkan perjanjian Linggajati. Selain itu jika, dalam kelanjutannya menimbulkan kesulitan Sukarno semakin mudah melakukan dengar pendapat dengan Syahrir. Amir Sjarifuddin diangkat sebagai perdana menteri yang baru, dengan alasan bahwa ia tidak pernah bekerjasama dengan Jepang dan pernah menduduki jabatan dalam Kabinet Syahrir.

³⁷ Pada dasarnya kedua belah pihak terjadi perbedaan penafsiran atas istilah pokok yaitu "kerjasama dan federasi". Disatu pihak Belanda menduga bahwa kerjasama dengan republik itu tetap mengandung arti kelanjutan kepemimpinan Belanda dan tanggung jawab bersama dan saling berkonsultasi dalam mendirikan federasi yang akan dibentuk demikian. George McT Kahin, *op.cit*, hal. 259.

³⁸ Rudolf Mrazek, *Syahrir: Politik dan pengasingan di Indonesia*, terj: Mochtar Pabotinggi, Jakarta, Yayasan Obor, 1996, hal. 617.

Pada saat Kabinet Amir Sjarifuddin, terjadi agresi militer yang pertama pada 20 Juli 1947. Syahrir pada saat agresi pertama sedang melakukan kunjungan terhadap Nehru ke India untuk mengangkat pembicaraan terhadap DK-PBB tentang sikap pemerintah Belanda yang tidak menghormati keputusan Linggajati. Syahrir meneruskan kunjungannya ke New York untuk menghadiri sidang DK-PBB dan menyampaikan pidatonya pada 14 Agustus 1947³⁹. Pidato Syahrir tersebut merupakan awal kemenangan diplomasi Indonesia, sebab setelah pidato itu Amerika Serikat mengusulkan pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik yang bersifat independent untuk menjembatani kepentingan tiap anggota. Mohammad Hatta melakukan kunjungannya ke Sumatera dan India. Jika diamati pembagian tugas antara Hatta dan Syahrir merupakan bentuk perjuangan para pemimpin Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari dalam maupun luar negeri.

Sutan Syahrir meneruskan kunjungannya ke berbagai negara⁴⁰ dengan tujuan untuk melakukan perjuangan diplomatis diluar negeri. Langkah yang diambil Syahrir dapat memungkinkan membantu Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Pada saat perjanjian Renville Syahrir datang menghadiri sidang yang terakhir, namun dalam perkembangannya perjanjian Renville menyebabkan Kabinet Amir Sjarifuddin melepaskan jabatannya. Untuk menghindarkan dari krisis kabinet, Sukarno

³⁹ Isi pidato Syahrir menganjurkan supaya komisi yang berwenang diangkat oleh DK-PBB sebagai arbiter antara Belanda dan Republik Indonesia, Syahrir menuntut agar pasukan Belanda ditarik mundur ke garis (demarkasi) tanggal 14 Oktober 1947, inilah garis yang disetujui pasukan Belanda dan Republik Indonesia dalam persetujuan Linggajati. *Ibid*, hal. 624.

⁴⁰ Syahrir melakukan kunjungannya ke berbagai Negara seperti Inggris, Paris, Kairo, Pakistan, India, Singapura dan Camberra, dan baru kembali ketanah air pada 13 Januari 1948 dan langsung mengikuti sidang terakhir konfrensi Renville. Lihat dalam Rudolf Mrazek, *op.cit*, hal. 624.

menunjuk Hatta sebagai formatur kabinet presidensiil, sedangkan Syahrir masih memegang jabatan semula. Amir Sjarifuddin telah berubah sikap terhadap presiden Sukarno, Kabinet Hatta dan Syahrir yang merupakan kawan satu partai. Posisi Amir Sjarifuddin sekarang telah menjadi seorang oposisi dan tergabung dalam pemberontakan komunis Madiun 1948⁴¹.

Pada agresi militer yang kedua Sukarno, Syahrir dan Hatta serta beberapa pemimpin Indonesia menjadi tawanan pemerintah Belanda, selama empat hari mereka ditawan dalam istana dan dipisahkan dalam pengasingan⁴². Pada masa pengasingan ada tawaran dari dua utusan Belanda untuk menemui perdana menteri Belanda Drees namun Mohammad Hatta menolaknya, sedangkan Syahrir menyanggupinya tanpa kembali untuk memberikan laporan. Mohammad Hatta merasa kecewa dengan sikap Syahrir yang mau menerima tawaran tersebut, karena kunjungannya tersebut merupakan pertemuan dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau sebagai penasihat presiden Sukarno. Kunjungan Syahrir tersebut dapat dikatakan sebagai permulaan keretakan hubungannya dengan Hatta, Syahrir menyampaikan alasannya menyetujui pertemuannya dengan Drees karena ia merasa bukan lagi sebagai wakil pemerintah republik sehingga dapat berbuat bebas⁴³.

⁴¹ Perubahan sikap ini telah membuat Syahrir berpandangan bahwa Amir Sjarifuddin memiliki tambahan filosofis dan religius yang tidak kuat, Rudolf Mrazek, *op.cit.* hal. 666.

⁴² Para pemimpin RI pada mulanya ditawan dalam istana kepresidenan, kemudian pada tanggal 22 Desember 1948 mereka dibawa ke Prapat (Sukarno, Salim dan Syahrir), dan ke Bangka (Hatta, Assaat, Abdul Gaffar Pringgodigdo, Ali Sastroamidjojo, Surjadarma, dan Natsir). Pada tanggal 5 Februari 1949 Sukarno dan Salim dipindahkan ke Bangka ke tempat tahanan Hatta (sedangkan Syahrir diperbolehkan terus ke Jakarta). Deliar Noer, *op.cit.*, hal 340.

⁴³ Rudolf Mrasek, *op.cit.*, hal. 686.

Pada saat ratifikasi hasil persetujuan KMB yang dihasilkan oleh delegasi Hatta dalam KNIP fraksi partai sosialis Indonesia menolak hasil KMB, dengan alasan bahwa bukan Syahrir yang melaksanakannya dengan sukses⁴⁴. Syahrir pernah mendapat tawaran dari Mohammad Hatta untuk diangkat sebagai penasehat delegasi pada KMB Belanda dan Indonesia yang terakhir di Den Haag, namun Syahrir menolak⁴⁵. Perubahan sikap Syahrir ini dapat membawa pada sebuah analisa bahwa Syahrir memang sudah tidak sependapat dengan Mohammad Hatta. Dasar ketidaksepahaman Hatta dan Syahrir terletak pada posisi Indonesia dalam penentuan arah ekonomi yang dianggap Syahrir tidak dapat secara bebas melakukan kebijakan luar negerinya⁴⁶.

Hubungan Hatta dan Syahrir tetap tidak membaik karena pada masa Kabinet Sukiman, Syahrir ingin bertemu dengan Hatta, namun Hatta menghindar dengan lebih memilih menghadiri PON⁴⁷. Penolakan Hatta merupakan dampak negative dari sikap Syahrir pada masa lalu, yang tidak menghargai perjuangannya dalam menegakkan kedaulatan Indonesia atas Belanda. Berawal dari gambaran tentang hubungan Hatta dengan Syahrir dapat ditarik kesimpulan, bahwa persamaan pandangan pada masa perjuangan merupakan modal utama untuk bersama-sama berjuang, namun setelah segala persamaan tujuan tercapai dan menjadi modal dasar pembentukan tatanan administratif pemerintahan demokratis, apakah hubungan antara Syahrir dan

⁴⁴ Mohammad Hatta, *Memoir*, *op.cit*, hal. 559. Foto saat Hatta menghadiri pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda lihat dalam lampiran 15 halaman 169.

⁴⁵ Rudolf Mrasek, *op.cit*, hal. 703.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 709.

⁴⁷ Mavis Rose, *op.cit*, hal. 300.

Hatta benar-benar semakin memburuk. Pertentangan Hatta dan Syahrir dalam pemerintahan hanyalah berawal dari perbedaan sikap yang berpangkal pada penolakan emosional, namun secara psikologis hubungan dan ikatan masa lalu tetap menjadi prioritas sebagai bagian dari warganegara.

Sukarno, Mohammad Hatta dan Syahrir merupakan tokoh utama yang memiliki keahlian masing-masing dalam membawa kelangsungan Indonesia sesudah merdeka. Mohammad Hatta merupakan seorang nasionalis religius yang berasal dari luar Jawa sehingga dianggap mewakili masyarakat luar Jawa, Sukarno merupakan seorang Jawa yang nasionalis dan memiliki kharisma dalam masyarakat Indonesia, sedangkan Syahrir merupakan seorang yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Dasar-dasar yang dimiliki oleh Sukarno, Mohammad Hatta dan Syahrir merupakan modal untuk menuju pembentukan warna pemerintahan Indonesia. Dengan demikian kepemimpinan mereka merupakan suatu tritunggal, yang saling melengkapi untuk meraih simpati rakyat Indonesia dan negara tetangga. Keadaan ini dibuktikan dalam perjuangan yang dilakukan bersama antara Sukarno, Hatta dan Syahrir telah mencapai pada pengakuan kedaulatan Indonesia secara *defacto* dan *deyure*, namun dalam perkembangan waktu terjadi juga perbedaan pendapat diantara mereka yang merupakan sebuah dinamika dalam proses pembentukan sejarah, sehingga perbedaan pendapat harus dapat ditempatkan dalam kapasitas masing-masing demi tegaknya pemerintahan yang demokratis.

BAB IV

PENGARUH NASIONALISME MOHAMMAD HATTA

ANTARA 1945-1956

A. Dalam Bidang Politik

Perasaan nasionalisme Mohammad Hatta telah muncul semenjak keikutsertaannya dalam berbagai organisasi pergerakan baik di dalam maupun di luar negeri yang berorientasi pada pencapaian kemerdekaan Indonesia. Sepulang dari negeri Belanda, Mohammad Hatta bergabung dalam organisasi PNI baru bersama Sutan Syahrir. Tujuan organisasi PNI baru berorientasi pada pentingnya pembentukan kesadaran politik tanpa tergantung terhadap pemimpin. Konsep dasar tersebut, mengacu pada pentingnya pembentukan pola berfikir rakyat dengan mengutamakan penanaman pendidikan politik bagi setiap pemuda bangsa, agar tercipta pemimpin-pemimpin baru yang memiliki intelektual kebangsaan.

Dasar pendidikan politik yang ditanamkan Mohammad Hatta berlanjut setelah kemerdekaan, dengan memfokuskan pada pentingnya pembentukan kesadaran rakyat dalam partisipasinya sebagai pendukung terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Pemikiran Mohammad Hatta untuk menuju pada pencapaian pendidikan politik diawali dengan penerapan hak-hak asasi konstitusional yang terdapat pada UUD 1945 pasal 28, yang mengacu pada pentingnya memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Langkah selanjutnya Mohammad Hatta melakukan perubahan

terhadap susunan dan kedudukan KNIP dengan menghidupkan lembaga legeslatif melalui maklumat No X tertanggal 16 Oktober 1945. Selain itu Hatta menghidupkan suasana demokrasi dengan memberikan kebebasan pendirian partai politik¹, yang tertuang dalam maklumat 3 November 1945 dan berperan dalam melakukan perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer melalui maklumat 14 November 1945. Segala yang dilakukan Mohammad Hatta tentang tujuannya untuk mencapai pembentukan pemerintahan demokratis sangat kompleks, mulai dari pentingnya menghargai kebebasan berpendapat sampai penghidupan lembaga legislatif sebagai interpretasi terwakilinya suara rakyat.

Dukungan rakyat terhadap maklumat 3 November 1945 sangat besar, terlihat dalam kebebasan pendirian partai politik² yang memiliki harapan bahwa rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui representatif lembaga perwakilan. Pembentukan tatanan hukum kenegaraan mengacu pada persamaan di depan hukum menuju harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan pendidikan politik bagi rakyat diharapkan dapat berjalan secara konsisten, asalkan muncul kemauan dari pemerintah partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan tatanan pemerintahan demokrasi.

¹ Pada dasarnya kelahiran partai politik merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1982, hal. 159.

² Partai politik yang didirikan dalam rangka menyikapi pemberlakuan maklumat 3 November 1945 lihat dalam Padmo Wahjono, *Berserikat Berkumpul dan Mengeluarkan Pikiran*, ada dalam Tim, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, Jakarta, LP3ES, 1995, hal. 43.

Pendidikan politik³ yang dilaksanakan partai politik dan didukung pemerintahan demokratis seharusnya berskala nasional tanpa berpihak pada satu golongan. Konsep tersebut merupakan keharusan bagi setiap bangsa untuk mewujudkan kesadaran sebagai warganegara. Pelaksanaan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia merupakan syarat terpenting dalam mewujudkan perimbangan kontrol terhadap pemerintahan yang memiliki legitimasi untuk mengatur daerahnya secara bertanggung jawab. Penciptaan kerangka kerja untuk mempercepat pengembangan daerah dapat menciptakan kewibawaan dan menjaga kestabilan nasional, terutama bidang sosial ekonomi kerakyatan dan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik dalam kenyataannya mengalami berbagai hambatan terutama dalam kurun waktu 1945-1949. Bangsa Indonesia masih berkonsentrasi dalam berbagai masalah seperti penyelesaian sengketa dengan Belanda untuk memperoleh pengakuan kedaulatan, belum tersedianya pegawai pemerintahan yang memiliki profesionalitas karena kurangnya pengalaman, selain itu bangsa Indonesia sedang mencari format baru tatanan pemerintahan untuk mendukung terciptanya kepercayaan dunia internasional. Dukungan terhadap pemerintah Indonesia semakin besar setelah pemerintah berhasil menghancurkan gerakan oposisi komunis Madiun, tanpa bantuan negara lain ditengah tekanan dari pihak Belanda. Keberhasilan tersebut

³ Menurut R Hayer pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Selain itu ada pendapat yang mengacu pada pendefinisian pendidikan politik sebagai upaya edukatif intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis / moral dalam pencapaian tujuan-tujuan politik. Dicuplik dari Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hal. 64.

membuktikan bahwa penerapan oposisi yang anarkis dapat merusak tatanan demokratis, sehingga secara diplomatis keberhasilan pemerintah dalam menghancurkan gerakan komunis Madiun merupakan tahap baru sebagai modal perolehan dukungan dari negara-negara tetangga, terutama kepercayaan Amerika Serikat untuk membantu mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia melalui jalur diplomatis.

Perkembangan pendidikan politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1956 tidak mengalami peningkatan karena seringnya krisis kabinet yang bermula dalam pertikaian kepentingan elit partai, sehingga berdampak pada penarikan anggota partai yang duduk dalam kabinet. Dengan seringnya terjadi krisis kabinet telah memberikan bukti bahwa penerapan kepentingan partai lebih menjadi prioritas, daripada pencapaian program kabinet yang harus mengutamakan kepentingan rakyat. Disamping itu, elit politik Indonesia kurang menempatkan diri demi kepentingan negara, sehingga lebih mementingkan kolompoknya. Masalah dalam kabinet yang paling mencolok pada saat penandatanganan MSA (*Mutual Security Aids*) oleh Subardjo sebagai menteri luar negeri masa Kabinet Sukiman, tanpa melakukan konsultasi dengan anggota kabinet lainnya⁴. Perjanjian MSA dengan Amerika Serikat telah membawa Indonesia dalam suatu ikatan politik luar negeri yang tidak sepaham dengan dasar politik luar negeri bebas aktif, karena harus memperhatikan dan memberikan prioritas kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.

⁴ Deliar Noer, *op.cit*, hal 448-449.

Krisis dalam ketentaraan Indonesia yang menyebabkan menurunnya citra tentara dalam mewujudkan profesionalitas dan netralitas politik. Kelemahan ini lebih disebabkan karena kurangnya penegakan kode etik kedisiplinan dalam ketentaraan. Selain itu terjadi penolakan yang dilakukan oleh presiden Sukarno terhadap hasil pembahasan RUU pembatalan Uni Indonesia-Belanda semasa Kabinet Burhanuddin Harahap. Walaupun MA telah menyatakan hasil pembahasan RUU tersebut sah demi hukum, penolakan oleh presiden Sukarno merupakan kenyataan terhadap lemahnya penegakan keputusan yang dikeluarkan lembaga yudikatif.

Kompleksitas permasalahan ini semakin diperparah dengan menurunnya tanggung jawab dalam kepegawaian yang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok. Keadaan ini ditambah dengan adanya korupsi keuangan negara, sehingga melemahkan kewibawaan pemerintah, dan berdampak pada menurunnya kepercayaan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Mohammad Hatta berpendapat bahwa pergolakan yang dilakukan oleh kelompok regional dalam masyarakat di daerah, bukannya reaksi terhadap *Jawaisme* tetapi terhadap *Jakartaisme*⁵. Dasar pemikiran Hatta mengacu pada pentingnya mengadakan evaluasi, terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah, sehingga perlu menggunakan skala prioritas dengan melihat kebutuhan pemerintah daerah.

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama, yang menjadi dasar dalam

⁵ Boyd R Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R Compton*, Terj: Hamid Basyaib, Jakarta, LP3ES, 1992, hal 89

mewujudkan tatanan pemerintahan demokratis. Mohammad Hatta selaku wakil presiden menyampaikan pesan dan harapannya kepada rakyat, bahwa pemilihan umum yang pertama bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat⁶. Pelaksanaan pemilihan umum memang berjalan lancar namun dibalik itu Mohammad Hatta memiliki kekecewaan terhadap hasil pemilihan umum, karena didalam memilih wakil rakyat di parlemen partailah yang paling berwenang⁷. Sistem pemilihan ini telah menyebabkan kurangnya penyaluran aspirasi rakyat karena dapat dimungkinkan wakil rakyat di parlemen tidak mengenal rakyat pemilih secara dekat, sehingga dapat menimbulkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap pemilih yaitu rakyat, tetapi tanggung jawab yang muncul ada pada tingkatan partai yang mengangkatnya sebagai wakil rakyat.

Presiden Sukarno dalam pidatonya tanggal 28 Oktober 1956 menginginkan terbentuknya demokrasi terpimpin yang akan mengubur partai politik⁸. Berawal dari gagasan Sukarno tersebut, Mohammad Hatta merasa perlu melakukan interopeksi diri terhadap keputusannya, untuk tetap mempertahankan posisinya ataukah melakukan oposisi, dengan memperjuangkan pendidikan politik yang dapat menumbuhkan kesadaran rakyat sebagai pemegang kekuasaan, walaupun harus melepaskan jabatannya. Mundurnya Hatta dalam pemerintahan telah membuka kesempatan bagi

⁶ Badruzzaman Busyairi, *op.cit*, hal 97.

⁷ Lihat dalam Mavis Rose, *op.cit*, hal 308-309. Perlu diketahui bahwa sistem pemilihan umum menggunakan sistem perwakilan proposional, dimana prosentase kursi dibadan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada setiap kontestan disesuaikan dengan perosentase jumlah suara yang diperoleh setiap kontestan itu sendiri. Badruzzaman Busyairi, *op.cit*, hal 923.

⁸ Mavis Rose, *op.cit*, hal 310

Sukarno untuk menerapkan konsepsi politik yang berbeda dengan konsepsi politik Mohammad Hatta, terutama dalam orientasi pendidikan politik dengan mengutamakan keputusan bersama terlepas dari pengaruh pemimpin. Dasar pemikiran tentang pentingnya pendidikan politik bagi terwujudnya kedaulatan rakyat harus bersumber dari kemampuan pemerintah, dalam menerapkan suasana yang demokratis dan didukung oleh rakyat. Hal ini dilakukan agar tercapai suatu sinergi timbal balik antara peningkatan kewibawaan pemerintah dengan tercapainya partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pelaksanaan pendidikan politik yang diharapkan Mohammad Hatta dengan didukung penerapan demokrasi di Indonesia kurang mendapat respons positif dari berbagai pihak terutama elit politik. Presiden Sukarno sendiri kurang memiliki kesepahaman terhadap konsep pendidikan politik dari Mohammad Hatta karena dianggap membawa ketidakstabilan dalam pemerintahan terutama sering terjadinya krisis kabinet, akibat pertentangan antar partai demi kekuasaan belaka. Penciptaan pendidikan politik yang diidam-idamkan Hatta memang tidak mengalami keberhasilan, dengan dasar inilah maka Hatta mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Mundurnya Hatta dari jabatannya sebagai wakil presiden dalam pemerintahan perlementer telah membuktikan diri bahwa ia merupakan seorang pejuang demokrasi yang memiliki konsistensi dengan berdasarkan pada realita. Berawal dari ketegasan Hatta dalam menjalankan cita-citanya untuk menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maka Mohammad Hatta

merupakan seorang nasionalis Indonesia dengan latar belakang kehidupan yang konsisten berdasarkan konstitusi.

B. Dalam Bidang Ekonomi

Dasar perekonomian Indonesia mulai tertata semenjak ditetapkannya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar tersebut merupakan landasan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, terutama bidang ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Tatanan tersebut seharusnya dimulai dari pembentukan pemerintahan berdasarkan hukum sehingga menumbuhkan kepercayaan rakyat dengan pemberian kebebasan terhadap perkembangan iklim usaha dalam berinvestasi dan memberikan dukungan terhadap persaingan sehat sehingga berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi rakyat.

Landasan perekonomian bangsa Indonesia haruslah bertumpu pada pentingnya penciptaan kesejahteraan rakyat yang berdasar pada Pancasila, sebab pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada usaha kerakyatan. Dalam usaha ini posisi pemerintah merupakan pembuat aturan umum yang harus melindungi keberadaan ekonomi rakyat, terutama badan usaha milik koperasi yang harus memberikan

penekanan pada pencapaian keadilan sosial⁹ dalam ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan Mohammad Hatta merupakan ahli ekonomi yang merupakan tokoh penting dalam merumuskan dan membentuk tatanan perekonomian Indonesia. Bukti peranan Hatta dalam bidang ekonomi terimplementasi dalam perumusan pasal 33 UUD 1945¹⁰ sebagai kerangka perekonomian Indonesia yang berdasar asas kekeluargaan, mempertegas posisi pemerintah dalam perekonomian nasional, penciptaan tujuan perekonomian nasional yang berusaha memajukan kemakmuran rakyat.

Mohammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1946 mendirikan Bank Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan mata uang rupiah, akan tetapi usaha tersebut baru terlaksana pada bulan Oktober dengan dikeluarkannya mata uang Indonesia sebagai alat pembayaran dalam negeri, posisi mata uang NICA yang beredar di Indonesia mulai tergeser¹¹. Penciptaan sistem mata uang Indonesia telah merangsang perputaran roda perekonomian

⁹ Keadilan Sosial merupakan sebuah definisi yang mengarah pada pentingnya mewajibkan orang-orang sebagai warga negara untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara, sehubungan dengan tugas negara untuk memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Para warga negara bukan saja berhak mengharapkan bantuan dari negara berupa tegaknya *the rule of law* yang memungkinkan mereka menikmati hak-hak mereka dengan aman, dan tersediannya barang serta jasa keperluan hidup seperlunya, tetapi juga wajib memberikan sumbangan mereka kepada negara agar negara dapat bertahan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain keadilan sosial mewajibkan para warganegara untuk memikirkan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangan mereka sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum. Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Jakarta, CV Rajawali, 1985, hal. 32-33

¹⁰ 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan; 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tim, *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, hal 9.

¹¹ Lambert Giebels, *op.cit*, hal 426.

Indonesia karena dengan pengesahan mata uang Indonesia sebagai alat pembayaran, memperjelas kedudukan pemerintah yang memiliki patokan nilai tukar rupiah dengan mata uang lainnya untuk urusan interaksi ekonomi dengan pihak asing.

Perkembangan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan kurang begitu stabil, karena sengketa dengan Belanda yang belum mengakui kedaulatan Indonesia secara menyeluruh. Puncak dari kegagalan diplomasi dengan Belanda dimulai dalam pelaksanaan agresi militer I. Dampak dari agresi ini telah membawa pada meningkatnya kemerosotan ekonomi Indonesia, terutama setelah disetujuinya perjanjian Renville dengan menguasai daerah-daerah strategis di Indonesia sehingga menyebabkan pengungsian ke daerah republik.

Dalam menghindari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan akibat perjanjian Renville, Mohammad Hatta ditunjuk oleh presiden Sukarno untuk membentuk sebuah kabinet. Mohammad Hatta mengambil langkah strategis untuk menyusun tatanan perekonomian yang stabil dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam pemerintahannya¹², yang didukung oleh pembentukan profesionalitas kepegawaian dan ketentaraan. Penerapan tatanan perekonomian dimasa Mohammad Hatta memimpin kabinet berorientasi pada pembenahan perekonomian kedalam dengan membentuk panitia pemikir siasat ekonomi (*The Brain Trust*) yang bertujuan meningkatkan pembentukan produksi keperluan rakyat sehingga dapat berdampak pada peningkatan daya

¹² Mavis Rose, *op.cit*, hal 248.

beli. Dasar pemikiran ini dipertegas dengan pencanangan program lima tahun pembangunan yang ditetapkan pada 12 April 1947, dengan mengagendakan peningkatan kemakmuran bagi rakyat melalui intensifikasi produksi; mendorong perdagangan internasional; meningkatkan standar hidup dan kemampuan seluruh rakyat¹³.

Dasar rencana ekonomi dalam Kabinet Mohammad Hatta merupakan sebuah penyesuaian terhadap realita orientasi kinerja Kabinet Hatta terbukti dalam keberhasilan penerapan rencana perekonomian dengan memperluas sawah sampai 75.000 hektar, membentuk koperasi pertanian dan pengendalian harga dengan mencegah penimbunan¹⁴ ditengah blockade ekonomi Belanda dan gerakan oposisi komunis Madiun terhadap pemerintah. Keberhasilan Mohammad Hatta dalam menstabilkan perekonomian Indonesia telah menimbulkan sebuah pandangan tentang pentingnya pengembalian fungsi pemerintah sebagai pelaksana terwujudnya pertahanan keamanan, penegakkan keadilan, pelaksanaan pekerjaan pranata-pranata umum¹⁵.

Pencapaian keberhasilan dalam peningkatan perekonomian masa Mohammad Hatta, tidaklah berlangsung lama karena Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, dengan melakukan penewanan terhadap

¹³ Pencapaian program ekonomi dalam kabinet Hatta lebih mengarah pada pentingnya peningkatan upah minimum yang didasarkan pada keperluan hidup terutama harga beras sebagai makanan pokok; peningkatan perumahan rakyat, serta mempertegas pasal 33 UUD 1945 tentang perusahaan negara serta monopoli negara meliputi usaha listrik, gas, air bersih, kereta api, trem, pos, telegraf, telepon, perbankan dan pertambangan, disamping itu dikelola perusahaan campuran antara pemerintah dan swasta sedangkan koperasi dapat dibantu oleh modal asing, buruh Indonesia dan pemerintah, semua perusahaan swasta yang besar diawasi oleh pemerintah hanya perusahaan swasta yang kecil bebas dari pengawasan. Deliar Noer, *op.cit*, hal 300

¹⁴ Mavis Rose, *op.cit*, hal 254

¹⁵ Sony Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta, Kanisius, 1996, hal 181.

beberapa pemimpin Indonesia. Setelah disetujuinya perjanjian *Roem-Royen* para pemimpin Indonesia dibebaskan sehingga tidak lama sesudah itu pihak Indonesia dan Belanda mengadakan persetujuan perjanjian KMB dengan agenda pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Dalam putusan KMB, Belanda menginginkan posisi strategis dalam hubungan perdagangan dengan Indonesi. Posisi Indonesia dalam urusan ekonomi masih mendapat tekanan pengaruh dari Belanda yang memang membutuhkan sumber pemasukan keuangan dari Indonesia. Begitu juga Belanda mempertahankan Irian (Papua), sebagai sarana memperoleh kekayaan alam yang nantinya dapat mendukung pembangunan negeri Belanda.

Semasa RIS, Mohammad Hatta berpandangan untuk menarapkan profesionalitas dalam kepegawaian dan ketentaraan, dengan melihat rakyat sebagai pemegang kedaulatan¹⁶. Dalam bidang ekonomi, Mohammad Hatta membentuk dewan ekonomi dan keuangan agar tercapai peningkatan modal dalam negeri melakukan penguatan nilai tukar mata uang dalam negeri. Langkah yang diambil Mohammad Hatta membawa pada peningkatan perekonomian Indonesia sehingga dalam bulan Agustus simpanan luar negeri Indonesia meningkat¹⁷.

¹⁶ Mavis Rose, *op.cit*, hal 294

¹⁷ Langkah yang diambil Hatta dalam penguatan ekonomi Indonesia mengacu pada deficit anggaran yang begitu besar termasuk keharusan membayar utang terhadap pemerintah Belanda maka pada tanggal 13 Maret 1950 Hatta menerapkan sistem nilai tukar mata uang dari ratio 1:1 antara mata uang Belanda dengan mata uang Indonesia menjadi 1:3 sejauh menyangkut urusan ekspor-import dan transaksi lain, pada tanggal 19 Maret Hatta juga menerapkan program pemotongan terhadap mata uang kertas F 2,5 keatas separuhnya dan ditukar dengan mata uang kertas dan obligasi baru, seluruh deposito bank yang jumlahnya melebihi F 400 harus dibagi dua yang setengah masuk kepada pemerintah sebagai pinjaman wajib. *ibid* hal 294-295

Pada 17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali pada negara kesatuan yang menggunakan sistem parlementer. Pada masa ini kondisi perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh hasil perjanjian KMB, sehingga Belanda memiliki peluang dalam melakukan investasi di Indonesia dalam sektor perkebunan, perhubungan antar pulau dengan orientasi pengembangan industri perkapalan, pertambangan dan perbankan. Berawal dari keadaan ini, Sutan Syahrir berpendapat bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang dipenuhi modal asing dan ternyata lebih banyak daripada pengusaha pribumi, merupakan suatu pertanda kembalinya perekonomian Indonesia seperti pada masa kolonial¹⁸. Berawal dari pandangan Sutan Syahrir tersebut, seharusnya melihat realita bahwa perkembangan perekonomian Indonesia membutuhkan kesiapan terhadap sumber tenaga kerja yang profesional, untuk itu tidak ada salahnya jika berbagai sektor perekonomian melakukan kerjasama dengan pihak asing, sehingga dapat dimungkinkan muncul pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia, agar dapat menggantikan posisi tenaga kerja asing secara mandiri dan bertahap¹⁹.

Pengembangan perekonomian Indonesia dalam tahun 1950 setelah ditetapkannya sistem ekonomi Indonesia nasional dalam berbagai bidang mulai nampak perubahan, terutama dalam rangka peningkatan kepercayaan

¹⁸ Sutan Syahrir, *Sosialisme Indonesia Pembangunan: Kumpulan Tulisan Sutan Syahrir*, Jakarta, LEPPENAS, 1982 hal 247

¹⁹ Dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang berskala nasional muncul suatu gagasan tentang konsep *Indonesianisasi* dalam bidang ekonomi, konsep ini mengacu pada perubahan kebijakan ekonomi dalam masa revolusi dengan perubahan dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional, dalam pelaksanaan *Indonesianisasi* ini memiliki tiga dimensi : perluasan (diversifikasi) produksi sehingga tidak tergantung pada hasil ekspor bahan mentah; pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran; pengambilalihan kontrol dan manajemen dari perusahaan-perusahaan asing (Barat dan Cina) ketangan perusahaan nasional. Hebert Feith, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, Ithaca, Cornell University Press, 1962, hal 373-374

terhadap pengusaha pribumi untuk mempercepat pergerakan ekonomi kerakyatan. Pada masa Kabinet Ali I, Iskaq Tjokrohadisurjo mengeluarkan sebuah program ekonomi dengan melakukan penjualan sistem lisensi impor bagi para pengusaha pribumi namun dalam pelaksanaannya ada penyelewengan²⁰. Kegagalan dalam program tersebut disebabkan kurangnya kesadaran pengusaha pribumi, sehingga program ekonomi tersebut hanyalah sebuah rencana ekonomi, karena dalam pemberian lisensi didasarkan pada kedekatannya dengan elit politik tanpa melihat kredibilitas perusahaan tersebut.

Perdagangan gelap yang dilakukan oleh ketentaraan Indonesia merupakan sebuah kelemahan sekaligus tuntutan untuk meningkatkan pemasukan kas tentara, terutama dalam pemenuhan pembiayaan gaji dan perbaikan perumahan. Dengan kejadian ini, dapat ditarik sebuah gambaran tentang kondisi perekonomian Indonesia yang memang mengalami kemerosotan anggaran terutama dalam pemenuhan kesejahteraan tentara sehingga harus diusahakan sendiri. Keikutsertaan tentara dalam perdagangan telah menimbulkan pandangan negatif terhadap lembaga ketentaraan yang seharusnya independent, karena merupakan alat negara dengan tugas mendukung keberadaan pemerintahan bertanggung jawab. Dalam

²⁰ Dalam kenyataannya penjualan sistem lisensi import untuk meningkatkan pengusaha pribumi dijual kembali pada pengusaha Cina tanpa sepengetahuan pemerintah, sistem ini terkenal dengan sistem *Ali-Baba* dimana *Ali* yang diumpamakan pengusaha pribumi menerima lisensi import karena dekat dengan para politisi bekerjasama dengan *Baba* diumpamakan sebagai orang Cina yang bertugas menjalankan usaha tersebut. Pertumbuhan perusahaan import Indonesia dari 250 pada tahun 1950 menjadi antara 4000 dan 5000 pada bulan November 1954 sama sekali tidak membantu perbaikan ekonomi karena hanya 1% diantaranya merupakan perusahaan yang sungguh-sungguh sedangkan 4 % bersifat marjinal. Adnan Buyung Nasution, *op.cit*, hal. 263

penyelesaian permasalahan ini seharusnya pemerintah berkoordinasi dengan pemimpin komando militer nasional untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kenyataan di lapangan dan mengembalikan kembali kewibawaan pemerintah dan tentara Indonesia²¹.

Permasalahan korupsi yang dilakukan oleh beberapa elit politik Indonesia merupakan hambatan dari dalam untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Penyelesaian kasus korupsi pada masa itu kurang memiliki ketegasan karena ada unsur politis yang seakan-akan melindungi nama baik partai yang sedang bersiap-siap menghadapi pemilihan umum²².

Perkembangan koperasi mengalami kemerosotan karena sering terjadinya krisis kabinet sehingga mengarah pada perubahan kebijakan, dan memperlemah kestabilan perkembangan koperasi. Keanggotaan koperasi yang seharusnya berdiri diatas semua golongan, telah berubah karena adanya persaingan elit partai yang menarik simpati dari keanggotaan koperasi, yang menyebabkan pertentangan antar anggota koperasi²³. Penyalahgunaan koperasi sebagai lembaga penarik dukungan masa pemilih, telah

²¹ Peristiwa ini diawali tahun 1954 panglima Indonesia bagian Timur Kolonel Warouw dan komandan resimen di Sulawesi Utara mengizinkan penyelundupan kopra secara besar-besaran untuk membiayai pembiayaan anggaran operasi militer dan program pemukiman kembali, dalam bulan februari 1955 terjadi perpecahan antara yayasan kopra yang berpusat di Jakarta dengan yayasan kelapa Minahasa yang didukung oleh Garnizun setempat, di daerah Sumatera terjadi juga pengiriman sejumlah besar karet dan kopi keluar negeri dengan terlebih dahulu meminta izin dari panglima Sumatera Utara, alasan dilakukan penyelundupan ini untuk membayar gaji tentara. Lihat dalam Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hal 185

²² Kasus korupsi yang dituduhkan pada Mr Iskaq Tjokroadisudirjo, ia sebenarnya ingin pulang ke Jakarta tetapi dijemput di Singapura oleh Lim Kay, atas perintah pimpinan pusat PNI yang merasa takut bila reputasi PNI menjelang pemilihan umum jatuh, lantaran kasus korupsi yang melibatkan salah seorang pemimpinnya. Badruzzaman Busyairi, *op.cit*, hal 54

²³ G Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia: Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.93.

memperlemah pencapaian tujuan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Pencapaian keadilan sosial yang dicita-citakan Momammad Hatta dengan terlebih dahulu menciptakan kebebasan yang berdasarkan konstitusi kurang mengalami keberhasilan. Kelemahan mendasar terletak dari pihak-pihak terkait seperti para pegawai dan politisi, yang lebih mementingkan kemenangan kelompoknya sendiri baik melalui pemberian lisensi import bagi pengusaha pribumi tanpa melihat kredibilitas perusahaan. Penyalahgunaan wewenang kekuasaan territorial untuk perdagangan gelap telah merugikan keuangan negara, walaupun untuk alasan mencukupi kebutuhan personil. Penyembunyian keburukan tokoh partai yang melakukan korupsi selama menjabat dalam pemerintahan agar tidak berdampak terhadap menurunnya citra partai, serta munculnya perebutan pencarian dukungan terhadap partai melalui penguasaan gerakan koperasi yang berada di daerah sehingga mematikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Tindakan yang tidak menunjukkan semangat membangun perekonomian rakyat telah menurunkan citra pemerintah, karena dianggap kurang menegakkan konstitusi secara konsisten. Serangkaian kelemahan tersebut membawa pada meningkatnya kesenjangan sosial bagi rakyat, terutama bidang ekonomi. Berawal dari keadaan ini dapat dimungkinkan timbul gejolak di berbagai daerah, karena kurangnya ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegakkan konstitusi kenegaraan sehingga dapat mengancam stabilitas negara.



BAB V

KESIMPULAN

Mohammad Hatta merupakan pejuang nasional yang memiliki integritas kepemimpinan dengan mengedepankan profesionalitas berdasarkan konstitusi kenegaraan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan rakyat. Dasar-dasar ini dapat dibuktikan dengan berbagai tindakan nyata Hatta selama dalam pemerintahan dengan membentuk tatanan demokrasi yang berdasar konstitusi kenegaraan. Dari bab II, III dan IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mohammad Hatta berperan dalam membentuk tatanan pemerintahan demokratis di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat dan negara tetangga melalui berbagai peran yang dikeluarkannya, antara lain mengeluarkan maklumat No X 16 Oktober 1945, maklumat 1 November 1945, maklumat 3 November 1945, maklumat 14 November 1945, serta adanya janji dari pelaksanaan pemilihan umum untuk menetapkan wakil rakyat di KNIP.

Dalam penerapan politik luar negeri Indonesia, Hatta berorientasi pada politik bebas aktif yang memfokuskan pada penciptaan hubungan luar negeri dengan dasar saling menghargai dan menguntungkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik luar negeri yang bebas aktif telah mendorong beberapa negara tetangga untuk menaruh kepercayaan terhadap perjuangan diplomasi Indonesia seperti India.

Setelah perjanjian Renville posisi perekonomian Indonesia mengalami kesulitan karena Belanda mempersempit daerah republik dengan garis Van Mook,

melakukan blockade ekonomi, munculnya masalah pengungsian penduduk dan kedatangan tentara hidjrah yang mendukung republik. Berbagai permasalahan yang ada merupakan hambatan bagi Kabinet Hatta untuk meningkatkan pemasukan keuangan, Mohammad Hatta mencanangkan program pengembangan profesionalisme dalam kepegawaian dan ketentaraan.

Langkah yang diambil Hatta terimplementasi dalam program RE-RA untuk melakukan pendemisioneran tentara Indonesia yang disalurkan dalam lapangan pekerjaan lainnya. Pelaksanaan program RE-RA mengalami hambatan dari pihak FDR yang didukung komunis Muso dengan tuntutan untuk merombak kabinet. Puncak oposisi yang dilakukan terimplemantasi dalam pemberontakan komunis Madiun dengan didukung beberapa tentara demisioner. Gerakan ini dapat dihancurkan ditengah tekanan yang dilakukan pihak Belanda terhadap Indonesia. Pelaksanaan RE-RA sendiri tidak mengalami keberhasilan, namun pendemisioneran tentara tetap dilakukan bagi mereka yang terlibat dalam gerakan komunis Madiun. Sehubungan dengan keberhasilan tersebut Amerika Serikat dan Inggris percaya terhadap pemerintahan di Indonesia, karena dapat menciptakan demokrasi tanpa bantuan dari pihak asing.

Perjuangan diplomasi dengan dukungan tentara Indonesia mencapai puncaknya pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang dilakukan dalam persetujuan perjanjian KMB. Dalam melaksanakan hasil putusan KMB, Mohammad Hatta memimpin kabinet RIS dan berhasil membawa Indonesia dalam peningkatan keuangan negara walaupun ditengah beban akibat penerimaan keputusan KMB. Tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan

semakin besar sehingga Hatta menyetujui untuk menerima aspirasi kehendak rakyat kembali pada negara kesatuan. Mohammad Hatta menduduki posisi wakil presiden dalam kabinet parlementer.

Dasar peningkatan perekonomian rakyat bersumber dari kemauan rakyat untuk mengembangkan kesejahteraan dengan didukung oleh sistem pemerintahan yang melindungi kepentingan usaha kecil dan menengah dalam koperasi. Pergerakan koperasi Indonesia mengalami kemajuan sehingga perlu dikembangkan manajemen keuangan secara profesional karena koperasi merupakan badan usaha yang harus mengedepankan pemanfaatan sumber keuangan secara tepat guna, seturut bidang usaha berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini merupakan sebuah keuntungan yang dimiliki negara karena koperasi dianggap sebagai badan usaha milik rakyat yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi ekonomi berdasarkan Pancasila.

Kerjasama Mohammad Hatta, Sukarno dan Sutan Syahrir merupakan perwujudan pemanfaatan perbedaan masa lalu yang dapat mendukung penguatan kepercayaan Indonesia untuk melakukan politik diplomasi dengan Belanda. Hatta merupakan pemimpin nasionalis dan religius, ia diidentikkan sebagai pemimpin yang mewakili golongan luar Jawa. Sukarno merupakan seorang dari Jawa dan memiliki kepandaian dalam berpidato sehingga merupakan pemimpin massa yang kharismatik, sedangkan Sutan Syahrir merupakan seorang pejuang kemerdekaan yang bersih dari pengaruh Jepang, karena melakukan gerakan bawah terhadap Jepang.

Kedekatan Hatta, Sukarno dan Syahrir merupakan simbol tri tunggal dalam pemerintahan, namun setelah berbagai benturan prinsip dalam pemerintahan hubungan mereka semakin rengang, terutama setelah Sutan Syahrir merasa tidak memiliki posisi strategis dalam pemerintahan dan setelah pencapaian pengakuan kedaulatan Belanda Mohammad Hatta dituduh membawa Indonesia dalam posisi yang tidak diuntungkan terutama masalah ekonomi karena memberikan prioritas terhadap usaha swasta milik orang Belanda. Mohammad Hatta memiliki perbedaan prinsip dengan Sukarno dalam memperoleh pengakuan kedaulatan tanpa memasukkan Irian Barat, serta kurangnya penerapan demokrasi yang berorientasi pada penciptaan kestabilan ekonomi dan politik berdasarkan konstitusi kenegaraan. Menurut Mohammad Hatta, berbagai kebijakan pemerintah harus berdasarkan konstitusi untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam urusan pemerintahan Hatta, Sukarno, Sutan Syahrir mengalami perbedaan prinsip, namun kedekatan pribadi dengan kapasitas sebagai warga negara tetap terjalin, sehingga dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi prioritas.

Pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan bagi sistem ekonomi kerakyatan yang didukung pengusaha pribumi, demi kepentingan rakyat dalam mencapai keadilan sosial bidang ekonomi. Pengusaha pribumi yang seharusnya membantu pengembangan ekonomi rakyat kurang memanfaatkan kepercayaan tersebut, disamping itu terjadi penyelewengan terhadap penerapan kenetralan politik dalam koperasi sehingga terdapat praktek penanaman pengaruh yang

menghilangkan makna pencapaian musyawarah mufakat karena unsur politik praktis dalam koperasi.

Pelaksanaan pendidikan politik dan pencapaian keadilan sosial yang seharusnya didukung oleh pemerintah, partai politik dan rakyat ternyata tidak mengalami keberhasilan kondisi ini terjadi karena partai politik cenderung menjaga citra untuk menarik simpati rakyat, selain itu pegawai dalam pemerintahan kurang menerapkan profesionalitas kerja sehingga terjadi penyimpangan terhadap konstitusi, munculnya korupsi dan pertikaian kepentingan dalam ketentaraan Indonesia yang menyebabkan melemahnya kewibawaan pemerintah dan alat negara. Berawal dari berbagai kompleksitas permasalahan yang memperlemah keberadaan konstitusi sebagai penegakkan hukum di Indonesia, Mohammad Hatta lebih memilih melepaskan jabatannya.

Nasionalisme yang dimiliki Mohammad Hatta merupakan suatu bentuk nasionalisme yang berakar dari dasar-dasar (1). Kesatuan (*Unity*): bersatunya kehendak pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan; (2). Kebebasan (*Liberty*): adanya sarana penyampaian aspirasi yang berdasarkan kebutuhan rakyat dan diatur dalam konstitusi kenegaraan; (3). Kesamaan (*Equality*): adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang harus menghormati hukum sekalipun sebagai pegawai dalam pemerintahan; (4). Kepribadian (*Personality*): kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan konstitusi ,kenegaraan dan Pancasila; (5). Prestasi (*performance*): pentingnya penerapan musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan sebagai perwujudan tersampainya aspirasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Cindy.
1966: *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Adnan Buyung, Nasution.
1995: *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- A.H. Nasution.
1968: *Tentara Nasional Indonesia. Jilid 2*, Seruling Masa, Jakarta.
-
- 1983: *Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid 3*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali Sastoamidjojo.
1974: *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, PT Kinta, Jakarta.
- Arief Budiman.
2002: *Teori Negara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Badri Yatim.
1985: *Sukarno, Islam, dan Nasionalisme*, Inti Sarana Aksara, Jakarta.
- Badruzzaman Busyairi.
1989: *Boerhanoedin Harahap Pilar Demokrasi*, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Compton, Boyd. R.
1992: *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R Compton (Terj)*, LP3ES, Jakarta.
- Dahm, Bernhard.
1987: *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Terj)*, LP3ES, Jakarta.
- Deliar Noer.
1990: *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Departemen Penerangan.
1970: *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 Tahun: 1945-1970*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Fauzie Ridjal, dan Sri-Edi Swasono (Peny).
1992: *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pemikiran*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Feith, Hebert.
1962: *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*, Cornell University press, Itthaca.
- Geertz, Clifford.
1992: *Politik Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Giebels Lambert.
2001: *Soekarno: Biografi 1901-1950* (Terj), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gottschalk, Louis.
1975: *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Terj), Yayasan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Halomon, Tambu. Arifin Sitio.
2001: *Koperasi Teori dan Praktika*, Erlangga, Jakarta.
- Ide, Anak Agung.
1995: *Pernyataan Rum-Van Royen 7 Mei 1949*, UNS Press, Surakarta.
- Ingleson, Jhon.
1993: *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan* (Terj), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ismail, Suny.
1986: *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jan Bank (Peny).
1999: *Katolik di Masa Revolusi Indonesia* (Terj), Grasindo, Jakarta.
- Kahin, George McT.
1995: *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Terj), UNS dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Karamalsyah, (dkk).
1987: *Panca Windu Gerakan Koperasi*, Dekopin, Jakarta.
- Kartasapetra. G., (dkk).
1987: *Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, Bina Aksara, Jakarta.

Kartini, Kartono.

1996: *ABRI dan Permasalahannya, Pemikiran Reflektif Peran ABRI di Era Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung.

Kartini, Kartono.

1996: *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung.

Kellas, James, G.

1998: *The Politics of Nasionalism and Ethnicity*, Macmillan Press, Houndmills.

Kirdi Dipoyudo.

1985: *Keadilan Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

2002: *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Mani, P.R.S.

1989: *Jejak Revolusi 1945: Sebuah Kesaksian Sejarah* (Terj), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Max Boli, Sabon.

1992: *Ilmu Negara*, Gramedia, Jakarta.

Meutia Farida Swasono, (Peny).

1980: *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia, Jakarta.

Meutia Farida Swasono, I Wangsa Widjaja.

1981: *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato: Dari Tahun 1942 s/d 1949*, Yayasan Idayu, Jakarta.

Meyer, Thomas.

2003: *Sosialisme-Demokrasi Modern* (Terj), CSDS, Yogyakarta.

Miriam Budhiardjo.

1982: *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Moedjanto, G.

1998: *Indonesia Abad Kedua Puluh*. Jilid I-II, Kanisius, Yogyakarta.

Mohammad, Hatta.

1953: *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta.

1953: *Kumpulan Karangan: Jilid I-IV*, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.

1954: *Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi I*, Perpustakaan Perguruan P.P & K, Jakarta.

1954: *Koperasi*, PT Pembangunan, Jakarta.

1978: *Memoir*, Tintamas, Jakarta.

Mrazek, Rudolf.

1996: *Sjahir Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Terj), Yayasan Obor, Jakarta.

Noerhadi, Soedarno.

1982: *POETERA (Poesat Tenaga Rakyat)*, Tinta Mas, Jakarta.

Rikrad, Bangun (Edit).

2003: *Bung Hatta*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Rose, Mavis.

1991: *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Terj), Gramedia, Jakarta.

Sargent, Tower Lyman.

1984: *Idiologi-Idiologi Politik Kontemporer* (Terj), Erlangga, Jakarta.

Sarjana, Sigit Wahyudi.

2001: *Ketika SARBUPRI Mengguncang Pabrik Karung Delanggu 1948: Sebuah Study Awal Pemberontakan PKI Madiun*, CV Aini, Semarang.

Sarjono, Martosewojo.

1989: *Mahasiswa 45 Prapatan-10; Pengabdian*, Patma, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo (dkk).

1977: *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta.

1990: *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, PT Gramedia, Jakarta

1992: *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia, Jakarta.

1994: *Pembangunan Bangsa Tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Aditya Media, Yogyakarta.

Sastrapratedja, M.

2001: *Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Sony Keraf.

1996: *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta.

Sundhaussen, Ulf.

1986: *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI* (Terj), LP3ES, Jakarta.

Sutan Syahrir.

1982: *Sosialisme Indonesia Pembangunan: Kumpulan Tulisan Sutan Syahrir*, LEPPENAS, Jakarta.

Sutarjo Adi Susilo, J. R. (Ed).

1996: *Nasionalisme di Berbagai Negara*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Suwarno, P.J.

1994: *Integrasi Negara dan Otonomi. Bangsa*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Suwarno, P.J.

2003: *Tata Negara Indonesia: Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Tim.

1989: *Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid 3*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta.

Tim.

1990: *Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid 8*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta.

Tim.

1995: *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, LP3ES, Jakarta.

Tim.

2002: *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Tim (Peny).

1998: *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Tim Jawa Pos.

1990: *Lubang-Lubang Pembantaian*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Tobing, KML.

1986: *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Renville*, Gunung Agung, Jakarta.

1986: *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia: Linggajati*, Gunung Agung, Jakarta.

Watt, W. Motgomery.

1987: *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (Terj), Beunbi Cipta, Jakarta.

Wawan, Tunggal Alam.

2003: *Demi Bangsa-suku Pertentangan Sukarno VS Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

Lidyah, Rika H.S, Sulistyanto.

2002: *Good Governance Antara Idealisme dan Kenyataan*. Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modus. Volume 14, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



Lampiran 1 Silabus

Silabus

Nama Sekolah : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah Nasional dan Umum
 Kelas / Semester : XI / 2
 Alokasi Waktu : 4 x 45 (2 pertemuan @2x 45 menit)
 Pendekatan : SAL dan Berbasis kerja kelompok
 Metode : Studi pustaka, observasi, presentasi dan diskusi

Standar Kompetensi	Kemampuan menganalisa upaya mengisi kemerdekaan
Kompetensi dasar	Mendiskripsikan nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956
Materi Pokok	Nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1946
Uraian Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mampu menjelaskan peran Mohammad Hatta periode 1945-1956 2. Siswa mampu menjelaskan hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-

	<p>1956</p> <p>3. Siswa mampu menjelaskan pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956</p>
<p>Indikator dan pencapaian hasil belajar</p>	<p>1. Peran Mohammad Hatta periode 1945-1956</p> <p>a. Peran Bidang politik</p> <p>1). Politik Dalam negeri</p> <p>2). Politik Luar negeri</p> <p>b. Peran Bidang Ekonomi</p> <p>1). RE-RA</p> <p>2). Koperasi</p> <p>2. Hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956</p> <p>3. Pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956.</p> <p>a. Dalam Bidang Politik</p> <p>1). Pendidikan Politik</p> <p>b. Dalam Bidang Ekonomi</p> <p>1). Keadilan Sosial</p>
<p>Pengalaman belajar</p>	<p>1. Pengalaman belajar diluar kelas</p> <p>a. Melalui studi pustaka (buku, koran dan majalah) yang berhubungan dengan penjajahan di Indonesia,</p>

	<p>nasionalisme dan bangsa, negara dan pemerintahan, nasionalisme Mohammad Hatta 1945-1956.</p> <p>b. Sebelum siswa melaksanakan tugas, guru membagi kelompok antara lain dalam kelompok penjajahan di Indonesia, kelompok nasionalisme dan bangsa Indonesia, kelompok negara dan pemerintahan di Indonesia, kelompok nasionalisme Mohammad Hatta Antara 1945-1956.</p> <p>c. Tugas siswa dalam lembar kerja diantaranya berisikan:</p> <p>(1). a. Judul laporan: Nasionalisme Mohammad Hatta Antara 1945-1956.</p> <p>b. Isi laporan singkat:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Peran Mohammad Hatta dalam periode 1945-1956.➤ Hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956.➤ Pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956.
--	--

	<p>c. Kesimpulan: Perasaan nasionalisme merupakan sarana terpenting dalam meningkatkan kepribadian kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>(2). a. Judul laporan: Penjajahan di Indonesia dari masa Belanda dan Jepang 1928-1945.</p> <p>b. Isi laporan singkat:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Latar belakang penerapan penjajahan.➤ Usaha-usaha yang dilakukan dalam penjajahan.➤ Dampak dari penjajahan. <p>c. Kesimpulan: Penjajahan merupakan pembodohan bagi rakyat, sehingga harus dihilangkan dari muka bumi dengan semangat nasionalisme yang tinggi.</p> <p>(3). a. Judul laporan: Nasionalisme dan Bangsa Indonesia periode 1928-1945.</p> <p>b. Isi laporan singkat:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pengertian dari nasionalisme dan bangsa.➤ Dasar-dasar terbentuknya nasionalisme
--	--

	<p>dan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tujuan terbentuknya nasionalisme dan bangsa. <p>c. Kesimpulan: Perasaan nasionalisme merupakan sarana terpenting dalam meningkatkan kepribadian kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>(4). a. Judul laporan: Negara dan Pemerintahan di Indonesia periode 1945-1959</p> <p>b. Isi laporan singkat:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dasar-dasar terbentuknya Negara dan pemerintahan di Indonesia➤ Tujuan dari pembentukan Negara dan pemerintahan di Indonesia➤ Dampak dari terbentuknya Negara dan pemerintahan di Indonesia <p>c. Kesimpulan: Pembentukan negara dan pemerintahan tidak akan terlepas dari munculnya perasaan nasionalisme, maka dari itu perasaan nasionalisme harus senantiasa muncul untuk menuju</p>
--	---

	<p>pemerintahan yang bertanggung jawab berdasarkan landasan konstitusional kenegaraan.</p> <p>2. Pengalaman di kelas</p> <p>a. Apersepsi (15 menit).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan didiskusikan untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa. ○ Guru memberikan pertanyaan tentang kesiapan siswa dalam pengerjaan laporan tiap kelompok dengan meminta penjelasan pada setiap kelompok. <p>b. Kegiatan inti (2X75 menit)</p> <p>Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil kelompok secara bergantian dari kelompok I sampai IV, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Dalam diskusi kelompok ini dapat ditarik suatu dasar penilain siswa terhadap topik yang ada sehingga dapat menjadi tolok ukur penilaian dari keaktifan dan kejelian dalam memberikan jawaban</p>
--	---

	<p>secara analitis apabila ada pertanyaan dari teman yang lain. Setelah berbagai proses dinamika pengajaran yang tertampung dalam diskusi selesai, guru memberikan penyempurnaan hasil diskusi secara menyeluruh dengan memberikan pemahaman reflektif dari materi diskusi yang telah dipresentasikan.</p> <p>C. Penutup (15 Menit).</p> <p>Kesimpulan yang dilakukan oleh guru sebagai moderator dan fasilitator dengan menyatakan bahwa kebenaran merupakan awal dari pembuktian berdasarkan sumber data yang kredibel.</p> <p>1) Latar belakang munculnya penjajahan di Indonesia, akan diimbangi dengan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia untuk mencapai pembentukan negara pemerintahan di Indonesia, sehingga memunculkan semangat nasionalisme Mohammad Hatta untuk meraih kemerdekaan, sehingga merupakan awal pembentukan nasionalisme Indonesia yang akan dibangun secara terus menerus oleh setiap</p>
--	---

	<p>generasi.</p> <p>2) Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penjajahan di Indonesia, akan berhadapan dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, untuk membentuk negara dan pemerintahan di Indonesia, sehingga akan melahirkan tokoh besar yang memiliki nasionalisme terutama Mohammad Hatta untuk Indonesia merdeka yang memiliki kedaulatan kedalam dan keluar.</p> <p>3) Hasil dari penjajahan di Indonesia menciptakan kesengsaraan bagi rakyat, namun semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam upayanya membentuk negara dan pemerintahan secara demokrasi berdasarkan konstitusi kenegaraan, harus dimulai dari kemauan tokoh-tokoh Indonesia terutama semangat nasionalisme Mohammad Hatta untuk menegakkannya secara konsisten demi pelaksanaan pendidikan politik dan pencapaian keadilan sosial bidang ekonomi untuk rakyat</p>
--	---

	<p>Indonesia.</p> <p>4) Kesimpulan: Nasionalisme yang dimiliki seorang tokoh besar sekalipun tidak akan berjalan secara semestinya, kalau tidak didukung oleh semua elemen bangsa untuk mengedepankan nasionalisme Indonesia secara konsisten, berdasarkan konstitusi dan dilandasi integritas kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.</p>
<p>Sumber / Bahan / Alat Pembelajaran</p>	<p>1. Buku-buku karangan Mohammad Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mohammad Hatta, 1953, <i>Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia</i>, Jakarta, Tinta Mas ❖ Mohammad Hatta, 1953, <i>Kumpulan Karangan, Jilid I-IV</i>, Jakarta, Penerbit dan Balai Buku Indonesia ❖ Mohammad Hatta, 1954, <i>Koperasi</i> Jakarta, PT Pembangunan ❖ Mohammad Hatta, 1978, <i>Memoir</i>, Jakarta, Tinta Mas <p>2. Buku-buku yang membahas tentang Mohammad Hatta</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Deliar Noer, 1990, <i>Mohammad Hatta: Biografi</i>

	<p><i>Politik</i>, Jakarta, Gramedia</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mavis Rose, 1991, <i>Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta</i> (Terj), Jakarta, Gramedia. <p>3. Buku-buku tentang perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dan dinamika perpolitikan dalam pemerintahan setelah kemerdekaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adnan Buyung Nasution, 1995, <i>Aspirasi Pemerintahan konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959</i>, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. ❖ George Mct Kahin, 1995, <i>Nasionalisme Modern Revolusi di Indonesia</i> (Terj), Jakarta, UNS dan Pustaka Sinar Harapan. ❖ G. Moedjanto, 1998, <i>Indonesia Abad ke 20 Jilid I-II</i>, Jogjakarta, Kanisius ❖ Jan Bank, 1999, <i>Katolik Di Masa Revolusi Indonesia</i> (Terj), Jakarta, Gramedia. ❖ Lambert Giebels, 2001, <i>Soekarno: Biografi 1901-1950</i> (Terj). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. ❖ Miriam Budhiardjo, 1982, <i>Dasar-Dasar Ilmu Politik</i>, Jakarta, Gramedia
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ P. J Suwarno, 2003, <i>Tata Negara Indonesia dari Sriwijaya Sampai Indonesia Merdeka Indonesia Modern</i>, Jogjakarta, Universitas Sanata Dharma. ❖ Wawan Tunggal Alam, 2003, <i>Demi Bangsaaku Pertentangan Sukarno VS Hatta</i>, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. <p>4. Alat: Foto-foto Mohammad Hatta dengan beberapa tokoh nasional lainnya, yang berperan dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia.</p>
<p>Manfaat pembelajaran</p>	<p>Penerapan nasionalisme dalam pemerintahan yang demokratis, haruslah menghargai setiap perbedaan, sekaligus perlu didukung dengan penciptaan jalannya pemerintahan berdasarkan konstitusi kenegaraan.</p>

Lampiran 2

Penilaian atau Evaluasi:

A. Penilaian proses belajar

Alat penilaian : Skala Nilai

Bentuk : Format penilaian

Kegiatan Yang di- amati Nama	Orientasi	Mengemuka kanpendapat	Kerjasama	Mempresenta sikan hasil	Mengajukan pertanyaan	Menjawab pertanyaan	Memberikan tanggapan	Tanya jawab	Dst	Jumlah Score	Keterangan

Keterangan: 4 = Sangat baik

3 = Baik

2 = Cukup

1 = Kurang

B. Penilaian hasil belajar

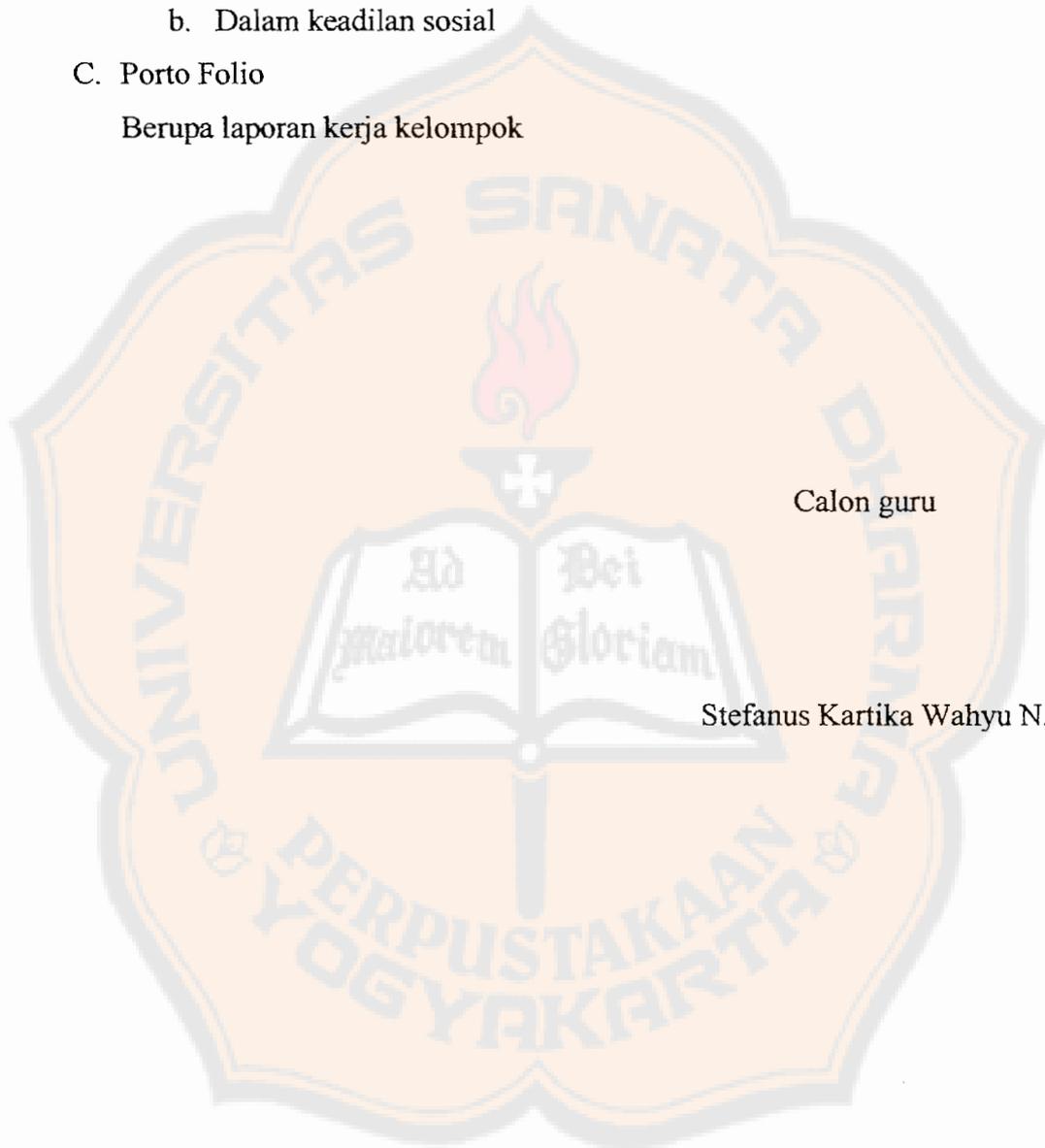
Alat penilaian : tes

Alat tes : Essai berstruktur

Butir-butir tes :

1. Jelaskan Peran Mohammad Hatta periode 1945-1956 ?
 - a. Dalam bidang politik dalam negeri
 - b. Dalam bidang politik luar negeri
 - c. RE-RA
 - d. Koperasi

2. Jelaskan hubungan Mohammad Hatta dengan Sukarno dan Sutan Syahrir antara 1945-1956 ?
 3. Jelaskan pengaruh nasionalisme Mohammad Hatta antara 1945-1956 ?
 - a. Dalam pendidikan politik
 - b. Dalam keadilan sosial
- C. Porto Folio
Berupa laporan kerja kelompok



Calon guru

Stefanus Kartika Wahyu N.P



Lampiran 3

Uraian Materi

Mohammad Hatta merupakan seorang nasionalis yang dilahirkan di Bukit Tinggi Sumatera Barat 12 Desember 1902. Dengan jenjang pendidikan dan beberapa pengalaman keorganisasian yang berorientasi pada pembentukan Indonesia merdeka, yang pernah tempuh dan beberapa pengalaman keorganisasian yang berorientasi pada telah mendorongnya untuk tetap konsisten dalam membentuk dan memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, dengan menerapkan dasar-dasar pemahaman politik bagi rakyat melalui pendidikan politik. Dasar ini mulai terbentuk semenjak bergabungnya Mohammad Hatta dalam PNI Baru yang berorientasi pada penciptaan kader-kader penerus bangsa yang bertanggung jawab dan tidak tergantung terhadap pemimpin. Perjuangan Hatta mengalami hambatan dari Belanda sehingga ia di penjarakan dan pembuangan ke Bouven Digul (Papua). Pada masa penjajahan Jepang, Mohammad Hatta bersama Sukarno bersikap kooperatif sehingga terbentuk beberapa organisasi bentukan Jepang seperti PUTERA, namun dibalik itu tetap mempertahankan hubungan dengan kelompok bawah tanah pimpinan Sutan Syahrir untuk meningkatkan nasionalisme Indonesia.

Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia telah membawa kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Mohammad Hatta diangkat secara aklamasi sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam perkembangannya Belanda semakin meningkatkan intervensi terhadap Indonesia, sehingga Mohammad Hatta memandang perlu untuk membentuk pemerintahan yang dipercaya rakyat secara menyeluruh, agar dunia internasional memberikan dukungan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Keputusan strategis yang diambil Mohammad Hatta tertuang dalam berbagai maklumat yang dikeluarkan atas peranannya seperti maklumat 16 Oktober 1945, maklumat 1 November 1945, Maklumat 3 November 1945, maklumat 14 November 1945 dan janji pelaksanaan pemilihan umum. Perubahan sistem kabinet dilakukan dengan mengacu pada perubahan pertanggung jawaban yang bermula pada presiden (kabinet presidensiil) menjadi pada parlemen (kabinet parlementer). Berbagai maklumat yang dikeluarkan ini merupakan sebuah tindak lanjut dari keseriusan Mohammad Hatta, untuk menerapkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan kepentingan rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat melalui parlemen.

Perubahan tersebut perlu didukung dengan penerapan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yang mengacu pada penciptaan hubungan saling menguntungkan tanpa tekanan pengaruh, sehingga dapat mendukung politik diplomasi dalam meraih pengakuan kedaulatan dengan didukung oleh tentara yang profesional. Dasar pembentukan politik luar negeri Indonesia mengalami ancaman dari gerakan komunis Madiun yang menentang pemerintahan di masa Hatta menjabat sebagai perdana menteri, ditengah-tengah krisis ekonomi akibat perjanjian Renville. Gerakan ini mengalami perpecahan, karena kuatnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Sukarno-Hatta yang didukung tentara dan

rakyat tanpa bantuan Belanda. Gerakan Komunis Madiun yang dapat dipadamkan telah membawa pada keuntungan bagi Indonesia, karena membantu dalam meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Berbagai tahapan politik diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia-Belanda telah dilakukan mulai dari Linggajati yang dilanggar dengan agresi militer I, perjanjian Renville yang dilanggar dengan agresi militer II dengan melakukan penawaran terhadap beberapa pemimpin Indonesia dan kembali ke Jogjakarta setelah persetujuan Roem-Royen dengan ditindaklanjuti dalam perjanjian KMB yang membahas tentang pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dalam meraih pengakuan kedaulatan Mohammad Hatta, Sukarno dan Sutan Syahrir melakukan kerjasama untuk memberdayakan perbedaan yang dimiliki dalam mengedepankan politik diplomasi, melalui penciptaan kepercayaan terhadap rakyat, dengan didukung pembenahan dalam berbagai sektor untuk mencapai kemandirian ekonomi, dengan didukung penghematan keuangan negara. Hubungan Hatta, Sukarno dan Sutan Syahrir dalam perkembangan waktu mengalami perbedaan prinsip sehingga terjadi perpecahan pandangan dalam pemerintahan, namun dalam hubungan antar pribadi hubungan Sukarno, Mohammad Hatta, Sukarno tidak mengalami perpecahan.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia kestabilan perekonomian dan politik tidak mengalami perkembangan yang menyakinkan, kondisi ini dipengaruhi oleh tindakan elit politik, pegawai pemerintahan, tentara Indonesia yang kurang mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam melakukan pelayanan terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Selain itu elit partai kurang mengerti arti penting pendidikan politik sehingga hanyalah mengarahkan pada bagaimana memenangkan pemilihan umum yang akan dilaksanakan, selain itu pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia yang membuka kesempatan bagi gerakan ekonomi dari pengusaha pribumi hanyalah berdasarkan kedekatan politis tanpa melihat kredibilitas perusahaan begitu juga dalam gerakan koperasi Indonesia yang telah dipengaruhi oleh tindakan politik praktis, sehingga terjadi berbagai penyimpangan yang menghambat pencapaian keadilan sosial bidang ekonomi. Dengan berbagai permasalahan ini ditambah keinginan Sukarno menerapkan konsep politik demokrasi yang berbeda dengan konsep demokrasi Indonesia, Mohammad Hatta lebih memilih tetap menghargai perbedaan pendapat dalam demokrasi, dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden dalam pemerintahan parlementer.

Lampiran 4

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal yang mengenai ~~kebebasan~~ ^{kebebasan} ~~kehidupan~~ ^{kehidupan} ~~kebudayaan~~ ^{kebudayaan} d. l. l., dilaksanakan dengan tjara ~~demokratis~~ ^{demokratis} dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'45
Wakil² bangsa Indo

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemerintahan ketatanegaraan d. l. l., dilaksanakan dengan tjara demokratis dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 1945

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Soekarno

Hatta

- ❖ Teks Proklamasi merupakan bukti tertulis dari bangsa Indonesia, yang menjadi dasar sejarah bagi kemerdekaan Indonesia untuk menyatakan diri sebagai negara bangsa yang berdaulat.
- ❖ Mendukung uraian halaman: 11, 34, 84.
- ❖ Sumber: Lambert Giebels, *Soekarno: Biografi 1901-1950*, terj: I. Kapitan-Oen B.A, PT Gramedia, Jakarta. Hal: 357.

Lampiran 5

Maklumat Wakil Presiden No X**

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian kekuasaan legislatif
Kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SESUDAH MENDENGAR pemitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannya jang hingga sekarang didjalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubungan dengan gentingnya keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi herdasarkan paham kedaulatan rakjat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

* Mendukung uraian halaman: 12, 37, 111, 126

** Sumber Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Terj: Sylvia Tiwon, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal.461.

Lampiran 6

Pendjelasan Maklumat Wakil Presiden No. X* •

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewadajiban dan kekuasaan Badan Pekerdja Komite Nasional, jang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubungan dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut:

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerdja berkewajiban dan berhak:

- a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan negara.
Ini berarti, bahwa Badan Pekerdja, bersama-sama dengan presiden, menetapkan garis-garis besar haluan negara, Badan Pekerdja tidak berhak tjampur dalam kebidjaksanaan (*dagelijks beleid*) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.
- b. Menetapkan bersama-sama dengan presiden Undang-Undang jang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah, artinja: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (*uitvoering*).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewadajiban dan kekuasaan Badan Pekerdja jang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Djakarta, 20 Oktober 1945.

BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL.

KETUA,
SJAHRIR.
PENULIS,
SOEWANDI

* Mendukung uraian halaman: 12, 37, 111, 126.

• Sumber Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional diIndonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Terj: Sylvia Tiwon, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 462.

Lampiran 7

Maklumat Politik*)*

POLITIK PEMERINTAH. Haluan dari Politik Pemerintah Republik Indonesia, Jang telah disetujui oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia.

Setelah lebih dari dua bulan lamanja kita dengan berbagai-bagai djalan menjatakan hendak hidup sebagai bangsa jang merdeka, pada saat kita menghadapi suasana baru didalam perdjjuangan kemerdekaan kita, pada saat dunia mendekati kita untuk memandang lebih teliti diri dan pendirian kita, perlu kita madju kemuka dengan wadjah jang bersih dan dada terbuka, menundjukkan kebenaran kita jang tidak sadja berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan melainkan pasti djuga berdasarkan atas akal serta perhitungan jang sehat.

Setelah Pemerintah Belanda di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942 menjerah kepada militer Djepang di Bandung dengan hampir sama sekali tiada mengadakan perlawanan, maka tinggallah bangsa kita jang tidak bersendjata mendjadi umpan militerisme Djepang jang keras dan kedjam itu. Tiga setengan tahun lamanja rakjat kita menderita paksaan dan kekedjaman Djepang, seperti belum pernah dialaminja didjaman pendjadjahan Belanda berpuluh tahun jang terkemudian. Seluruh rakjat kita diperbuat seolah-olah barang jang murah jang diboroskan didalam peperangan. Dari rakjat djelata jang diperbudak dengan kerdja paksa dan hasil buminja dirampas, sampai ke kaum terpeladjar jang dipaksa berdusta dan menipu rakjat, merasai genggamannya militerismenja. Kesengsaraan rakjat kita lahir dan batin didalam tiga setengah tahun ini boleh dikatakan tak terbatas. Seluruh rakjat kita dipaksa berbaris dan tahu menerima perintah setjara militer. Kepintaran militer inilah jang ditinggalkan oleh pendjadjahan Djepang sebagai djedjak didalam djiwa rakjat dan terutama didalam djiwa pemuda kita.

Tanggungannya pendjadjahan Belanda dalam hal ini adalah bahwa bangsa kita jang berdjumlah 70.000.000 djiwa setelah berabad "dididik" oleh Belanda, pada tanggal 9 Maret 1942 diserahkan kepada militerisme Djepang didalam segala-segalanja tidak berdaja untuk menghadapi kekuasaan dan kekerasan serta tipu muslihat propaganda Djepang, oleh karena rakjat kita belum pernah dipertjajai bersendjata serta tidak pula dipertjajai perlengkapan inteleknja jang tjukup, untuk dapat menghadapi sendiri perputaran sedjarah seperti terdjadi pada tanggal 9 Maret 1942 itu.

*) Mendukung uraian halaman: 12-13, 38, 111, 126.

* Sumber Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Terj: Sylvia Tiwon, Jakarta, pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 463-468.

BELADJAR MENGHARGAI DIRI SENDIRI

Tetapi di dalam kesulitan jang sebesar-besarnja itu rakjat kita beladjar membanding pendjadjahan Belanda dengan sebenarnja, segala kekurangan tak pernah terasa setadjam dan sedjelas, ketika rakjat ditinggalkannja dengan tjara jang diperlihatkannja itu. Njata benar kelemahan dan kekosongan perumahan pendjadjahan Belanda.

Maka pada saat itu timbullah pada rakjat kita kesedaran baru, perasaan kebangsaan jang lebih tadjam dari pada di waktu jang lalu. Perasaan itu dipertadjam lagi oleh propaganda ke Asiaan Djepang. Kekerasan jang dilakukan Djepang tidak menghambat tumbuhnja kesadaran kebangsaan Indonesia. Selama tiga setengan tahun pendjadjahan Djepang seluruh negara serta perusahaan-perusahaan jang dahulu dipimpin oleh orang Belanda, didjalankan oleh orang Indonesia, diawasi oleh orang Djepang, jang biasanja njata tidak tjakap.

Didalam kekedjaman dan kekerasan pendjadjahan Djepang itu rakjat dan bangsa kita beladjar menghargai dirinja sendiri, mempertadjam kesadaran kebangsaannya terhadap Djepang dan djuga terhadap bangsa asing lainnja. Berdjuta-djuta djiwa rakjat kita meladjang, serta seluruh bangsa sengsara selama tiga setengah tahun oleh karena kekedjaman Djepang, akan tetapi djuga oleh karena kesalahan Belanda jang mengurbankan kita kepada kekerasan Djepang itu dengan tidak memungkinkan kita mempunjai alat pertahanan jang diperlukan.

Oleh karena itu maka sebenarnja pihak Belanda pada batinnja tidak berhak untuk menjalahkan orang-orang jang diserahkan pada kekedjaman Djepang itu, dengan tuduhan bekerdja bersama dengan Djepang, sedangkan orang Belanda sendiri di dalam keadaan jang sama, umumnja lebih suka lagi melajani Djepang. Selain dari pada itu memang pula pembangunan perasaan kebangsaan kita ini ada djuga jang merupakan perlawanan terhadap kekerasan Djepang, setjara gelap dan djuga pemberontakan, sabotage dan lain-lain seperti dapat dibuktikan oleh ribuan orang gerakan kiri kita jang dihukum, disiksa, dibunuh dan diburu.

Buktinja adalah pemberontakan di Tasikmalaja, di Indramaju, di Blitar, di Sumatra, di Borneo Barat d.l.l.

Sebagian lain dari kaum nasionalis kita jang menyelenggarakan kesadaran kebangsaan dengan djalan jang sjah, terpaksa bekerdja bersama dengan pihak Djepang, ikut berbaris serta berteriak di dalam barisan-barisan Djepang jang dibentuknja untuk keperluan perangnja.

Bagaimana kerasnja arus kebangsaan itu dapat pula dilihat pada golongan kaum nasionalis jang bekerdja bersama dengan Djepang itu, jang selamanya mempertahankan tjita-tjita kerakjatannya, meskipun dipaksa berbaris di dalam barisan totaliter Djepang. Hal ini dapat dibuktikan oleh Undang-Undang Dasar jang njata benar dimaksudkan supaja berdasarkan kerakjatan, meskipun ia dirantjang oleh mereka didalam djaman pendjadjahan Djepang. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kesedaran kebangsaan Indonesia memuntjak menjadi kemauan bangsa jang bulat untuk

mewujudkan kedaulatannya. Seluruh rakyat kita masuk tertarik ke dalam gelombang kebangsaan yang besar itu.

BAGAIMANA DENGAN BELANDA?

Penjerahan Djepang kepada Sekutu telah pula bermula. Bagi dunia, terutama bagi pihak yang telah mendirikan susunan United Nations di San Fransisco timbul soal bagaimana hendak menempatkan kedaulatan Negeri Belanda yang diakui itu pada bangsa Indonesia yang telah menjatakan kedaulatannya sendiri.

Pada Konferensi-konferensi internasional pihak Belanda selalu mengemukakan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada pemerintah Belanda, yang katanya bukan pemerintahan djadjahan. Akan tetapi njata sekarang pada dunia, bahwa djika Belanda hendak kembali mendjadi pemerintah di Indonesia lebih dahulu kemauan rakyat Indonesia yang sekarang telah dua bulan lamanya dinjatakan pada dunia dengan berbagai djalan, harus dihantjurkan dengan kekerasan, sehingga akan terdjadi pengurbanan djiwa yang tak ketjil jumlahnya. Njata bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia tidak dapat diwujudkan, djika tidak dengan memperkosa maksud perdjandjian Atlantic Charter serta perdjandjian United Nations di San Fransisco.

Sebenarnya pihak Belanda yang dengan begitu mudah menjerahkan nasib bangsa kita kepada kekerasan Djepang sekali-kali moreel tidak berhak lagi untuk kembali begitu sadja di Indonesia, seolah-olah tidak terdjadi apa-apa sedjak tahun 1942, serta pula seakan-akan ia tidak bersalah apa-apa dan segala harus kembali mendjadi keadaan sebelum petjah perang.

Kehendak Belanda ini bertentangan dengan segala perasaan keadilan dan djika dibenarkan tentu harus didjalankan dengan perkosaan segala perasaan keadilan dan kemanusiaan. Menurut dasar-dasar Charter San Fransisco, maka Negara yang diberi tanggung djawab atas bangsa yang belum merdeka itu tidak mungkin mendjalankan tanggung djawabnya dengan memperkosa dasar-dasar Charter United Nations, itu sendiri.

Lebih lagi terasa kepintjangan keadaan ini, djika dilihat, bahwa pihak Belanda sama sekali tidak mempunjai djawab yang pantas terhadap kesulitan yang dihadapinya itu. Hingga sekarang belum sedikit djuga ternjata, bahwa yang dikehendaki oleh Belanda itu lain dari pada pengembalian pendjadjahannya yang lama, meskipun ia mengumumkan keterangan Ratu Wilhelmina yang diutjapkan pada tahun 1942. untuk memaksakan tjara pemerintahan yang dimaksudkan oleh Belanda itu, ia tak mampu berbuat lain dari pada mengharap akan dapat mempergunakan kekuatan militer Sekutu yang datang memperlutjuti sendjata Djepang di Indonesia sebagai alat untuk melemahkan atau menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya sendiri terhadap Pemerintahan yang hendak dipaksakan oleh pihak Belanda atas dirinja.

Akan tetapi, dengan semangat kebangsaan kita yang menjala-njala, pasti pemerintahan Belanda itu, meskipun memakai kekerasan militer yang modern,

tidak akan dapat mentjegah bangsa kita untuk mempunjai Pemerintah jang dipilihnja sendiri.

Selama dunia tak mengetahui lain djalan untuk memenuhi kewadjabnja terhadap anggapan kedaulatan Belanda atas Indonesia itu, dari pada menghantjurkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnja sendiri, selama itu pula dunia tentu tidak akan dapat manfaat jang semestinja dari kekajaan negeri dan bangsa Indonesia.

Hal ini terlebih-lebih akan menjedihkan terhadap negara-negara tetangga Indonesia, terutama Australia, Filipina, dan Amerika Serikat.

Terlebih-lebih Amerika Serikat jang oleh seluruh Asia dan terutama oleh Indonesia diharapkan akan dapat memberi pertolongan jang sebesar-besarnja dikemudian hari, didalam usaha bangsa Indonesia memadjukan negaranja serta penghidupan rakjatnja.

Umpamanja dengan pertolongan industri besar Amerika serta kredit Amerika dan pembelian barang mentahnja jang banjak itu.

SIKAP BANGSA KITA!

Kita orang Indonesia di dalam usaha hendak menjempurnakan kedudukan bangsa kita, tidak perlu menggunakan kekerasan. Djika ada kekerasan terdjadi ialah tak lain oleh karena fihak Belanda memerlukan memakai kekerasan terhadap bangsa kita supaya dapat memaksakan kehendaknja atas kita.

Dipihak kita tidak ada keinginan untuk memaksa bangsa lain, kita hanja berkehendak diberi kemerdekaan, dibiarkan menjempurnakan susunan negara kita sendiri.

KITA MENGAKUI BAHWA KEDUDUKAN NEGERI KITA MELETAKKAN SATU TANGGUNG DJAWAB JANG BESAR DIBAHU KITA TERHADAP KELUARGA DUNIA. KITA TIDAK MEMBENTJI BANGSA ASING, DJUGA TIDAK BENTJI KEPADA BANGSA BELANDA, APALAGI ORANG INDO, AMBON ATAU MENADO JANG SEBENARNJA BANGSA KITA DJUGA. MALAHAN KITA MENGETAHUI DAN MENGERTI BENAR BAHWA UNTUK KEPERLUAN NEGERI DAN BANGSA KITA DI DALAM BEBERAPA TAHUN JANG AKAN DATANG INI, KITA AKAN MEMERLUKAN PERTOLONGAN BANGSA ASING DI DALAM PEMBANGUNAN NEGERI KITA BERUPA KAUM TEKNIK, DAN KAUM TERPELADJAR, PUN DJUGA KAPITAL ASING.

DI DALAM MEMENUHI KEPERLUAN ITU KITA TIDAK AKAN MENGHINDARKAN KENJATAAN BAHWA ORANG JANG BERBAHASA BELANDA JAITU ORANG BELANDA, MUNGKIN AKAN LEBIH BANJAK DIPERGUNAKAN OLEH KERENA MEREKA TELAH ADA DISINI DAN LEBIH BIASA AKAN KEADAAN DI SINI, SEHINGGA PELAKSANAAN KEMERDEKAAN KITA ITU BELUM PERLU BERARTI KERUGIAN BESAR UNTUK PIHAK BELANDA, DJIKA DIUKUR DENGAN UANG ATAU DJIWA, AKAN TETAPI TENTU SEKALI BERARTI PERUBAHAN JANG SEBESAR-BESARNJA DI DALAM KEDUDUKAN POLITIKNJA.

KITA yakin bahwa tanah kita jang kaja-raja ini djika diusahakan dengan sesungguhnya untuk meninggikan deradjat penghidupan bangsa kita serta dunia umumnja, akan masih banjak benar memberi ruangan untuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Australia dan Filipina untuk turut dalam pembangunan negara dan bangsa kita. Akan tetapi sekalian itu hanja akan dapat dimulai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan pengakuan negara dan pemerintahan jang telah kita pilih. Bukan sadja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekas terlaksanaja hal ini, akan tetapi seluruh dunia jang menunggu-nunggu sumbangan tanah bangsa Indonesia terhadap kekurangan jang ada di dunia sekarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung segala jang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang Hindia Belanda sebelum penjerahan Djepang dan patut mendjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita.

Segala milik bangsa asing selain dari pada jang diperlukan oleh negara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada jang berhak, serta jang diambil oleh negara akan dibajar kerugiannja dengan seadil-adilnja.

Sedjadjar dengan usaha persahabatan kita dengan tetangga kita serta dengan seluruh dunia, kita tidak sadja akan beritjhtiar mendjadi suatu anggauta United Nations menjtudju benar-benar maksud Charter United Nations, akan tetapi di negeri kita akan melaksanakan kedaulatan rakjat kita dengan aturan kewargaan jang akan lekas membuat semua golongan Indo Asia dan Eropah mendjadi orang Indonesia sedjati, mendjadi patriot dan demokrat Indonesia.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, tjita-tjita dan dasar kerakjatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan Undang-Undang Dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakjat kita jang terbanjak.

Terhadap rakjat dan penduduk pada umumnja, kita akan mendjalankan suatu rentjana kemakmuran jang besar jang mungkin memerlukan banjak kredit dari luar negeri dan djuga banjak hasil industri Amerika Serikat, Australia dan lain-lain negeri jang berdagang dengan negeri kita. Tiap-tiap penduduk ditanggung keselamatannja di dalam berusaha, djika tidak melanggar aturan negeri, meskipun ia orang Belanda.

PERTIMBANGAN BAGI BELANDA

BAGI BANGSA DAN RAKJAT BELANDA MEMANG SEHARUSNJA MENDJADI PERTIMBANGAN JANG SUNGGUH-SUNGGUH: APAKAH IA AKAN MENURUT NAFSU SEGOLONGAN KETJIL KAUM KAPITAL DAN PENDJADJAH JANG PEMANDANGANNJA TERUTAMA DIPENGARUHI OLEH KEPENTINGANNJA SENDIRI DAN DENGAN ITU AKAN MENGORBANKAN BERIBU DJIWA PEMUDA SERTA BANJAK TENAGA BANGSA BELANDA, DI DALAM ITJHTIAR JANG BEGITU BESAR

RISIKONJA, JAITU MENAKHLUKKAN KEMBALI BANGSA INDONESIA JANG TELAH BERDIRI, ATAU APAKAH IA AKAN MENERIMA DAN MENJESUAIKAN DIRINJA DENGAN PERDJALANAN SEDJARAH, MENTJARI DJALAN DAMAI SUPAJA KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN BANGSA BELANDA JANG BEGITU BESAR DI INDONESIA INI DAPAT DISELENGGARAKAN SELANDJUTNJA, SUPAJA PUTERA-PUTERANJA DAN KETURUNANNJA JANG BERADA DI SINI DAPAT PULA HIDUP DENGAN SELAMAT DI DALAM USAHA MENTJARI NAFKAHNJA.

Sedjak kita akan mendapat kesempatan jang sepenuhnya untuk memberikan seluruh tenaga kita pada pembangunan rakjat dan bangsa kita, dengan setjepat-tjepatnja kita pada pembangunan rakjat dan bangsa kita, dengan setjepat-tjepatnja kita berusaha melaksanakan hak-hak rakjat kita jang sesungguhnya sesuai dengan tjita-tjita United Nations, jaitu tidak sadja mendjadikan rakjat jang merdeka menjatakan pikirannja, merdeka memilih kejakinan dan agamanja, bebas dari sewenang-wenang dan kekuatan, bebas dari kekurangan, melainkan djuga mendjadi rakjat jang modern untuk seluruh rakjat kita dan untuk segala lapisan penduduk.

Selaras dengan itu perhubungan kita dengan dunia luar tidak sadja lagi akan terbatas pada pertukaran barang dan orang, akan tetapi lambat laun mendjadi pertukaran ilmu dan kebudajaan, terutama dengan tetangga-tetangga kita, lebih-lebih dengan bangsa jang sedarah dengan kita seperti bangsa Filipina. Kita pasti akan sanggup memberi sumbangan jang bagus kepada kebudajaan dunia, djika kita telah mendapat kesempatan sepenuh-penuhnja sebagai bangsa jang sedjadar kedudukannja dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Djakarta, tanggal 1 Nopember 1945
WAKIL PRESIDEN,
MOHAMMAD HATTA.

Lampiran 8

Maklumat Pemerintah* •

PARTAI POLITIK. Andjuran Pemerintah
Tentang pembentukan partij-partij politik.

Berhubungan dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasanja untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partij-partij ini hendaknja memperkuat perdjuaanagn kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik, karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Djakarta 3 Nopember 1945.
WAKIL PRESIDEN,
MOHAMMAD HATTA.

* Mendukung uraian halaman: 13, 38-39, 111, 126.

• Sumber Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Terj: Sylvia Tiwon, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal.469.

Lampiran 9

Maklumat Pemerintah*

Kabinet II. Susunan Kabinet II
Baru. Tanggung jawab menteri.

Oleh karena kementerian pertama dari Republik Indonesia dibentuk buat sementara waktu tatkala saatnja genting dalam sedjarah Negara, maka sudah semestinya, bahwa bagian-bagian tergesa-gesa itu, pembaharuan dari kabinet memang telah lama dirasakan perlunja akan tunda sampai ada kesempatan jang baik.

Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami udjian-udjian jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahaja menegakkan diri, merasa, bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menjempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi.

Jang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru ialah, bahwa *tanggung jawab adalah didalam para menteri.*

ST. SJAHRIR	Perdana Menteri
	Menteri Luar Negeri
	Menteri Dalam Negeri
Mr. A. SJAHRIFUDDIN	Menteri Penerangan
	Menteri Keamanan Rakjad
Mr. SOENARJO KOLOPAKING	Menteri Keuangan
Dr. T.G.S. MULIA	Menteri Pengadjaran
Mr. SUWANDI	Menteri Kehakiman
Dr. ADJI DARMO	Menteri Sosial
Dr. DARMASETIAWAN	Menteri Kesehatan
Ir. DARMAWAN	Menteri Kemakmuran
Ir. PUTUHENA	Menteri Pekerjaan Umum
H. RASJIDI	Menteri Negara

Tindakan-tindakan demokratis jang lain jang segera harus dijalankan ialah mengadakan Pemilihan Umum, supaya wakil-wakil rakjat yang terpilih dengan merdeka mengambil bahagian jang tepat dalam menjalankan politik Pemerintahan dan menentukan haluan Negara.

Dengan kesempurnaan dari pemilihan umum ini, maka habislah dengan sendirinya pekerjaan badan pekerdja sekarang, yang baru-baru disusun, jang sementara waktu menjalankan pekerdjaan Majelis Perwakilan Rakjat dan Dewan Pembentuk Undang-Undang.

* Mendukung uraian halaman: 13, 40, 111, 126.

° Sumber Koesnodiprodjo, *Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1945 (cet: 2)*, Jakarta, Penerbitan Baru 1951, hal 56-57.

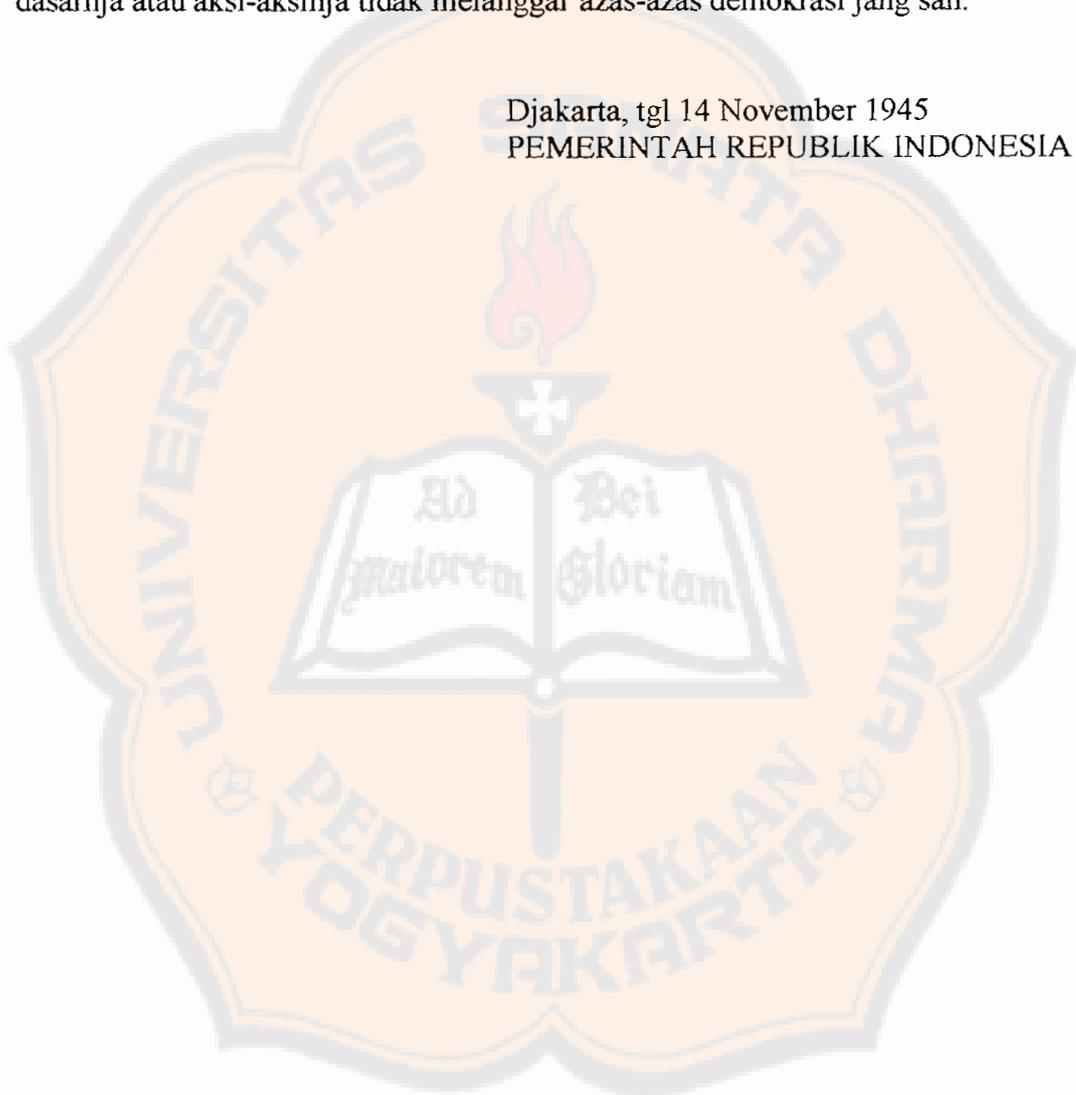
Untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik, maka pemerintah Republik Indonesia mengandjurkan kepada rakyat mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran politik dalam Negara. Bibit-bibit dari beberapa partai itu sudah timbul sebelum pendjajahan Djepang, akan tetapi terpaksa tidak menampilkan diri dalam zaman pemerintahan Djepang disini.

Baik Djepang, maupun Belanda bertindak keras terhadap komunis dan partai-partai politik yang menghendaki kemerdekaan sesempurna-sempurnanya.

Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi politik selama dasarnya atau aksi-aksinya tidak melanggar azas-azas demokrasi yang sah.

Djakarta, tgl 14 November 1945

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

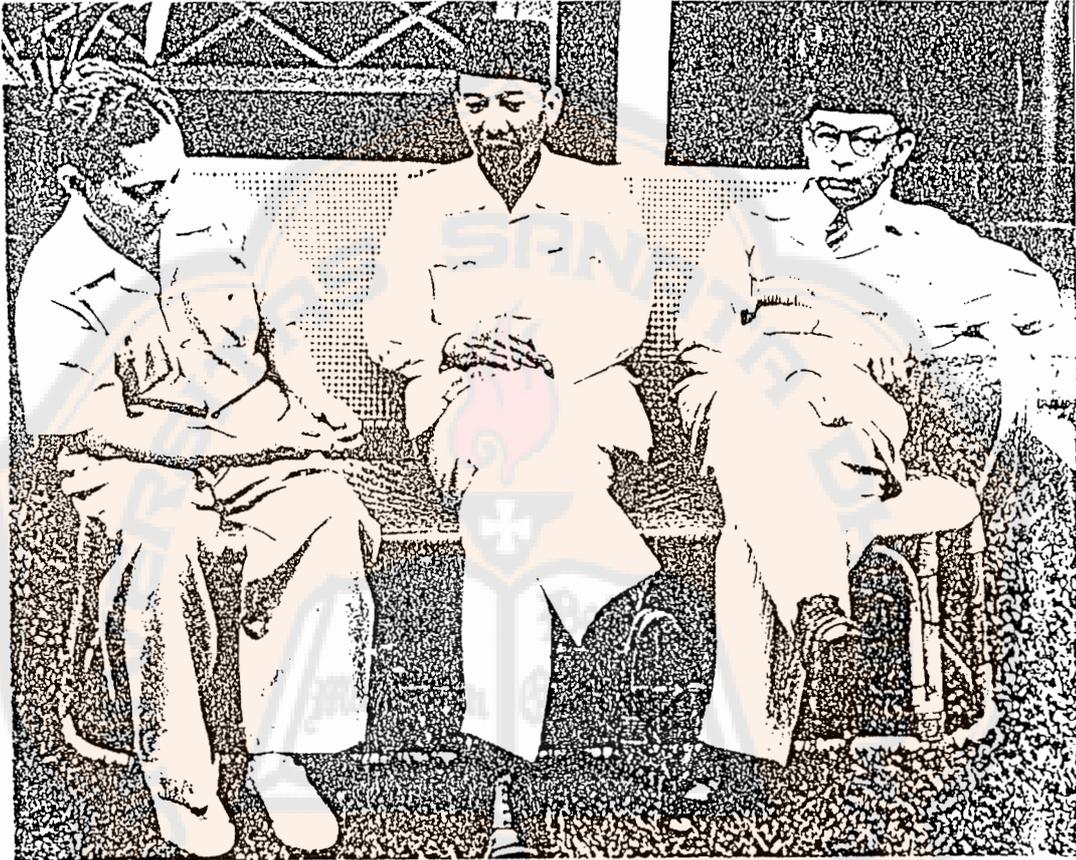


Lampiran 10



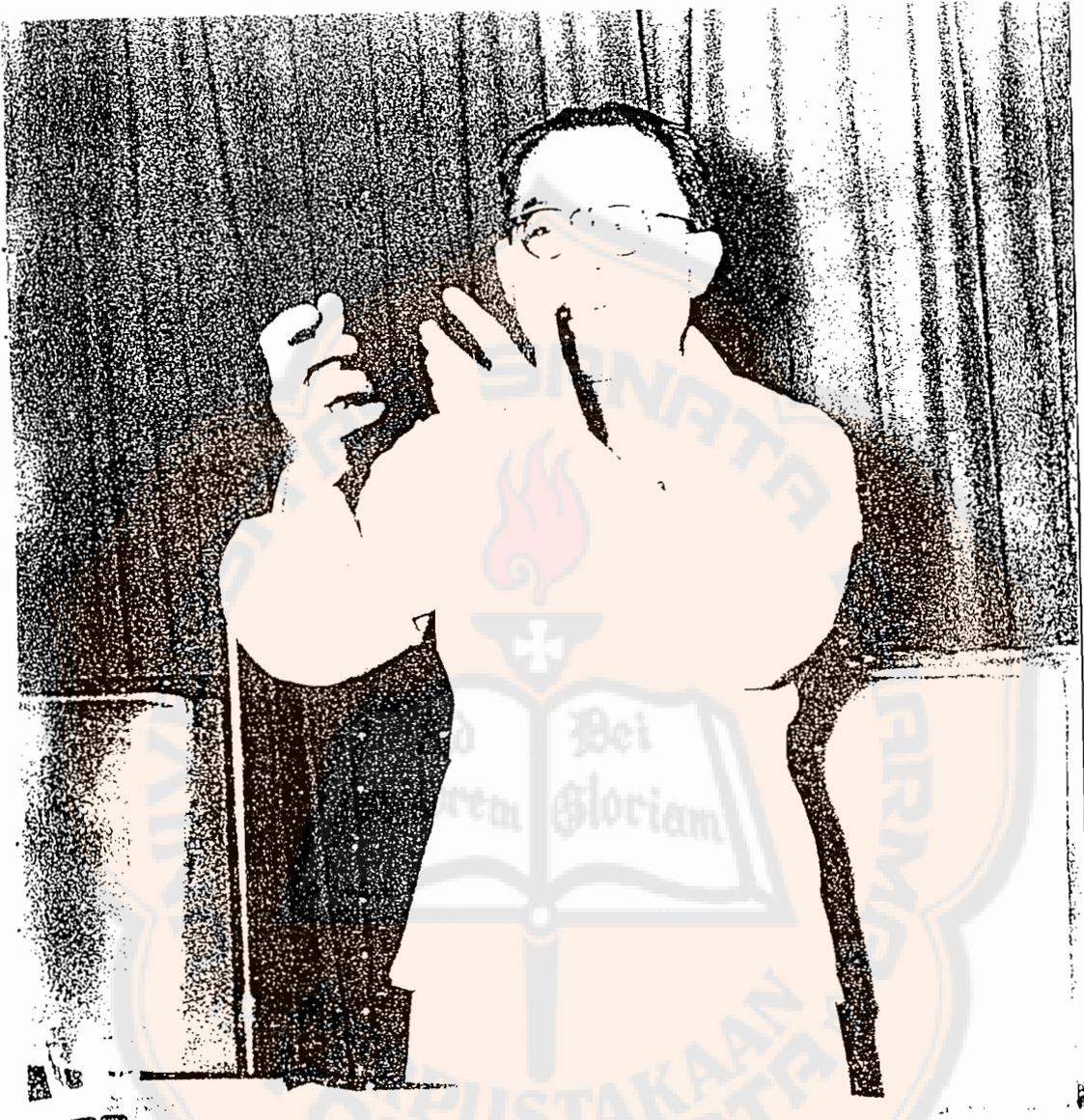
- ❖ Setelah memperhatikan keadaan internasional dan perkembangan politik dalam negeri Maka Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengusulkan perubahan sistem pemerintahan yaitu kabinet presidensiil diganti dengan kabinet parlementer. Usul ini disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta Mereka menunjuk Sjahrir sebagai formatur kabinet dan pada tanggal 14 November 1945 tersusunlah kabinet parlementer dengan Sjahrir sebagai perdana menteri. Bertempat di rumah kediaman Presiden Soekarno pegangsaan timur 56. Jakarta. Pada tanggal 15 November dilangsungkan serah terima dari kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer. Dalam pergantian pemerintahan berjalan dengan tertib dan teratur, tampak Hatta duduk disebelah kanan presiden Sukarno disamping Sutan Sjahrir.
- ❖ Mendukung uraian halaman 13, 40, 103
- ❖ Sumber: H. Rosihan Anwar (editor), *Mengenang Syahrir*, Jakarta, PT. Gramedia, 1980.

Lampiran II



- ❖ Keakraban dan kesatuan pandangan politik serta tekad berjuang meliputi ketiga pemimpin bangsa Indonesia ini pada awal tahun 1946. Presiden Soekarno Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Sjahrir bergambar bersama di halaman belakang rumah kediaman Presiden Sukarno di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sebelum, tanggal 4 Januari 1946 Soekarno dan Hatta hijrah ke Yogyakarta seraya Sjahrir tetap berada di Jakarta menghadapi tentara sekutu dengan senjata diplomasinya.
- ❖ Mendukung uraian halaman 88, 109, 128
- ❖ Sumber: H. Rosihan Anwar (editor), *Mengenang Syahrir*, Jakarta, PT Gramedia, 1980.

Lampiran 12



-
- ❖ Pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta menggemparkan peserta sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Malang tanggal 25 februari 1947. Hatta berhasil mempertahankan peraturan Presiden No 6, dan sidang menyetujui penambahan jumlah anggota KNIP dan persetujuan Linggajati yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Maret 1947.
 - ❖ Mendukung uraian halaman: 42, 91, 105.
 - ❖ Sumber: Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980*, KILTV & Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.Hal: 19.

Lampiran 13



- ❖ Di tempat pengasingan Pangkalpinang, Bangka tahun 1949, berdiri dari kiri ke kanan: Dr Darmasetiawan, Prof. Soepomo, Bung Hatta, Ali Sastroamidjojo, S.H., Mohammad Roem, A. G. Pringgodigdo. Duduk laksamana Udara Suryadarma (Foto Ipphos, reprod Yayasan Idayu).
- ❖ Mendukung uraian halaman: 46, 96, 107.
- ❖ Sumber: Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta, Gunung Agung, 1978. Hal: 43.

Lampiran 14



-
- ❖ Bung Karno dan Bung Hatta bergambar bersama-sama dengan para menteri Kabinet RIS 1950 (Foto, reprod, Yayasan Idayu).
 - ❖ Mendukung uraian halaman: 46, 58, 98, 108, 121, 127.
 - ❖ Sumber: Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta, Gunung Agung, 1978. Hal: 47.

Lampiran 15



- ❖ Pada 27 Desember 1949 Pemerintah Belanda mengukuhkan kedaulatan RIS. Dari kiri ke kanan: Dr Suparmo, Sultan Pontianak Hamid II Alkadri, Mohammad Hatta, Ratu Belanda Juliana. Dr Williem Drees.
- ❖ Mendukung uraian halaman: 46, 58, 97, 108, 122.
- ❖ Sumber: Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980*, KILTV & Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002. Hal: 21

